

11.08
Pratiwi
F 4

**FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh :

**EVI GIWANG PRATIWI
L4D001199**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

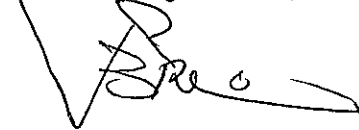
EVI GIWANG PRATIWI
L4D001199

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal Juni 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

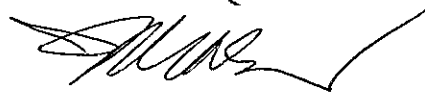
Semarang, Juni 2003

Pembimbing Pendamping



PM BROTOSUNARYO, SE.MSP

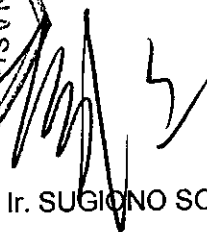
Pembimbing Utama



Ir. NANY YULIASTUTY, MSP



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. DR. Ir. SUGIONO SOETOMO, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Juni 2003



EVI GIWANG PRATIWI
L4DOO1199

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illaahi Rabbi, karena semata-mata atas kehendak-Nya jualah Pra Tesis ini dapat diselesaikan. Laporan pra tesis dengan judul "*Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi*" ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kegiatan penyusunan tesis ini, banyak sekali bantuan yang kami terima dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga terutama kepada Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP dan Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP., selaku mentor dan co-mentor yang telah banyak membantu hingga tesis ini selesai. Selain itu, juga kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Soegiyono Soetomo, MSP., selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP Semarang.
2. Bapak Ir. Sidarta Saelan, MM., selaku Pembahas serta sebagai Kepala Balai Latihan dan Keahlian Teknik Program Pendidikan Diploma dan Magister UNDIP Semarang.
3. Bapak Drs. Azis Min Alamsyah, Msi. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah memberi izin kepada penulis untuk menimba ilmu di UNDIP.
4. Seluruh staf pengajar, sekretariat, maupun perpustakaan, MPPWK/ MTPK UNDIP Semarang.
5. Seluruh keluargaku, atas segala kasih sayang, kesabaran, dan doanya selama penulis mengikuti perkuliahan di MPPWK UNDIP.
6. Rekan-rekan Program MPPWK Undip Angkatan 2001
7. Semua pihak yang telah memungkinkan dilaksanakannya penelitian hingga selesainya laporan pra tesis ini.

Sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan, kami menyadari banyak sekali kelemahan penulisan ini, namun demikian semoga dapat memberi banyak manfaat baik bagi peneliti, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang perencanaan wilayah dan kota. Semoga semua yang telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan pra tesis ini, senantiasa dalam lindungan dan ridlo Allah SWT. Amien.

Semarang, Juni 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	5
1.4.1 Tujuan Studi	5
1.4.2 Sasaran Studi	6
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Ruang Lingkup	8
1.5.1 Ruang Lingkup Materi Pembahasan.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	13
1.7.2 Kerangka Analisis.....	16
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	17
1.7.4 Teknik Sampling.....	21
1.7.4.1 Jumlah Sampel	21
1.7.4.2 Teknik Pemilihan Sampel	24
1.7.5 Teknik Analisis.....	24

1.7.6 Tahapan-tahapan Pelaksanaan Studi.....	28
1.8 Sistematika Pembahasan	32
Bab II : FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN.....	34
2.1 Pembangunan Wilayah.....	35
2.1.1 Konsep Pembangunan Dari Atas	35
2.1.2 Konsep Pembangunan Dari Bawah.....	36
2.2 Model-model Perencanaan	37
2.2.1 Perencanaan Komprehensif	37
2.2.2 Perencanaan Sosial	38
2.2.3 Perencanaan Birokrasi	38
2.3 Infrastruktur Permukiman.....	39
2.4 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	41
2.5 Undang-undang Nomor 24 tahun 1992	45
2.6 Permendagri Nomor 9 tahun 1998	47
2.7 Partisipasi Masyarakat	48
2.8 Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	54
BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	57
3.1 Kebijakan Pembangunan Kabupten Sukabumi.	57
3.2 Aspek Kebijakan pembangunan di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi	62
3.2.1 Skala Prioritas Pembangunan	66
3.2.2 Lembaga Pengelola Pembangunan	67
3.3 Karakteristik Umum Masyarakat.....	68
3.3.1 Kondisi Sosial Budaya.....	68
3.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi	69
3.4 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	70
3.4.1 Pola Penjaringan Aspirasi.....	72
3.4.2 Tujuan Yang Ingin Dicapai Berdasarkan Aspirasi Masyarakat	73

3.5	Aspek Pendanaan.....	74
3.6	Karakteristik Umum Lembaga Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	75
3.7	Kelemahan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	76
3.8	Kondisi dan Kemampuan Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	78
3.8.1	Kemampuan Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak	78
3.8.2	Jaringan Jalan	79
3.8.3	Jaringan Drainase.....	81
3.8.4	Jaringan Air Limbah dan Tempat Pembuangan Sampah ..	83
BAB IV	ANALISA FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI.....	87
4.1	Analisa Faktor Yang Harus Ada Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	88
4.2	Analisa Faktor Dalam Merumuskan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	91
4.3	Analisis Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	97
4.3.1	Analisis Tingkat Kemampuan Pemerintah.....	98
4.3.2	Analisis Tingkat Keinginan Masyarakat	108
4.3.3	Analisis Faktor-faktor Strategis Berdasarkan Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Keinginan Masyarakat.....	116

4.3.4 Analisis Hubungan Antar Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi	125
4.3.5 Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi	128
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Rekomendasi	132
5.3 Usulan Studi Lanjutan	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jenis dan Sumber Data yang digunakan Dalam Studi Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak.....	20
Tabel III.1 Struktur Tata Ruang dan fungsi Setiap Sub Wilayah di Wilayah Pembangunan Sukabumi	62
Tabel III.2 Fungsi Pusat SKP di SWP II Cibadak.....	63
Tabel III.3 Sektor Potensial di SWP II Cibadak Tahun 2002.....	67
Tabel III.4 Ketersediaan Masyarakat Dalam Membantu Pembangunan di SWP II Cibadak	73
Tabel III.5 Jumlah dan Alokasi Dana Pembangunan Jaringan Drainase dan Jaringan Jalan	74
Tabel III.6 Jumlah Personil dan Peralatan Dinas Teknis Tahun 2002.....	75
Tabel III.7 Kondidi Fisik Jaringan Jalan Menurut Status di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2002	81
Tabel III.8 Kondisi Eksisting jaringan Drainase di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2002.....	82
Tabel IV.1 Faktor-faktor Perencanaan yang Harus Ada Dalam Merumuskan Perencanaan Infrastruktur Permukiman Struktur Tata ruang dan Fungsi Setiap SWP di WP Sukabumi.....	91
Tabel IV.2 Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang Harus Dilakukan di SWP di WP Sukabumi.....	96
Tabel IV.3 Kemampuan Pemerintah untuk Merumuskan Rencana Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Sukabumi	99
Tabel IV.4 Pemahaman terhadap RTRW Kabupaten Sukabumi.....	100
Tabel IV.5 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Perumusan Tujuan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	100
Tabel IV.6 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Perumusan Perencanaan Infrastruktur Permukiman.....	101

Tabel IV.7 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	101
Tabel IV.8 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	102
Tabel IV.9 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Hasil Pembangunan Infrastruktur Permukiman	102
Tabel IV.10 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Menanggung Resiko Atas Kesalahan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	103
Tabel IV.11 Keinginan Pemerintah Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	104
Tabel IV.12 Kemampuan Pemerintah untuk Mempertimbangkan Karakteristik Sosial Budaya masyarakat	104
Tabel IV.13 Kemampuan pemerintah untuk Mempertimbangkan Tingkat Pendidikan masyarakat	105
Tabel IV.14 Kemampuan Pemerintah untuk Mempertimbangkan Penyediaan Sumber Daya Personil	106
Tabel IV.15 Kemampuan Pemerintah untuk Mempertimbangkan Penyediaan Peralatan	106
Tabel IV.16 Tingkat Kemampuan Pemerintah Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak.....	107
Tabel IV.17 Keinginan Masyarakat Dalam Merumuskan Rencana Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Sukabumi	108
Tabel IV.18 Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap RTRW Kabupaten Sukabumi	109
Tabel IV.19 Keinginan Masyarakat Melibatkan Diri Dalam Perumusan Tujuan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	110
Tabel IV.20 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Masyarakat Dalam Perencanaan Infrastruktur Permukiman.....	110
Tabel IV.21 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	111

Tabel IV.22 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	111
Tabel IV.23 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Pemeliharaan Hasil Pembangunan Infrastruktur Permukiman	111
Tabel IV.24 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Menanggung Resiko Atas Kesalahan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	112
Tabel IV.25 Keinginan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	112
Tabel IV.26 Keinginan Masyarakat Untuk Mempertimbangkan Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat	113
Tabel IV.27 Keinginan Masyarakat Untuk Mempertimbangkan Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	113
Tabel IV.28 Keinginan Masyarakat Untuk Mempertimbangkan Kemampuan Mempertimbangkan Sumber Daya Personil.....	114
Tabel IV.29 Keinginan Masyarakat Untuk Mempertimbangkan Kemampuan Penyediaan Peralatan	114
Tabel IV.30 Tingkat Keinginan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	115
Tabel IV.31 Nilai Faktor Faktor Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi	116
Tabel IV.32 Nilai Faktor Faktor Strategis Yang Mampu Dilakukan Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi	118
Tabel IV.33 Faktor Faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi..	121
Tabel IV.34 Hubungan Antara Faktor-faktor Strategis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kajian SWP II Cibadak	10
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.....	13
Gambar 1.3 Alur Pikir Proses Analisa Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	18
Gambar 1.4 Pemetaan responden Berdasarkan Pengaruh Kepentingan Terhadap Isu yang Dominan.....	23
Gambar 2.1 Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kabupaten Sukabumi	47
Gambar 3.1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukabumi	59
Gambar 3.2 Peta Pembagian SWP Kabupaten Sukabumi.....	61
Gambar 3.3 Peta Pembagian SKP di SWP II Cibadak	64
Gambar 3.4 Peta Jaringan Jalan.....	80
Gambar 3.5 Peta Jaringan Drainase.....	83
Gambar 3.6 Peta Tempat Pembuangan Sampah	86
Gambar 4.1 Pemetaan Faktor Perencanaan Hasil Studi Dengan Faktor Perencanaan Yang Ada Di Kabupaten Sukabumi	90
Gambar 4.2 Penjabaran Faktor Faktor Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	94

ABSTRACT

Every region will experience of change either through planning and also is natural. This matter is caused by the existence of factors influencing growth a region having the character of internal or eksternal. That factors having an effect on big in change of region is a planning of region / town. Failure of development of region / town often related to lower him involvement of consumer of stakeholder in course of planning of town/region. Effect of existence of development model like above, problem which very harm not even to government, but also to society as consumer. Applying of model / paradigm, causing that development " only conducted" by government, including its conservancy process.

Utilize more optimal new paradigm of planning, hence made by research with a purpose to look for and find strategic factor in development planning of settlement infrastructure in SWP II Cibadak, Kabupaten of Sukabumi, so that created a development matching with ability of government and desire of society. Pursuant to target, hence this research use descriptive analysis qualitative with technique analyse crosstabs which conducted to 22 responder (10 people of governmental side and 12 people side of society).

From result of analysis got by strategic factors in the development plan of settlement infratructure in SWP II Cibadak Kabupaten of Sukabumi. the strategic factor are : 1) Execution of plan as according to program indication which is in RTRW, 2) Society deputized by entrepreneur, figure, and delegation of group follow to formulate the target of development, 3) Society share and also moment / phase gathering of data / study and information / analysis, 4) society of rendering its farm for the enlargement of drainage network and road, 5) Society follow to render mystical power execution of development, 6) Society follow to evaluate if there is mistake of wrong effect of planning, 7) Entire work of conservancy delivered to society down alley society itself, 8) Society technically follow to observe the way development, 9) In the plan have to consider social characteristic culture, 10) In the plan have to consider education level, 11) Government can provide personnel resource ably plan work which in character for the intern of Kabupaten of sukabumi; while which in character West Java cooperation regional there must be with other party having past master more can.

By using analysis " persons of Correlation" from eleven strategic factor, which have positive relation (+) that is unidirectional parallel there is 7 (seven), and having negative relation (-) that is contrary parallel direction there is 2 (two). While having unidirectional parallel strong relation among all the strategic factor is between condition of cultural social of society with education storey level.

Instruction the recommended is that needing socialization settlement of room to be entire stakeholder comprehend content of existing RTRW, need the existence of effort to increase knowledge / education of society to be watering down society entangling in development, and need the existence of effort to change society culture assuming that development of settlement infrastructure represent obligation of government.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah akan mengalami perubahan baik melalui perencanaan maupun alamiah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yang bersifat internal ataupun eksternal. Faktor yang berpengaruh besar dalam perubahan wilayah diantaranya disebabkan oleh suatu perencanaan wilayah/kotanya.

Kegagalan pembangunan wilayah/kota sering dikaitkan dengan rendahnya keterlibatan pengguna ruang/*stakeholder* dalam proses perencanaan wilayah/kota. Padahal dalam proses perencanaan wilayah/kota tidak dapat ditentukan perencana sendiri tetapi harus melibatkan *stakeholder*. Karena sesuai sifatnya, proses perencanaan wilayah/kota merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan tidak dapat hanya ditentukan oleh orang perorang.

Sebagaimana dikemukakan Sujarto, Dj (1986 : 24), selama ini penataan ruang wilayah di Indonesia lebih banyak memakai pendekatan dari atas dan menganggap bahwa masyarakat mempunyai karakteristik yang homogen; artinya mulai dari perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang ditentukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan yang harus mau menerima apa yang telah digariskan dalam kebijakan tanpa dapat menolak.

Tidak heran dalam suatu pengembangan wilayah/kota atau pembangunan infrastruktur banyak terjadi kegagalan yang disebabkan ketidaktepatan sasaran. Kesalahan ini disebabkan adanya penentuan jenis, lokasi dan keberadaan infrastruktur tidak seperti yang

diharapkan/dikehendaki masyarakat. Masyarakat hanya sebagai penonton atas pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

Akibat adanya model pembangunan seperti tersebut di atas adalah munculnya persoalan-persoalan yang sangat merugikan tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna. Akibat penerapan model/paradigma tersebut, berakibat bahwa pembangunan 'hanya dilakukan' pemerintah, termasuk pada proses pemeliharannya. Jika dilihat dari penyebab kerusakan, kebanyakan disebabkan hal kecil yang seharusnya bisa ditangani masyarakat sendiri. Namun karena dari awalnya masyarakat tidak dilibatkan, mereka menganggap hal tersebut bukan merupakan tugasnya.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah mulai menyadari. Selanjutnya dilakukan perubahan paradigma perencanaan seperti tertuang dalam UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, PP No. 69/1996 Hak dan Kewajiban serta Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang, Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang di Daerah, dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. Dengan pelibatan masyarakat yang lebih besar mulai dari pencetusan gagasan, penentuan tujuan, pemilihan alternatif dan resiko-resikonya, serta kegiatan pengendaliannya, diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan wilayah/kota, terutama dalam pembangunan infrastruktur permukimannya.

Guna lebih mengoptimalkan paradigma baru perencanaan wilayah/kota, dalam proses perencanaan yang melibatkan masyarakat diantaranya perlu dikenali faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukimannya. Untuk itu, dalam kesempatan

ini dilakukan studi penemukenalan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, sekaligus upaya peningkatan kemampuan pemerintah di dalam pengadaannya.

Pemerintah sebagai pengelola pembangunan infrastruktur permukiman sering menempatkan masyarakat lebih sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan. Tindakan yang sering dilakukan adalah sosialisasi program-program pembangunan tanpa melihat situasi, karakteristik, dan persepsi masyarakat setempat. Akibatnya seringkali apa yang dibangun pemerintah tidak sesuai dengan prioritas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Ketidakselarasan prioritas pembangunan infrastruktur permukiman lebih disebabkan oleh tidak dipenuhinya seluruh faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Dilain pihak, faktor strategis perencanaan ini merupakan prasyarat mutlak dalam membuat rencana pembangunan infrastruktur. Dengan tidak dipenuhinya faktor strategis perencanaan, maka berakibat rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat di dalam pengadaannya, baik mulai dari pencetusan gagasan, proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun pemanfaatan dan pengembangannya.

Keadaan ini berakibat pula terhadap adanya sifat ketergantungan atau adanya kesan pada masyarakat bahwa pembangunan/pengadaan infrastruktur merupakan kewajiban mutlak pemerintah. Keadaan seperti ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, yang membagi wilayahnya kedalam 6 (enam) Sub Wilayah Pengembangan (SWP).

Dari 6 SWP tersebut, ada satu SWP yang mempunyai potensi tinggi (nilai LQ > 1) namun tingkat aksesibilitasnya rendah, SWP tersebut adalah SWP II Cibadak (Review RTRW, 2002 : 50). Dengan kondisi seperti tersebut di atas, berakibat infrastruktur permukiman yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kuantitatif

maupun kualitatif, sedangkan pembangunan infrastruktur yang diharapkan sangat sulit dilaksanakan mengingat terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Padahal di lain pihak, keinginan dan minat masyarakat untuk terlibat dalam pengadaan infrastruktur ini relatif tinggi (Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Bappeda Kabupaten Sukabumi, 2002 : 23).

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan pada latar belakang permasalahan seperti diuraikan pada sub bab 1.1, dapat dirumuskan bahwa penerapan paradigma perencanaan yang dilakukan selama ini, berakibat pada munculnya permasalahan pembangunan infrastruktur permukiman pada SWP II Cibadak. Hal ini terlihat dari gambaran keadaan sebagai berikut :

1. Adanya anggapan pada masyarakat bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
2. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah cenderung tidak sesuai dengan prioritas yang ada/dibutuhkan masyarakat.
3. Belum terakomodasikannya keinginan/minat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur.
4. Terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi tuntutan masyarakat.

Akibat kondisi tersebut, tingkat pelayanan infrastruktur permukiman menjadi sangat rendah. Untuk itu, dalam pembangunan infrastruktur permukiman harus ada kesesuaian/keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah. Diantaranya dapat dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan infrastruktur permukiman, terutama dalam proses perencanaannya.

Konsekuensi logis penerapan paradigma perencanaan ini adalah harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis sebagai syarat perumusan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang selama ini belum dilakukan. Untuk itu, dilakukan studi tentang upaya peningkatan kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur permukiman melalui penemukaan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Untuk mengetahui faktor strategis tersebut, dibuat pertanyaan penelitian yaitu :

1. *Bagaimanakah kemampuan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak ?*
2. *Faktor-faktor strategis apa yang harus ada dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi ?*

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah ‘mencari’ dan menemukan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, sehingga tercipta suatu pembangunan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penyediaan infrastruktur permukiman, studi ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

1.3.2 Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan studi yang disebutkan pada butir 1.3.1, sasaran studi yang dilakukan adalah :

menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat, baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah daerah.

2. *Faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman* adalah faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang mampu disediakan oleh pemerintah setempat dan sesuai keinginan/kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor strategis ini diketahui dengan cara menganalisa faktor-faktor perencanaan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat.
3. *SWP II Cibadak* adalah salah satu dari 6 (enam) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) pada Wilayah Pembangunan (WP) Sukabumi yang meliputi Kecamatan : Cibadak, Cicurug, Cikembar, Parungkuda, Cimanggu, Nagrak, Kalapa Nunggal, Parakan Salak, Cidahu, Kabandungan, Cantayan, dan Caringin.
4. *Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak* adalah kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.
5. *Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyediakan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak* adalah merubah keadaan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menjadi bertambah tinggi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

1.5 Ruang Lingkup

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam membantu pengembangan suatu wilayah. Wilayah dengan infrastruktur lengkap akan lebih diminati oleh semua lapisan masyarakat; sedangkan pembangunan infrastruktur selain dapat ditentukan oleh tingkat

1. Mengidentifikasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.
2. Identifikasi faktor-faktor perencanaan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.
3. Identifikasi faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang belum mampu disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Mengetahui kemampuan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
5. Mencari korelasi/hubungan antara faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang mampu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.
6. Merekomendasikan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Pada akhir studi ini, manfaat penelitian diarahkan untuk dapat menjadi masukan/pedoman dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman secara merata dan baik, sehingga tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak- Kabupaten Sukabumi dapat tercapai.

1.4 Definisi Operasional

Ada beberapa abstraksi yang dianggap perlu untuk diberikan definisi operasionalnya sebagai batasan studi, agar terdapat kesamaan pengertian tentang studi yang dilakukan, yaitu :

1. *Faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman* adalah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang

kemampuan sosial ekonomi juga kemauan penduduknya. Dalam mengalokasikan suatu program pembangunan sudah barang tentu harus memperhatikan karakteristik masyarakatnya, indikator sosial ekonomi masyarakat menjadi indikator yang tidak boleh diabaikan dalam menentukan program perencanaan pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah/ daerah (Wirth, 1985 : 231) .

Mengacu pada uraian tersebut, maka studi ini akan berusaha menggali lebih dalam sampai seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga ruang lingkup bahasannya dapat diuraikan sebagai berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi Pembahasan

Dalam ruang lingkup materi pembahasan ini akan dibatasi bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur permukiman di sini adalah prasarana penunjang permukiman, yaitu jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan tempat pembuangan sampah.

Pada setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan infrastruktur permukiman ini. Mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan dana cukup besar dan ini merupakan dilema bagi pemerintah daerah, apalagi pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang tidak menguntungkan atau '*profitable*', (Friedman, 1987 : 150). Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunannya harus benar-benar merupakan hasil perencanaan 'matang' sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya dapat berfungsi optimal.

Sesuai perubahan paradigma, maka perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman juga harus mengikuti. Dimana dalam paradigma tersebut salah satunya menyebutkan harus melibatkan stakeholder dalam proses pembangunan. Walaupun pembangunan infrastruktur harus sesuai keinginan masyarakat, namun wewenang

menentukan kebijakan dalam pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan) infrastruktur permukiman ada pada pemerintah (Ramelan, 1997 : 7). Oleh sebab itu keberadaan pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur permukiman dijadikan potensi dalam menentukan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Dengan melakukan analisa terhadap faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, akan didapat faktor-faktor yang sesuai dengan tingkat kemampuan pemerintah dan tingkat keinginan masyarakat. Selanjutnya faktor-faktor inilah yang disebut sebagai faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan permukiman.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang akan menjadi lokasi studi adalah Sub Wilayah Pengembangan (SWP) II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Wilayah studi ini meliputi 12 kecamatan, yaitu kecamatan Cibadak sebagai Pusat SWP, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kecamatan Parakan Salak, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Cantayan, dan Kecamatan Caringin. Untuk jelasnya lihat pada **gambar 1.1**. Sedangkan alasan dipilihnya SWP II Cibadak sebagai lokasi studi adalah :

1. SWP II Cibadak merupakan salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Cidahu dan kawasan wisata Palabuhanratu. Dari hasil penelitian didapat bahwa salah satu keengganan wisatawan untuk datang ke Palabuhanratu adalah masalah buruknya kondisi jaringan jalan. Dari kurun waktu 10 tahun (umur jalan sesuai perencanaan), yang dapat dilalui dengan aman dan nyaman sekitar 3 – 4 tahun.

2. Banyaknya kegiatan untuk mendukung kebutuhan Jakarta dan Botabek yang dapat mendatangkan PAD dan pendapatan bagi masyarakat ditempatkan di SWP II Cibadak, mulai dari air minum dalam kemasan, sayuran, beras, daging, serta industri dan bengkel pesawat ringan di tempatkan di wilayah studi (Laporan Bulanan Pendapatan PAD, Dipenda, 2002 : 22). Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan yang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan tanpa ada yang merasa dirugikan.
3. Alasan lain adalah bahwa SWP II Cibadak mempunyai potensi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari nilai $LQ > 1$ yang artinya mampu ekspor (Laporan Fakta-Analisa, RTRW, 2002 : 75). Namun karena tingkat aksesibilitasnya rendah, maka potensi tersebut hanya dikonsumsi sendiri dan sebagian kecil yang mampu dijual yaitu daerah-daerah dimana mempunyai akses ke jalan regional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir studi ini dimaksudkan untuk memperjelas alur pikir dan kinerja pembuatan dokumen tesis, sehingga diharapkan dapat mempermudah langkah-langkah penelitian yang nantinya akan dilaksanakan.

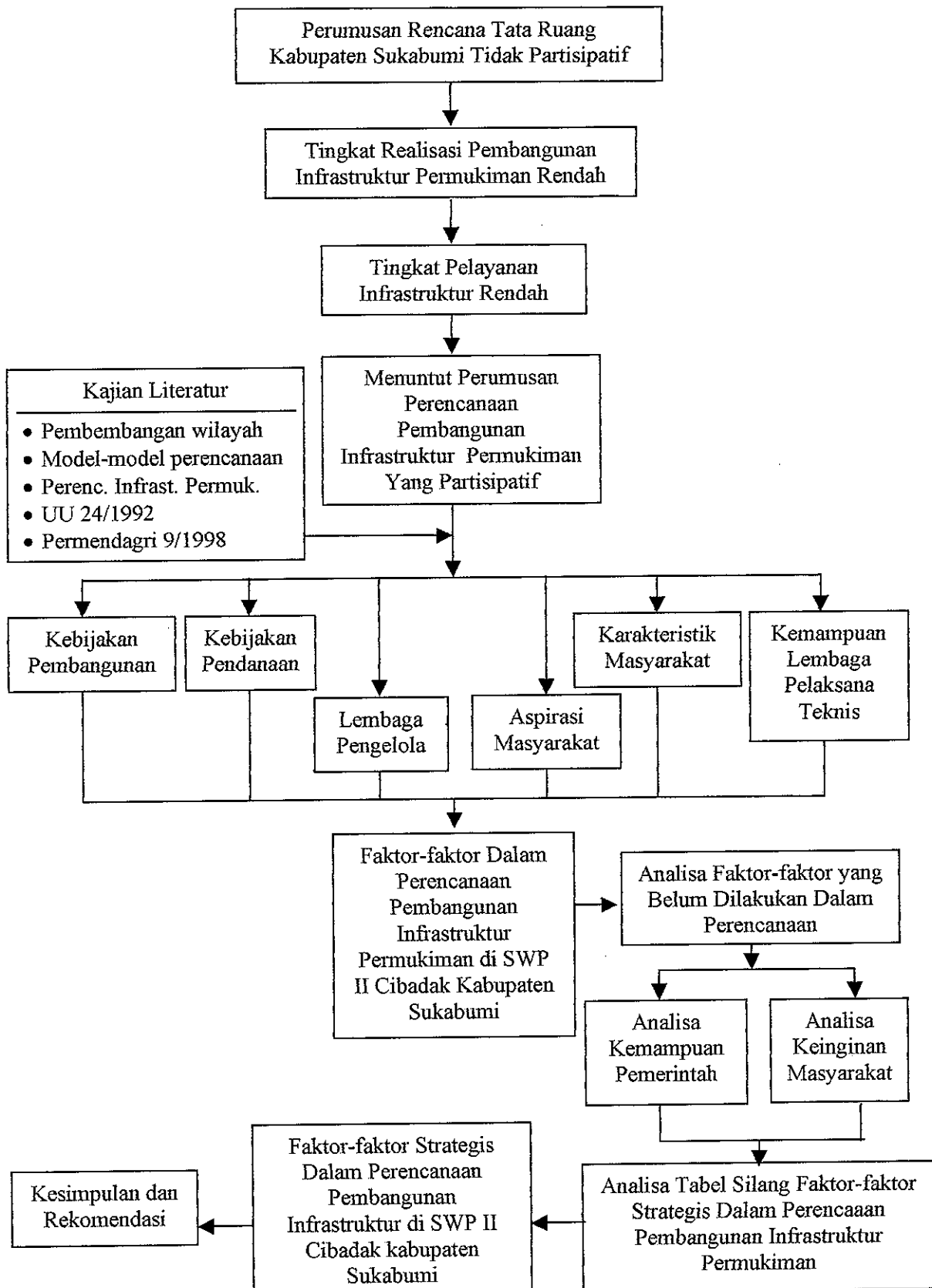
Sebelum mengadakan penelitian untuk menemukenali faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai upaya untuk tercipta suatu pembangunan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat, maka dicari dahulu yang menjadi inti dari permasalahan. Inti permasalahan yang dimaksud adalah tingkat pelayanan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak rendah. Dari permasalahan tersebut dibuat suatu pertanyaan yang kira-kira dapat dijawab dengan jalan melakukan studi.

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui dahulu teori-teori yang pendukung yang nantinya dapat digunakan untuk menemukenali faktor-faktor strategis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

Untuk menemukenali faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infratraktur permukiman di SWP II Cibadak, dilakukan analisa menggunakan metode *Check List* atau metoda tabel silang. Meskipun menggunakan Metode Tabel Silang, kegiatan lebih diarahkan pada kajian yang bersifat kualitatif. Penggunaan metode kualitatif disebabkan sifat penelitian yang mengarah pada penggalian fenomena pendapat/persepsi/preferensi responden tentang faktor-faktor strategis.

Metode ini dianggap tepat, karena selain pengertian metode kualitatif sebagai penelitian fenomenologis dan interpretatif, juga sebagaimana dikemukakan Bogdan and Taylor (Moleong, 2000 : 5) bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari hasil analisa tersebut didapat dua kelompok faktor, yaitu faktor-faktor yang sudah dipakai dalam merumuskan perencanaan, dan yang belum. Faktor-faktor yang belum dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur inilah yang mendapat 'perhatian' dan dicari penyebab serta kendala yang menghalanginya. Sehingga diketahui faktor-faktor yang mampu disediakan oleh pemerintah dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Faktor inilah yang selanjutnya disebut dengan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sehingga kerangka pikir studi yang terjadi diperlihatkan seperti pada **gambar 1. 2**.



Gambar 1.2

KERANGKA PEMIKIRAN FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PRENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

1.7 Metoda Penelitian

Dalam sub bab ini berisi metoda penelitian sehubungan dengan studi yang dilakukan. Metoda penelitian yang akan diuraikan meliputi pendekatan penelitian, kerangka analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik sampling, teknik analisis, dan tahapan-tahapan pelaksanaan studi.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan studi, maka pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada studi kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data statistik sehingga diperlukan pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjangkau informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang dilakukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Taylor, 1973 (Moleong, 2002 : 3), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati.

Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (masyarakat, suatu proses dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1993 : 55). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti

mendekati data primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. Sedangkan Miles (1992:1) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral.

Penemuan-penemuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai mutu yang tidak dapat disangkal. Kata-kata, khususnya bilamana disusun ke dalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, seringkali jauh lebih meyakinkan pembacanya daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka (Miles, 1992 : 2). Pendekatan penelitian ini juga sesuai dengan tujuan penelitian dalam pendekatan survey, yaitu penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Van Dalen (Arikunto, 2002 : 93) mengatakan bahwa pendekatan survey merupakan bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Menurut Whitney (Nazir, 1988:63), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan penelitian deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif.

1.7.2 Kerangka Analisis

Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka kerangka analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis kesesuaian faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang ada dalam teori dengan kebijaksanaan pemerintah setempat, sehingga diketahui faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang mutlak harus ada dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah studi.
2. Analisis kesesuaian dalam perumusan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman antara yang dilakukan oleh lembaga dan dinas teknis dengan teori perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang sudah dan belum dilakukan dalam suatu merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah studi.
3. Analisis tingkat kemampuan pemerintah dan kemauan/keinginan masyarakat. Dari faktor-faktor yang belum dapat dilakukan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, dicari faktor-faktor yang mampu dilakukan. Tingkat kemampuan pemerintah yang dimaksud adalah kemampuan dalam aspek pembiayaan, ketersediaan personil, dan kemampuan peralatan penunjang pembangunan. Sedangkan keinginan masyarakat lebih pada keinginan agar pembangunan tersebut dapat tepat guna serta masyarakat ikut dilibatkan. Dari hasilnya ini didapat faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang mampu dilaksanakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah studi.

4. Mencari tahu korelasi/hubungan timbal balik diantara faktor-faktor strategis yang mampu dilakukan pemerintah dan sesuai keinginan masyarakat. Agar faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman mudah dilaksanakan.

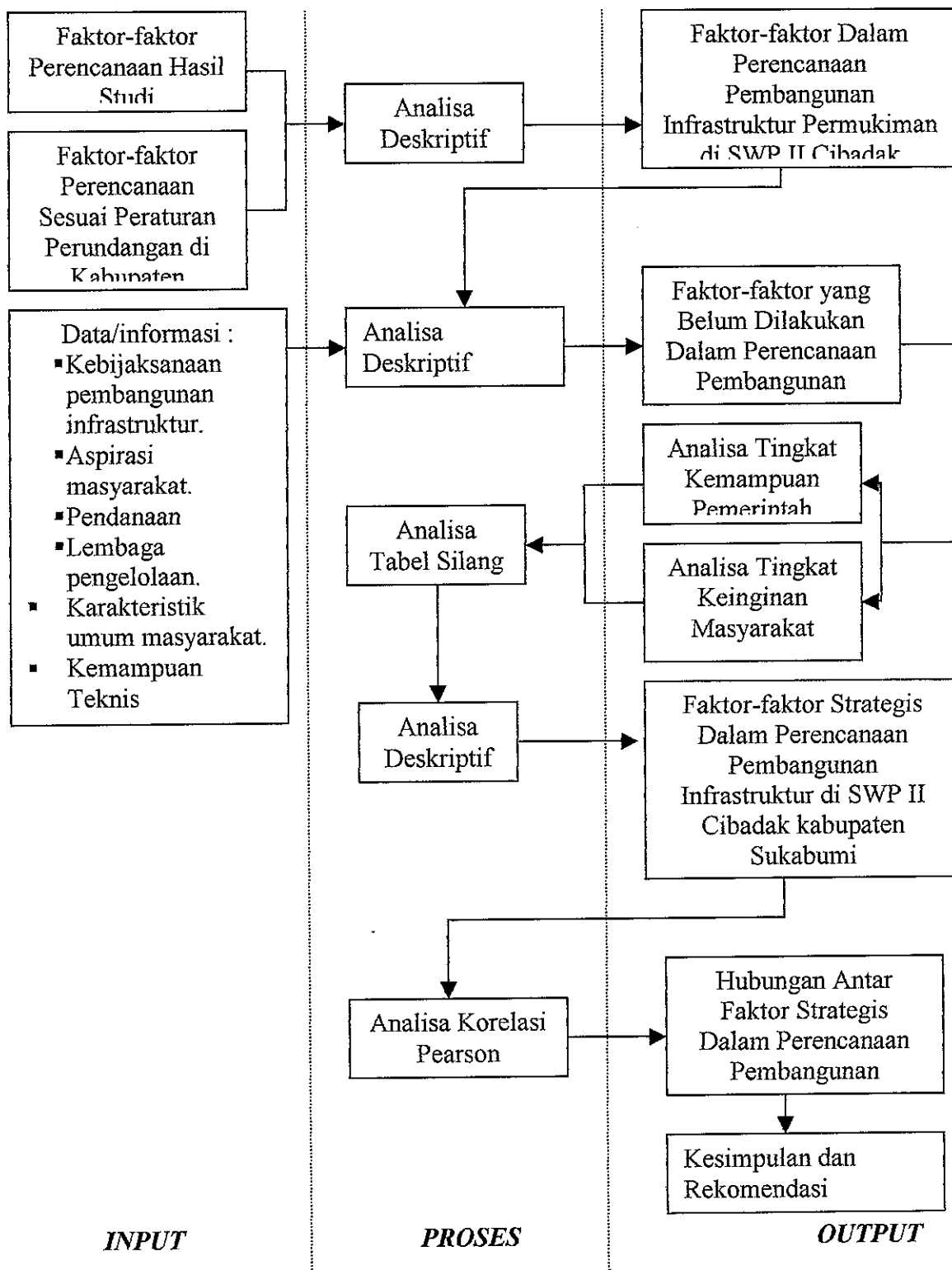
Untuk jelasnya dapat dilihat pada **gambar 1.3**

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk kebutuhn penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu pengumpulan data instansional berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dimana :

- a. Pengumpulan data instansional yaitu dengan cara survey instansional kepada Bappeda, BPS, Dinas PU Bina Marga, DLLAJ, Kantor Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bagian Penyusunan Program, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan instansi lain yang terkait. Data yang akan diambil dari instansi tersebut adalah untuk mencari arah kebijaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman di lokasi Studi, termasuk alokasi dana; jumlah penduduk, kondisi fisik infrastruktur yang ada sekarang, dan data lainnya.
- b. Pengumpulan data primer, yaitu untuk mencari tahu dengan cara pengamatan langsung keberadaan infrastruktur yang ada sekarang terhadap kegiatan penduduk maupun pengembangan wilayahnya, jenis infrastruktur yang sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur, dan kemampuan/keinginan masyarakat untuk membantu membangun infrastruktur di daerahnya.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dilihat ada tabel I.1



Gambar 1.3
ALUR PIKIR PROSES ANALISA FAKTOR FAKTOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Selanjutnya data/ informasi informasi hasil wawancara, observasi, dan penyebaran kuestioner ini diolah dan dibuat pengelompokan. Pengelompokan data dan informasi hasil wawancara yang didapat berupa persepsi dan/atau preferensi responden tentang kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Teknik pengumpulan data dari suatu studi atau penelitian, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu survey primer dan survey sekunder. Survey primer merupakan survey yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan, sedangkan survey sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung ke objek studi tetapi melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek studi (Singarimbun, 1989).

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara survey sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta survey primer untuk data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan.

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Teknik yang digunakan dalam survey primer dengan jumlah 22 responden adalah dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998:140). Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi jenis kuesioner, jika dilihat dari cara menjawabnya, maka kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup sekaligus juga kuesioner terbuka karena selain telah disediakan jawabannya, responden juga diberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang ada.

Tabel I.1
JENIS DAN SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN DALAM STUDI
FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN UKABUMI

No.	Jenis Data	Sumber	Keterangan
1.	Dokumen perencanaan pembangunan - Pola Dasar Pembangunan - Propeda - Repetada - Renstrada Kabupaten - Rensrada Dinas	Bappeda, Dinas PU Bina Marga, Dinas Pengelolaan SDA.	
2.	Data usulan program/proyek pembangunan	Bappeda	5 tahun dari 1998 - 2002
3.	RTRW dan Review RTRW	Bappeda	
4.	Peraturan – Peraturan Daerah	Bagian Hukum	
4.	Tingkat kemampuan dinas teknis	Dinas PU Pengelolaan SDA dan PU Bina Marga	
5.	Mekanisme perencanaan pembangunan yang digunakan	Bappeda, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pengelolaan SDA	
6.	Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program	Bappeda dan Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pengelolaan SDA	Wawancara berstruktur
7.	Faktor-faktor yang sudah dilakukan dalam merencanakan	Bappeda, Dinas PU Bina Marga, DLLAJ, Kantor Tata Ruang, Dinas Pengelolaan SDA, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	Wawancara berstruktur
8	Penemukukenalan Kemampuan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat	Bappeda, Dinas PU Bina Marga, DLLAJ, Kantor Tata Ruang, Dinas Pengelolaan SDA, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan masyarakat	Wawancara berstruktur
9	Cara/upaya/strategi dalam membuat faktor-faktor agar dipakai untuk merumuskan perencanaan infrastruktur	Bappeda, Dinas PU Bina Marga, DLLAJ, Kantor Tata Ruang, Dinas Pengelolaan SDA, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup.	Wawancara berstruktur

Sumber: Hasil Olahan, 2002

Kuesioner ini disebarakan kepada responden yaitu dari Dinas/Badan/Lembaga dan masyarakat yang berada di SWP II Cibadak populasi dari studi ini. Agar tujuan studi dapat tercapai, maka dalam pengisian kuesioner ini, responden adalah orang yang mengetahui secara tepat permasalahan yang terkait dengan tema kajian. Responden merupakan pimpinan tertinggi dari suatu instansi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan atau responden yang ditunjuk oleh pimpinan instansi karena memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi ini. Kriteria minimal dari responden adalah responden pernah satu kali terlibat dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan.

1.7.4 Teknik Sampling

Kuntoro (1989:22) mengatakan bahwa sampling adalah aktifitas pengumpulan sample. Sampel adalah contoh atau wakil yang dipilih dari suatu populasi yang cukup besar dan bersifat representatif. Tidak semua masyarakat dalam wilayah penelitian menjadi objek penelitian. Karena populasi yang terlalu banyak, maka digunakan teknik sampling dalam penelitian ini. Dalam teknik sampling ini, akan dibahas cara mencari jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian dan teknik pemilihan sample.

1.7.4.1 Jumlah Sampel

Sampel untuk keperluan studi ini sebanyak 22 responden diambil dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Jumlah responden dari pihak pemerintah (dinas/badan/lembaga) 10 orang, cara menentukan responden dari pemerintah adalah diambil dari dinas/badan/lembaga, yaitu :

- a. Lembaga/dinas/badan yang ikut menentukan perencanaan pembangunan infrastrukturnya di wilayah studi, yaitu Bappeda, Dinas PU Bina Marga, Kantor Tata Ruang, Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air, Bagian Penyusunan Program, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup.

- b. Mereka dari lembaga/dinas/badan tersebut yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam struktur keorganisasian, atau yang menguasai masalah perencanaan, sehingga pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan.

Cara menentukan responden dari masyarakat adalah mereka yang tahu tentang perencanaan infrastruktur dan pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga didapat populasi sebanyak 200 orang atau 0,03 % dari jumlah penduduk SWP II Cibadak. Responden tersebut terdiri dari :

- Tokoh masyarakat : 120 orang
- Pengusaha : 60 orang
- Lainnya : 20 orang

Dengan menggunakan rumus untuk menentukan jumlah sampel menurut Kartono dalam buku (Kuntoro, 1992 : 55) yaitu :

$$n = \frac{N.z.P(1-P)}{Nd + zP(1-P)}$$

Dimana :

- n : Jumlah sampel yang akan diambil
- N : Nilai populasi (200 orang)
- z : Nilai rehabilitasi yaitu 1,7 (dengan dk = 87 %)
- P : Objek yang akan diteliti 0,03 % (karena nilai populasi 200)
- d : Nilai error (dianggap tingkat kesalahan 13 %)

Berarti :

$$n = \frac{200 \times 1,7 (1 - 0,03)}{(200 \times 0,13) + (1,7 \times 0,03) \times (1 - 0,03)}$$

$$= 12 \text{ orang}$$

Untuk menentukan responden dari masyarakat adalah dengan cara memilih mereka yang tahu tentang perencanaan infrastruktur dan pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan, selain itu berdasarkan :

- Yang terkena dampak
- Yang sangat terkena dampak
- Yang memiliki informasi, pengetahuan dan keahlian atas isu
- Yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu

Dari hasil analisa tersebut, maka didapat responden dalam berbagai kategori sesuai dengan tingkat kepentingan, kapasitas, dan relevansi atas isu. Seperti terlihat pada **gambar 1.4**, yaitu pemetaan responden berdasarkan pengaruh dan kepentingan terhadap suatu isu yang dominan di suatu wilayah, dalam hal ini SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.

	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan rendah	Kelompok responden yang paling rendah prioritasnya	Kelompok yang bermanfaat untuk merumusan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan tinggi	Kelompok responden yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan	Kelompok responden yang paling kritis

Sumber: Adaptasi dari buku *'Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001*

Gambar 1.4
PEMETAAN RESPONDEN BERDASARKAN PENGARUH DAN KEPENTINGAN TERHADAP ISU YANG DOMINAN

Dengan pemetaan responden seperti di atas, maka didapat responden yang menjadi sampel penelitian. Jadi jumlah sampel keseluruhan untuk penelitian di SWP II Cibadak adalah berjumlah 22 orang, yaitu 10 orang dari pihak pemerintah dan 12 orang dari pihak masyarakat. Hal ini dianggap bahwa ke 22 orang mampu mewakili penduduk yang berada di SWP II Cibadak serta pihak pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan infrastruktur.

1.7.4.2 Teknik Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan dalam studi ini adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling bertujuan atau *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan respondennya telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 1994 : 62). Cara ini dilakukan dengan maksud mengambil subjek penelitian karena ada tujuan tertentu. Dalam hal ini mengingat responden yang akan diambil sebagai sampel adalah yang mengetahui/paham akan perencanaan infrastruktur permukiman.

1.7.5 Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995: 263). Analisis yang akan dipergunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif terhadap data kualitatif dan didukung oleh analisis kuantitatif.

Data yang telah diperoleh berdasarkan survey primer melalui kuesioner, diolah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Pengertian deskriptif tidak hanya sekedar menemukan data atau fakta dan kemudian menyajikannya dalam bentuk mentah, kemudian penafsirannya diserahkan kepada pembaca yang berminat, melainkan juga melakukan analisis

serta menyajikan data dan fakta yang sudah terolah beserta penafsirannya. Lebih lanjut, teknik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara:

- Mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul,
- Menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada,
- Menggambarkan proses yang sedang berlangsung,
- Menggambarkan kecenderungan atau pendapat yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil tersebut akan dapat dilakukan penafsiran terhadap data dan akan diperoleh kesimpulan dari fenomena yang sedang berlangsung. Deskripsi ini dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengelompokan jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden.

Apabila data telah terkumpul, maka dilakukan klasifikasi data menjadi 2 kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dihasilkan kemudian diolah melalui proses editing, coding dan tabulating (Marzuki, 1987:81). Proses editing adalah pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan. Coding merupakan kegiatan pemberian tanda, simbol, kode bagi tiap-tiap data sesuai dengan pengelompokannya dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tabulating merupakan proses selanjutnya setelah coding, yaitu pengelompokkan data dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa, gejala, item dan lain-lain yang termasuk dalam satu kategori.

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang merupakan jawaban terbuka, dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (Miles, 1992:16-20):

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat.

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Tetapi sekarang, penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian dapat dilihat fenomena apa yang sedang terjadi.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan pencarian arti informasi, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan yang mula-mula belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin

tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Dengan perkataan lain, ketiga jenis kegiatan tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik.

Dalam analisis kuantitatif akan digunakan analisis tabel silang terhadap data (pilihan jawaban) yang diperoleh dari kuesioner. Tabulasi silang atau *crosstabs* merupakan teknik analisis yang menggunakan data kategori atau data berkelas yang selanjutnya diolah untuk mengetahui adanya karakteristik korelasi atau hubungan satu variabel dengan variabel lain (Dillon, 1984:302). Lebih lanjut Singarimbun (1995:273) menyebutkan bahwa analisis tabulasi silang adalah teknik analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Analisis lain yang digunakan untuk mengetahui keberadaan hubungan antara faktor-faktor strategis yang adalah dengan menggunakan *Korelasi Pearson*. Korelasi jenis ini sering disebut juga dengan korelasi Produk Momen, korelasi pearson didasarkan karena penemunya adalah Karl Pearson (Wahana Komputer , 2001 : 95). Untuk mencari hubungan antar faktor tersebut, digunakan rumus korelasi product-moment atau disebut korelasi pearson (Ariakunto, 1997,255) yaitu :

$$r = \frac{1/n \cdot \sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{S_x \cdot S_y}$$

Dimana : r : Koefisien Korelasi
 x : Nilai variable kemampuan pemerintah
 $\sum x$: $\sum x/n$
 y : Nilai variable keinginan masyarakat
 $\sum y$: $\sum y/n$
 n : Jumlah responden

$$S_x : \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S_y : \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}}$$

Namun untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan, maka pengolahan data kuantitatif ini menggunakan komputer dengan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

1.7.6 Tahapan-tahapan Pelaksanaan Studi

Secara ringkas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mencakup beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap pertama penentuan sampel/responden

Dalam pencarian pendapat responden faktor-faktor strategis yang sudah dilakukan dan belum, dilakukan melalui pendekatan sampel. Sampel yang diteliti disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu pihak-pihak yang dipandang terkait secara langsung sesuai penelitian yang dilakukan. Hal ini dikenal dengan sebutan '*purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 1994:62). Jadi sampelnya terbatas pada responden tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu sesuai tujuan

penelitian. Penetapan sampel dilakukan atas dasar pemahaman responden tentang materi yang diteliti dan informasi dari pihak-pihak terkait.

Para responden tersebut adalah dari unsur :

- a. *Pemerintah*, meliputi Bappeda, Dinas PU Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bagian Penyusunan Program, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, serta Kantor Tata Ruang.
- b. *Masyarakat*, meliputi tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan survey lapangan dalam rangka penjarangan/pencarian pendapat responden tentang faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk konfirmasi terhadap unsur pelaksana, dilakukan antara 8 sampai 28 Maret 2003.

3. Alat Penelitian

Untuk mencapai tujuan studi, dalam pengumpulan data/informasi dilakukan dengan menggunakan alat-alat penelitian berupa : *check list* dan kuesioner. Sedangkan dalam mencari faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan literatur dilakukan dengan teknik penelusuran buku teks/jurnal/hasil penelitian, sehingga didapat :

- a. Kebijakan pembangunan infrastruktur
- b. Aspirasi masyarakat
- c. Pendanaan
- d. Lembaga pengelolaan
- e. Karakteristik umum masyarakat
- f. Kemampuan Teknis

4. Kegiatan pengumpulan data dan informasi :

a. Untuk mendapatkan data primer, langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengumpulan data/ informasi yang dilakukan meliputi :

- Penyusunan kuesioner sebagai pedoman wawancara yang didasarkan pada hasil kajian literatur tentang faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan pendapat para pakar, serta faktor yang berlaku/diterapkan saat ini .
- Wawancara terhadap responden, baik unsur pemerintah maupun masyarakat yang telah ditetapkan terlebih dahulu/ *purposive sampling*.
- Kompilasi data dan informasi hasil wawancara, pengelompokan data dan informasi hasil wawancara yang didapat berupa persepsi/preferensi responden tentang cara perumusan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang biasa dilakukan.
- Menemukanali faktor-faktor yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah studi.
- Faktor yang belum dilakukan ini dikonfirmasi kembali pada unsur perencana (lembaga pelaksana dan pelaksana teknis), dengan harapan dapat memperoleh alasan yang menyebabkan hal tersebut tidak dilakukan.

b. Untuk mendapatkan data sekunder (data instansional) dilakukan dengan menggunakan ckeck list, data dan informasi tersebut mengenai :

- Arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi.
- Kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman,
- Lembaga pengelola dan pelaksana teknis

- Jenis, status, dan kondisi eksisting infrastruktur yang ada di wilayah studi.
 - Gambaran umum wilayah studi (karakteristik fisik lokasi studi, kondisi sosial-budaya, dan keadaan ekonomi masyarakat).
 - Kondisi keuangan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah
- c. Kajian literatur dilakukan melalui tinjauan terhadap faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan pendapat para pakar dan praktisi pembangunan.
5. Penemukenalan faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan kemampuan responden, yang dilakukan melalui kegiatan :
- a. Simplifikasi terhadap hasil wawancara dengan responden
 - b. Konfirmasi faktor-faktor strategis hasil wawancara pada pihak unsur pelaksana mengenai kemungkinan pelaksanaannya.
 - c. Hasil konfirmasi selanjutnya dinilai atas dasar kemampuan (kondisi keuangan dan kewenangan) pemerintah Kabupaten Sukabumi
6. Dari hasil analisa tersebut akan diperoleh dua kelompok faktor yaitu faktor-faktor yang sudah dilakukan dan faktor-faktor yang belum dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam merencanakan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.
7. Analisa atas faktor-faktor yang belum mampu dilakukan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, dengan cara melakukan wawancara pada pihak/unsur perencana, pelaksana mengenai kemampuan pelaksanaannya, dan masyarakat pengguna.

8. Konfirmasi hasil wawancara dengan responden (pemerintah dan masyarakat) sehingga diperoleh faktor-faktor strategis yang sesuai dengan kemampuan pemerintah, baik ditinjau dari segi pendanaan maupun pengelolaan dan keinginan masyarakat.
9. Mencari tahu tingkat hubungan antara faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang ada.
10. Perumusan kesimpulan berupa faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyampaian laporannya, maka sistematika penyusunan tesis ini dibuat sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang studi, identifikasi persoalan, tujuan dan sasaran studi, definisi operasional, ruang lingkup, kerangka pikir studi, metoda penelitian studi yang dilakukan, serta sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan tesis.

Bab II : Kajian Faktor-faktor Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Bab ini berisi penjelasan hasil tinjauan literatur tentang teori dan konsep yang ada hubungannya dengan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam kegiatan analisa untuk menentukan faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

Bab III : Gambaran Umum SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Bab ini akan menguraikan data/informasi yang dibutuhkan dalam studi, diantaranya adalah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi, kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, aspirasi masyarakat, pendanaan, kebijakan pengelolaan, karakteristik umum masyarakat, dan kemampuan dinas teknis dari segi personil dan peralatan.

Bab IV : Analisa Faktor-faktor Strategis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Bab IV ini merupakan tahap analisa, pada tahap ini dilakukan analisa yang dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat dipakai dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak. Tahapan yang dilakukan dalam bab ini adalah menganalisa perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya menemukenali faktor yang belum pernah dilakukan dalam merumuskan perencanaan namun memungkinkan dan mampu dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil analisa terhadap tingkat kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat maka diketahui faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab V merupakan bab terakhir dalam penyajian tesis. Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kegiatan studi yang telah dilakukan. Rekomendasi ini berisi cara/strategi agar faktor-faktor strategis perencanaan tersebut (yang selama ini belum dilaksanakan) dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

BAB II

KAJIAN FAKTOR FAKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk dapat terjadi secara alami maupun akibat proses migrasi karena daya tarik suatu wilayah, sehingga otomatis infrastruktur permukiman yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penduduk pun meningkat. Namun peningkatan penduduk ini sering tidak disertai oleh peningkatan penyediaan infrastruktur, mengingat ketersediaan dana yang terbatas. Apalagi pembangunan infrastruktur permukiman ini merupakan investasi yang tidak menguntungkan.

Dewasa ini tidak sedikit kegagalan pembangunan diakibatkan kesalahan dalam perencanaan. Kesalahan tersebut baik disebabkan oleh terbatasnya keahlian/pengetahuan dari perencana, atau kurangnya waktu dan keterlibatan dari pengguna mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Untuk menghindari adanya kesalahan pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahan perencanaan, maka dilakukan studi yang dapat menemukani faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Hasilnya nanti diharapkan dapat dipakai sebagai masukan/pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga kesalahan dimasa datang dapat dihindari.

Faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman ini adalah faktor yang dapat dipakai untuk merumuskan perencanaan, dan merupakan prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah. Untuk mencari faktor-faktor tersebut dilakukan kajian terhadap beberapa pendapat ahli yang dapat membantu merumuskan

faktor-faktor strategi perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, yang antara lain sebagai berikut.

2.1 Pembangunan Wilayah

Dalam suatu pengembangan wilayah, dikenal beberapa konsep pembangunan sebagai model pendekatan pembangunan. Konsep-konsep tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu dan/ atau permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya konsep-konsep tersebut saling melengkapi serta saling menyempurnakan sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi, seperti konsep pengembangan wilayah dari bawah, konsep pengembangan wilayah dari atas, dan konsep pengembangan wilayah dengan pendekatan ekonomi local (Oetomo, 2000 : 13). Sesuai kebutuhan studi, maka yang akan diuraikan hanya konsep pembangunan dari atas (*Development From Above*) dan konsep pembangunan dari bawah (*Development From Bellow*).

2.1.1 Konsep Pembangunan Dari Atas (*Development From Above*)

Pendekatan ini pada hakekatnya menempatkan keberadaan pusat-pusat wilayah sebagai stimulan penyebaran pembangunan. Pusat wilayah ini mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan utama dan pusat pertumbuhan bagi daerah belakangnya. Pendekatan pembangunan dari atas (*Development From Above*) pada dasarnya mempunyai esensi sebagai berikut:

- Pendekatan pembangunan yang bertumpu lebih banyak pada arahan-arahan (kebijakan-kebijakan) yang berasal dari pusat (wilayah yang lebih luas/lebih tinggi hirarkinya).
- Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada wilayah/daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan/perkembangan yang lebih tinggi.

- Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada sektor-sektor yang lebih dominan.
- Pendekatan pembangunan yang bertumpu kepada pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan adalah pihak yang memiliki dominasi legitimasi (dari rakyat): dominasi kapital (modal); dominasi kekuatan bersenjata (militer) dan sebagainya.
- Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada potensi pembangunan yang ada dan pendekatan ini mudah dilaksanakan.

2.1.2 Konsep Pembangunan Dari Bawah (*Development From Bellow*)

Pembangunan dari bawah ini lebih dikenal dengan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat. Pembangunan ini melibatkan masyarakat mulai dari perumusan tujuan, penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan, sampai pada pengawasan dan pemeliharaan. Karena sifatnya yang berbasis masyarakat inilah, maka masyarakat ikut menanggung segala resiko yang terjadi akibat kesalahan perencanaan.

Pembangunan ini jika dilihat dari konsep merupakan konsep pembangunan yang ideal karena sesuai keinginan masyarakat sebagai pengguna; namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Untuk itu pembangunan dengan cara ini memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk sampai pada tujuan yang diinginkan.

Salah satu dasar munculnya konsep pembangunan wilayah dari bawah adalah banyaknya konsep pengembangan wilayah yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan sosial dari berbagai sistem komunitas yang berbeda. Sehingga potensi yang dimiliki oleh komunitas yang lebih kecil yang pada kenyataannya merupakan faktor potensi pengembangan utama, cenderung dikuras dalam waktu singkat dan dipergunakan untuk kepentingan eksternal. Kesulitan yang akan diperoleh dengan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat adalah :

1. Masyarakat merupakan komunitas yang sangat beragam, baik ditinjau dari tingkat pendidikan, keterampilan, ekonomi, dan lain sebagainya.
2. Semua keinginan masyarakat harus masuk dan menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan, mengingat pembangunan dibuat untuk masyarakat.
3. Memerlukan waktu yang lama, karena perlu adanya ketelitian dan ketelatenan dalam menggali aspirasi sehingga dapat tertuang dalam suatu pembangunan.

2.2 Model-model Perencanaan

Kaaneekaragaman model perencanaan kota mencerminkan kemajemukan masyarakat pengguna ruangnya. Para perencana kota terus mencari apa yang dapat dilakukan untuk merencanakan suatu kota yang mengikuti karakteristik wilayah kajiannya. Model perencanaan kota muncul sepanjang sejarah pemikiran dan praktek profesional, seperti dijelaskan berikut.

2.2.1 Perencanaan Komprehensif

Model perencanaan ini timbul di Amerika antara tahun 1920-1930. Model perencanaan komprehensif ini timbul dari model perencanaan fisik, model ini dalam pelaksanaannya menyadari bahwa adanya kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hal-hal yang semula dipandang sebagai keputusan fisik atau penggunaan tanah saja. Faktor ini mencakup karakteristik soial dan demografi penduduk, variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan dan dasar ekonomi regional atau lokal; dan faktor-faktor transportasi seperti pola pergerakan, penggunaan jenis kendaraan yang berbeda, dan jaringan transportasi. Perencanaan komprehensif ini untuk mempertimbangkan semua faktor-faktor tersebut dalam proses perencanaan yang rasional dan analitis.

Perencanaan komprehensif didasarkan pada ideologi teknokratik yang mengakui keabsahan ilmiah dari pada keahlian perencanaan. Model ini mengasumsikan bahwa perencana mengetahui atau dapat menemukan kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan bahwa suatu badan perencana (instansi berwenang dalam pemerintahan) mempunyai kewenangan dan kebebasan dalam mengembangkan usulan-usulan perencana melalui analisa-analisa rasional dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya.

2.2.2 Perencanaan Sosial

Perencana sosial muncul pada tahun 1960 ketika perencanaan komprehensif diterapkan pada perencanaan dibidang sosial dan kemanusiaan. Konsep perencanaan sosial ini memungkinkan mempertimbangkan keinginan-keinginan dari kelompok tertentu dan melibatkan penggunaan teknik-teknik ilmu sosial secara luas untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan ini. Perencanaan ini lebih berorientasi pada kebutuhan sosial dari pada lingkungan fisik, maka perencanaan sosial bertujuan untuk terlibat langsung dengan interaksi program-program yang didukung oleh pemerintah seperti yang bersangkutan dengan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

2.2.3 Perencanaan Birokratis

Dalam perencanaan birokratis, perencana menjadi pelayan pemerintah dan pejabat-pejabat terpilihnya, si perencana memegang peranan sebagai administrator yang netral. Karena perencanaan birokrasi lebih berorientasi ke peranan dari pada ke proses, selanjutnya konsep tersebut lebih menekankan pada analisis sistematis dan rasional yang akan membawa pada pendekatan secara komprehensif. Tetapi model pendekatan ini lebih condong pada penentuan kebijakan oleh birokrat.

2.3 Infrastruktur Permukiman

Infrastruktur permukiman merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan kegiatan serta fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Seperti pendapat Hendro PS (Jurnal PWK, 1992 : 26), sebagai pendukung dan pengarah perkembangan kota, peran infrastruktur permukiman harus dikendalikan dalam kaitannya dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi perkotaan. Sehingga nilai ekonomis lahan dan nilai ruang perkotaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan infrastrukturnya.

Dalam uraian ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 bahwa yang dimaksud dengan :

1. *Infrastruktur* adalah utilitas umum yaitu sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum ini membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
2. *Permukiman* adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Jelasnya kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

3. *Infrastruktur permukiman* adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dimana kelengkapan dasar fisik ini berupa prasarana utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman, yaitu :

- a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
- b. Jaringan pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan.
- c. Jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

Menurut Catanese, Anthony J., dan James C.S. (1979:120) dalam bukunya *Perencanaan Kota*, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan, dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat, terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya. Infrastruktur permukiman ini berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur permukiman lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya.

Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan* perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan kegiatan serta fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung

dan dipeloporinya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, sehingga dapat meningkatkan perkembangan suatu wilayah/kota yang didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2.4 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana merupakan rumusan-rumusan keinginan atau cita-cita yang ruang lingkungnya menyeluruh dan luas (Sujarto, Dj., 1986 : 100). Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan perencanaan adalah mengandung unsur proses; dalam suatu proses terdapat serangkaian pertimbangan yang jelas dari suatu kegiatan yang mendasari perencanaan itu. Seperti yang disebutkan oleh Patrik Geddes, yang disebut dengan Tricity adalah mencakup : Survey, analisis, dan rencana; dalam artian menggambarkan kompleksnya tahapan perencanaan.

Menurut Miller, dalam buku Perencanaan Kota karangan Catanese, A. J. (1986: 100) menyatakan bahwa perencanaan adalah setiap proses hirarkis dalam organisme yang dapat mengendalikan urutan tahap pelaksanaan. Jadi ada tahapan kegiatan yang dapat dikendalikan dimana urutan ini didapat melalui suatu proses pilihan yang rasional agar apa yang menjadi tujuan tercapai. Karena suatu perencanaan dapat dikendalikan, maka perencanaan disini dapat dilihat sebagai kemampuan untuk mengembalikan konsekuensi ke masa depan dari tindakan-tindakan yang dilakukan sekarang. Semakin banyak konsekuensi yang dapat dikendalikan, semakin besar sukses perencanaan; yang dimaksud perencanaan disini adalah membuat masa depan berbeda dari apa yang terjadi tanpa perencanaan.

Sebagai tujuan untuk melangkah ke masa depan dan memperbaiki masa depan lebih baik, secara rasional hanya dapat dicapai dengan perencanaan. Begitu juga perkembangan suatu permukiman dapat dikendalikan melalui serangkaian tindakan produk perencanaan. Apa yang terlepas dari rencana merupakan fakta yang dapat dilihat disekeliling kita. produk perencanaan menjadi sumber yang berkaiatan dalam sejarah kehidupan manusia.

Diantara produk perencanaan, maka perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sangat penting keberadaannya bagi lingkungan permukiman sebagai ruang tempat tinggal. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan hidup yang berarti kebutuhan akan infrastruktur juga meningkat. Kualitas hidup masyarakat akan bertumpu pada tingkat pelayanan sarana dan prasarana (didalamnya infrastruktur permukiman) yang disediakan pemerintah. Tanpa perencanaan infrastruktur permukiman yang baik, akan terjadi kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat, sehingga diperlukan penyediaan dana serta tenaga.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang tidak dapat mendatangkan keuntungan secara langsung, selain itu dana yang diperlukan juga tidak sedikit. Sifat lain dari infrastruktur adalah merupakan bangunan milik bersama/umum sehingga ada anggapan bahwa tanggung jawab baik dalam memelihara maupun meningkatkan kapasitas bukanlah tanggung jawab individu tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Beban pemerintah yang cukup berat itulah maka pembangunan infrastruktur tidak dapat seluruhnya direalisasikan.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efisien dan efektif, maka mulai dari perumusan rencana harus melalui kesepakatan antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan mesyarakat sebagai pengguna., hal tersebut agar dalam pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman menjadi bagian dari kegiatan komunitas. Oleh sebab

itu kebijaksanaan pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah.

Mengacu pada konsep di atas, terlihat bahwa permasalahan perencanaan pembangunan infrastruktur yang kompleks adalah dari segi pembiayaan, mengingat dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur ini tidak kecil, dan pembangunan infrastruktur permukiman tidak akan mendatangkan keuntungan yang cepat bagi pemerintah. Karena itu unsur keberadaan masyarakat sebagai sasaran di tingkat lokal sangat diperlukan, mengingat yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan (peningkatan kualitas hidup).

Kebijakan dalam menentukan rencana pembangunan infrastruktur permukiman mengacu pada beberapa peraturan pusat, diantaranya :

1. Menurut UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP No. 69/1996 Hak dan Kewajiban serta Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang, Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang di Daerah, dan Kepmendagri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah :

A. Untuk menjaring program pembangunan dari wilayah melalui :

- a. Kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten dan disosialisasikan kepada masyarakat.

- b. Aspirasi masyarakat yang dijangar melalui DPRD Kabupaten
 - c. Evaluasi kinerja tahun lalu (diperoleh dari laporan hasil monitoring)
 - d. Keberadaan dana pembangunan
- B. Untuk menjaring program pembangunan dari dinas teknis, melalui :
- a. Evaluasi kinerja (ditinjau dari umur operasional suatu infrastruktur permukiman).
 - b. Survey lapangan yang disesuaikan dengan fungsi dari suatu wilayah.
 - c. Ketersediaan dana pembangunan

Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah daerah (John L. Taylor and Emiel A. Wegelin, 1995: 6). Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Pendanaan.

Yang dimaksud dengan pendanaan disini adalah kemampuan daerah (pemerintah dan masyarakat) dalam membiayai pembangunan infrastruktur permukiman. Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti. Dengan adanya lembaga penanggung jawab maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya. Masyarakat akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda sejalan dengan tingkat sosialnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi fisik lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi yang datar akan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan, dan struktur tanah.

2.5 Undang-undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada bab II pasal 2 dan pasal 3, bab III pasal 4 dan pasal 5, antara lain berbunyi :

A. Penataan ruang mempunyai asas :

1. Pemamfaatan ruang bagi sesua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, dan seimbang.

2. Keterbukaan persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

B. Penataan Ruang bertujuan :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera.
 - b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan SD buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

C. Hak dan kewajiban :

1. Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
2. Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang

- b. Berperan serta dalam menyusun rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Setiap orang berkewajiban untuk :
- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
 - b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2.6 Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah

Pada bagian dua pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah dapat berbentuk :

1. Memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai.
2. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan.
3. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, atau
5. Mengajukan keberatan terhadap rancangan RTRW Kabupaten/Kota

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan keberatan, atau masukan terhadap

informasi tentang penentuan arah pengembangan, mengidentifikasi potensi dan masalah, serta rancangan RTRW Kabupaten/Kota.

2.7 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989:41).

Menurut Clarence Shubert (APDC, 1989: 170), yang disebut partisipasi dibagi kedalam 5 (lima) tipe partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi dalam manajemen kegiatan, meliputi tahap awal kegiatan seperti menyusun rencana sampai dengan tahap akhir, yaitu dalam kegiatan evaluasi,
2. Partisipasi dalam membuat rencana dan keputusan,
3. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi),
4. Partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pengolahannya,
5. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personal)

Kegiatan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam pembangunan, untuk itu perlu ditumbuhkan dalam partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan

menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berfikir dan bekerja .

Di samping itu terdapat 5 (lima) model peran serta atau partisipasi (Dennis dalam Oetomo, 1994), yaitu :

1. Peran serta sebagai penelitian pasar,

Dalam peran serta masyarakat sebagai penelitian pasar, mereka dianggap sebagai konsumen dan atau pelanggan, yang dapat diminta pendapatnya, misalnya dalam jajak pendapat (survey pendapat masyarakat),

2. Peran serta sebagai pembuat keputusan,

Di sini masyarakat diberi kepercayaan untuk ikut membentuk badan-badan pengambil keputusan dan bahkan mungkin menyerahkan pengambilan keputusan kepada masyarakat,

3. Peran serta sebagai pemecah oposisi yang terorganisir (partisipasi retorik),

Di sini pemimpin-pemimpin golongan radikal yang cenderung beroposisi dimasukkan sebagai dan kredibilitas mereka diturunkan dalam pandangan pendukung-pendukung (masyarakat),

4. Peran serta sebagai social therapy (terapi sosial),

Masyarakat tidak dilibatkan terlalu banyak dalam penentuan apa yang harus disediakan, tapi lebih pada proses penyediaan nyata dari pelayanan itu sendiri (semacam aktivitas kerja bakti),

5. Peran serta sebagai grass-root rasialism,

Masyarakat diorganisir untuk melawan struktur kekuasaan dengan cara apapun yang dianggap tepat dengan situasi dan kondisi yang ada, misalnya dengan demokrasi, unjuk rasa, pemogokan dan sebagainya.

Selanjutnya Sandercock (dalam Oetomo, 1994) menambahkan adanya model lain, yaitu peran serta sebagai *Partaking in Benefits*, yaitu masyarakat diberi penerangan langsung tentang apa yang sedang dilakukan (dalam pembangunan) dan mengapa hal tersebut baik untuk mereka (masyarakat).

Ada beberapa tahapan partisipasi, dimana partisipasi ini biasa muncul dalam siklus perencanaan, meliputi tahap :

1. *Partnership*,

Merupakan suatu kegiatan awal yang berisi pendekatan kepada masyarakat sasaran. Dengan ini dibangun kesadaran terhadap masalah dan kondisi lingkungan. Ini menghasilkan *Community Vision*, yaitu perumusan pandangan masyarakat yang menggambarkan masyarakat ideal,

2. *Community Based Issue Analysis*,

Community Vision yang tercipta diikuti dengan upaya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan prioritas yang harus ditangani. Penangan masalah tertentu memerlukan bantuan dari pihak luar,

3. *Action Planning*,

Merupakan tahap perencanaan aksi, meliputi penetapan target, tujuan dan strategi/cara pelaksanaan. Kesemuanya merupakan hasil kesepakatan bersama,

4. *Implementasi dan Monitoring*,

Tahap pelaksanaan program dengan pemantauan masyarakat pada setiap pelaksanaan,

5. *Evaluating and Feed Back*.

Hasil monitoring berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan terhadap target yang telah disepakati. Informasi dan evaluasi juga sebagai bahan untuk melanjutkan rencana program selanjutnya.

Menurut Arstein (1970 : 59) terdapat delapan tangga atau tingkatan partisipasi (Ladder of Partisipations) yang dimuat dalam JAPA (*Journal American Planning Association*). Kedelapan tangga partisipasi tersebut dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi adalah :

1. *Manipulation,*

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, keterlibatan dan partisipasi individu tidak ada sama sekali dan kekuasaan berada di tangan pemerintah sepenuhnya.

2. *Therapy atau penyembuhan*

Tingkat partisipasi ini sangat rendah, pemerintah mengatur segala sesuatunya, sehingga individu merupakan objek program. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak program pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan dari pada mendapat masukan atau usulan-usulan dari mereka.

3. *Informing*

Pada tingkatan ini individu mulai memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari penguasa namun tetap belum memiliki ruang gerak untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program.

4. *Consultation*

Pada tingkatan ini terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak satu dengan lainnya yang memungkinkan keterlibatan individu dalam program. Metode yang sering digunakan adalah *attitude survey* (survei tentang pola pikir masyarakat), *neighborhood meeting* (pertemuan lingkungan masyarakat) dan *public hearing* (dengar pendapat)

5. *Placation*

Pada tingkatan ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun masih ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang

dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggotanya antara lain wakil-wakil dari instansi pemerintah. Dalam studi ini usul atau keinginan masyarakat dikemukakan, namun seringkali suara tersebut tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif lebih rendah dibanding anggota dari instansi pemerintah lainnya.

6. *Partnership*

Merupakan tingkat partisipasi yang ideal, pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan dalam tahap pelaksanaan program. Pada tingkat ini memungkinkan setiap individu berpartisipasi penuh dan menyampaikan ide dan aspirasinya.

7. *Delegated Power*

Pada tingkat ini rakyat mulai memegang kendali kekuasaan, kedudukan pemerintah berada di bawah rakyat, sehingga dominasi kekuasaan berada di tangan rakyat. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan pada masyarakat.

8. *Citizen Control*

Pada tingkat partisipasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara penuh dan berinspirasi munculnya kegiatan-kegiatan yang menjurus ke anarki. Mereka mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak mengadakan perubahan (Arstein, 1970:362)

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat antara lain sex/jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian, sedangkan pengaruh yang datangnya dari luar adalah kelembagaan dan keruangan.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Hambatan karena birokrat pemerintah,

Hampir disemua negara berkembang, sikap dan perilaku sebagian birokrat cenderung menghalangi partisipasi masyarakat, bahkan ada sebagian birokrat yang ingin mengeksploitasi masyarakat. Selain itu sistem hukum yang kaku, seringkali kurang luwes dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Para birokrat cenderung berpegang teguh pada standar yang berlebihan, peraturan dan prosedur formal yang kompleks (Anzorana, 1980:186),

2. Hambatan karena masalah pembentukan organisasi pelaksanaan,

Kondisi kehidupan dan lingkungan yang buruk, ketakutan terhadap pejabat pemerintah dan kepercayaan mereka pada orang luar, menyebabkan mereka secara psikologis tidak terbuka untuk berperan serta dalam suatu kegiatan. Dengan kondisi masyarakat seperti ini, tidaklah mudah untuk menarik dan mengorganisir mereka agar mau turut berperan dalam kegiatan yang diadakan di tempat tinggal mereka (Oscar Lewis, 1986:31-35),

3. Hambatan karena masalah pendanaan,

Hal ini karena kondisi ekonomi mereka yang rendah, sehingga tidak mungkin dituntut untuk menyediakan dana yang besar dalam pembangunan, untuk itu diperlukan bantuan dari berbagai pihak (Turner, 1976:39),

4. Hambatan karena pengadaan lahan dan prasarana,

Dalam pengadaan lahan untuk perumahan yang legal saja masyarakat masih kesulitan, demikian pula dengan pengadaan prasarana yang terhitung masih mahal.

2.8 Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Dari hasil uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan yang didapat dari hasil kajian teori, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang efisien dan efektif sesuai dengan keinginan masyarakat dan kemampuan pemerintah hal yang paling dasar adalah rencana yang dibuat harus 'matang'. Untuk merumuskan rencana ada beberapa faktor yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor strategis yang harus ada dan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman, adalah : 1). Kebijakan pembangunan, 2). Aspirasi masyarakat, 3). Aspek pendanaan, 4). Lembaga pengelolaan, 5). Karakteristik umum masyarakat, 6). Kemampuan pelaksana teknis

Untuk menjelaskan faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang dapat dipakai di wilayah studi, maka akan diuraikan sesuai dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah studi tersebut. Oleh sebab itu maka setiap faktor yang ada diuraikan menjadi beberapa faktor yang sesuai dengan kondisi wilayah studi., Dimana faktor-faktor tersebut terbagi dua kelompok yaitu kelompok faktor sebagai data sekunder yang lebih banyak berbentuk data kuantitatif cara memperolehnya dapat dengan survey instansi, sedangkan data primer merupakan data kualitatif yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau pengamatan langsung.

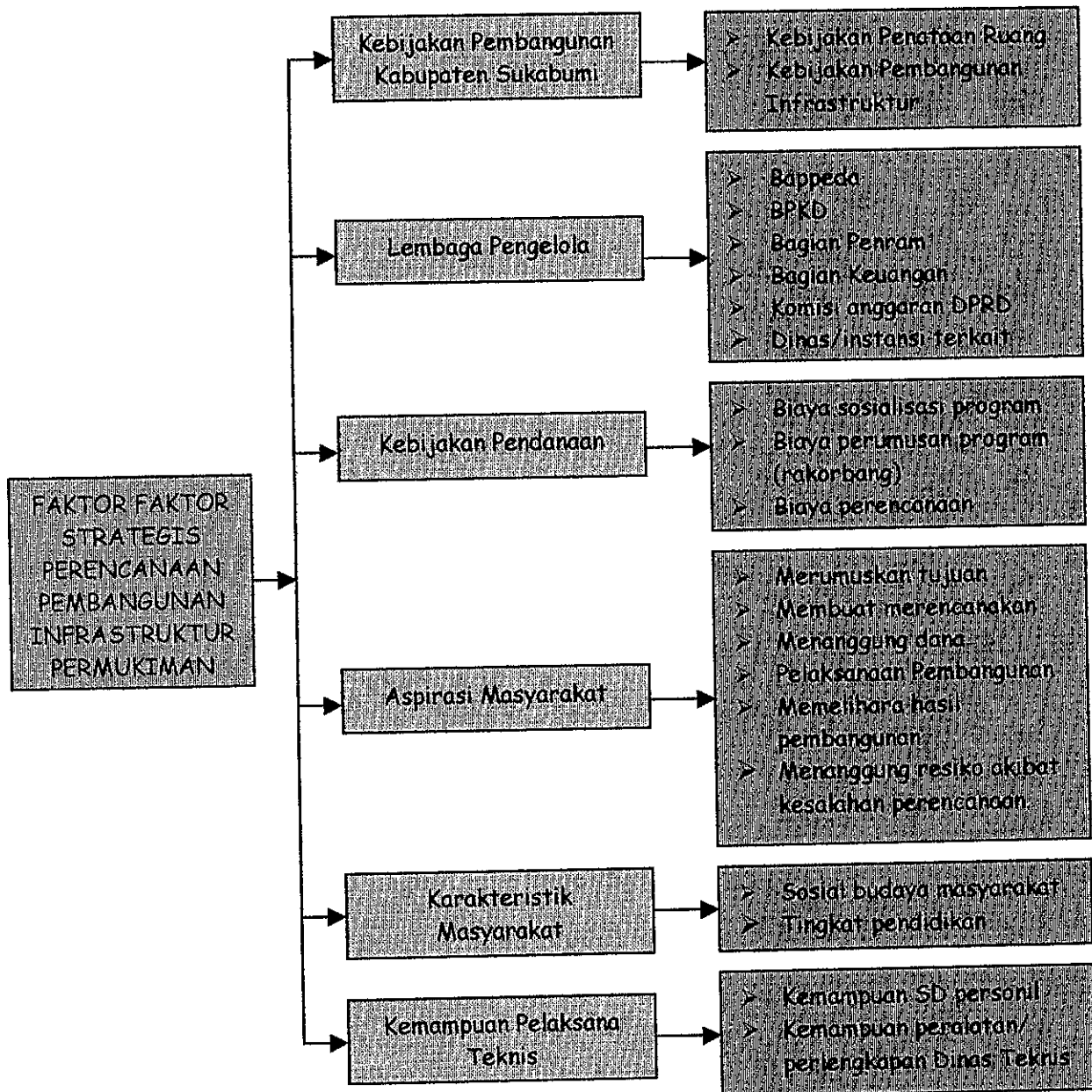
Mengingat faktor-faktor perencanaan tersebut di atas sifatnya masih belum jelas, maka untuk memudahkan penganalisaan akan diuraikan sesuai dengan kebijakan perencanaan yang berlaku di Kabupaten Sukabumi. Sehingga faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman tersebut adalah :

1. Kebijakan pembangunan, meliputi :
 - a. Kebijakan Penataan Ruang
 - b. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
2. Aspirasi masyarakat, meliputi :
 - a. Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan perencanaan.
 - b. Masyarakat ikut merencanakan
 - c. Masyarakat ikut menanggung dana
 - d. Masyarakat ikut dalam pelaksanaan pembangunan
 - e. Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan
 - f. Masyarakat ikut menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.
3. Pendanaan, meliputi :
 - a. Biaya sosialisasi program
 - b. Biaya perumusan program (rakorbang)
 - c. Biaya perencanaan
4. Lembaga pengelolaan, meliputi :
 - a. Bappeda
 - b. Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah
 - c. Bagian Penyusunan Program
 - d. Bagian Keuangan
 - e. Komisi anggaran DPRD
 - f. Dinas/instansi terkait
5. Karakteristik umum masyarakat, meliputi :
 - a. Sosial budaya
 - b. Tingkat pendidikan

6. Kemampuan Teknis, meliputi :

- a. Kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis
- b. Kemampuan peralatan/perlengkapan yang dimiliki dinas teknis.

Seperti terlihat dalam gambar 2.1 berikut.



Sumber :

- John L. Taylor and Emiel A. Wegelin, 1995
- UU No. 24/1992, Permendagri No. 9/1998

Gambar 2.1
FAKTOR-FAKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

BAB III

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum wilayah penelitian. Mulai dari kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi, potensi dan masalah yang ada dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, serta data/informasi lain yang mendukung seperti uraian berikut.

3.1 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukabumi

Dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi terletak di wilayah Barat Daya yang berbatasan dengan Propinsi Banten. Dalam pengembangan Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi lebih dikenal dengan wilayah selatan Jawa Barat atau lebih dikenal dengan sebutan wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Letaknya yang berbatasan dengan Samudera Indonesia, menjadikan Kabupaten Sukabumi termasuk dalam wilayah prioritas untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai bersama-sama dengan wilayah pantai selatan lainnya yang ada di Jawa Barat seperti Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, sampai Kabupaten Ciamis.

Dalam buku Profil Perkotaan Pada 111 Kawasan Andalan di Indonesia (Deputi Bidang Regional dan Daerah – Bappenas, 1997 : 97), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kawasan andalan Sukabumi dan sekitarnya adalah kawasan yang berada di bagian barat daya Propinsi Jawa barat, yang meliputi Kota Sukabumi, SWP Palabuhanratu dan SWP Cibadak. Dalam sistim perkotaan nasional, ketiganya berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal (PKL), yang berarti skala pelayanan infrastruktur perkotaannya mencakup wilayah kabupaten dan beberapa kecamatan disekitarnya.

Menurut RTRW Propinsi Jawa Barat, kawasan ini diarahkan pada pengembangan sektor agribisnis, pariwisata, dan kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global. Tujuan pengembangan kawasan ini adalah :

- a. Mempromosikan daerah ke pasar regional, nasional, dan internasional.
- b. Penyediaan kemudahan akses investasi.
- c. Penyiapan SDM yang terampil.
- d. Pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi darat dan pelabuhan.
- e. Perluasan jaringan (network).

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas dibanding dengan wilayah Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat (416.127,43 ha), namun penggunaannya masih didominasi oleh kawasan non budidaya dan budidaya pertanian (87,2 %) seperti terlihat pada peta penggunaan tanah yaitu **gambar 3.1**. Secara administrasi terdiri dari 45 (empat puluh lima) kecamatan yang dibagi ke dalam 6 (enam) Sub Wilayah Pembangunan atau disebut SWP, keenam SWP tersebut adalah :

1. SWP I Sukabumi, meliputi Kota Sukabumi sebagai pusat SWP I, dan yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi yaitu Kecamatan Sukalarang, Sukaraja, Cireunghas, Kebon Pedes, Gegerbitung, Gunungguruh, Cisaat, Kadudampit, dan Kecamatan Sukabumi.
2. SWP II Cibadak, meliputi Kecamatan Cibadak sebagai Pusat SWP II, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kecamatan Parakan Salak, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Cantayan, Kecamatan Bantargadung, dan Kecamatan Caringin.

KABUPATEN SUKABUMI

Gambar 3.1
**PETA GUNA LAHAN
 KABUPATEN SUKABUMI**

Keterangan :

Jalan

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten

GUNA LAHAN

- Hutan Lindung
- Hutan Produksi/Konversi
- Hutan Suaka Margasatwa
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Pariwisata
- Kebun Campuran
- Ladang
- Perkebunan
- Permukiman Perkotaan
- Sawah
- Tubuh Air
- Zona Industri

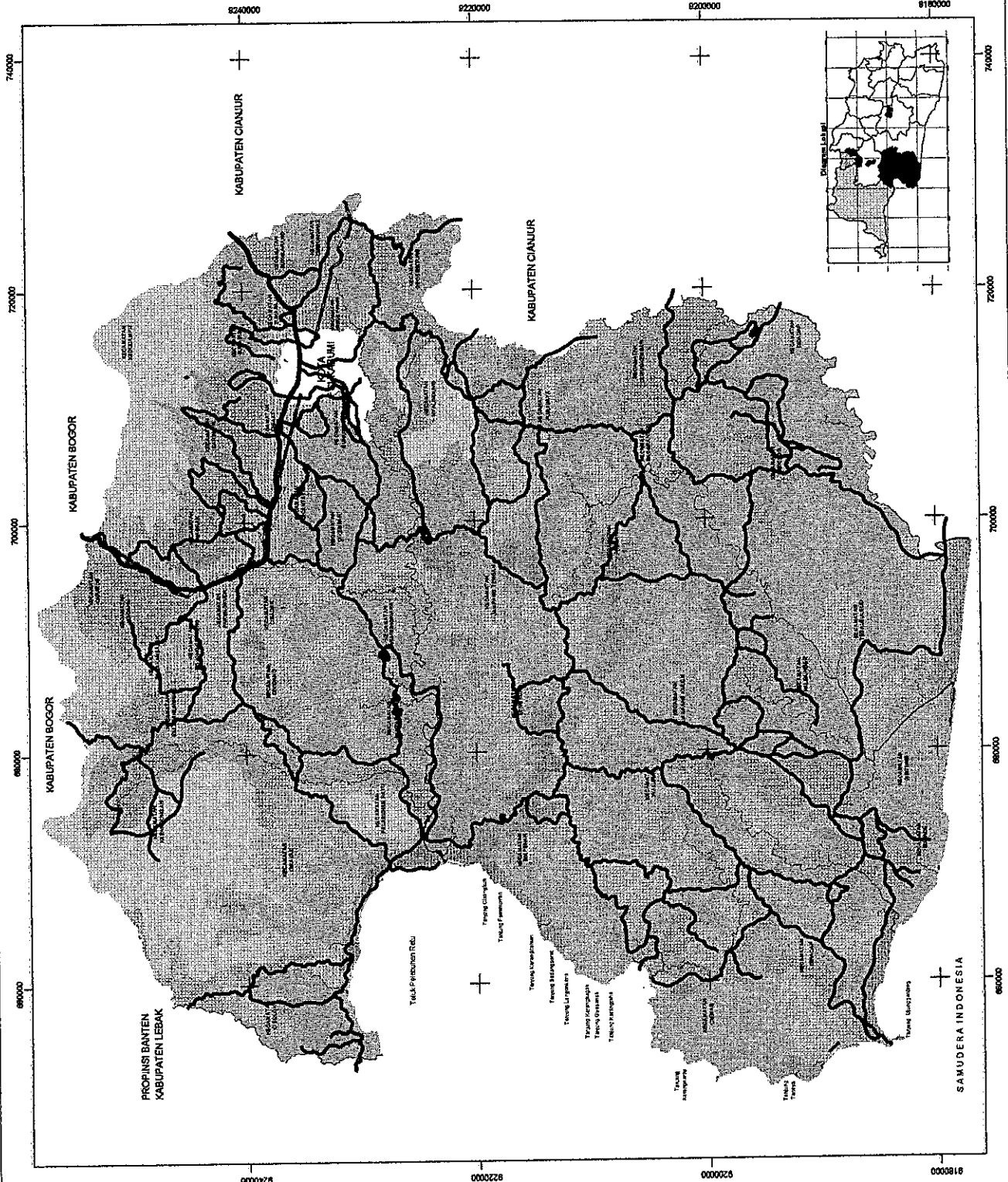
Sumber : Bappeda Sukabumi 2003
 Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal



Skala 1:500.000



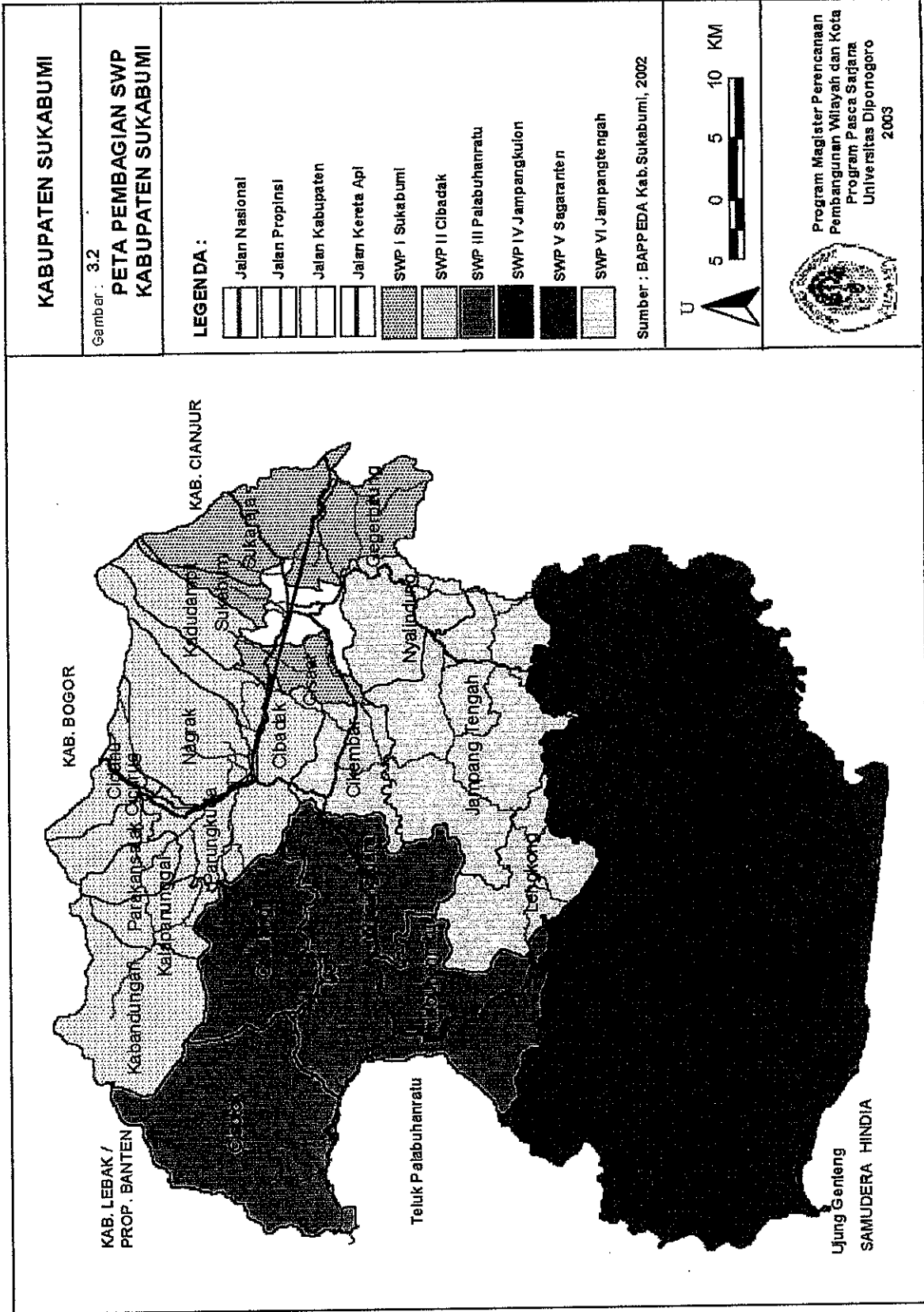
**PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 2003**



3. SWP III Palabuhanratu, meliputi Kecamatan Palabuhanratu sebagai pusat SWP III, Kecamatan Simpenan, Cikakak, Cisolok, Cikidang, Bantargadung, dan Kecamatan Warungkiara.
4. SWP IV Sagaranten, meliputi Kecamatan Sagaranten sebagai pusat SWP IV, Kecamatan Pabuaran, Curugkembar, Cidolog, Cidadap, dan Kecamatan Tegalbuleud.
5. SWP V Jampang Kulon, meliputi Kecamatan Surade sebagai pusat SWP V, Kecamatan Jampang Kulon, Ciemas, Waluran, Kalibunder, Cibitung, dan Kecamatan Ciracap.
6. SWP VI Jampang Tengah, meliputi Kecamatan Jampang Tengah sebagai pusat SWP VI, Kecamatan Nyalindung, Purabaya, dan Kecamatan Lengkong.

Peta pembagian SWP ini dapat dilihat pada **gambar 3.2**. Fungsi masing-masing SWP disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya, namun kesamaan dari semua SWP adalah sama-sama mempunyai fungsi sebagai kota administrasi pemerintahan kecamatan, dilihat pada tabel III. 1 berikut.

Tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 14 tahun 2001 tentang rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2001-2010, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan regional Jawa Barat dan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras adil dan merata. Sedangkan sasaran umum pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah tumbuh dan berkembangnya sikap dari masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui peran serta aktif profesionalisme serta produktifitas untuk mencapai taraf hidup kecerdasan, kesejahteraan lahir dan batin yang semakin meningkat.



Program Magister Perencanaan
Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
2003

Tabel III. 1
SRUKTUR TATA RUANG DAN FUNGSI SETIAP SUB WILAYAH
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2002

No.	Nama	Orde	Kedudukan	Fungsi Kawasan
1.	Sukabumi	II A	Pusat WP	Pariwisata, Pertanian (sayuran, peternakan, perikanan), Transportasi, perdagangan. dan jasa
2.	Cibadak	III A	Pusat SWP	Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Pertambangan, Pariwisata, Perdagangan, Jasa, dan Industri .
3.	Palabuhanratu	II A	Pusat SWP	Pariwisata, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Perikanan Laut, Kehutanan, Galian tambang, Peternakan, dan Industri.
4.	Sagaranten	III A	Pusat SWP	Perkebunan, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Perikanan Laut, Kehutanan, Galian tambang Peternakan, dan Industri.
5.	Jampang Kulon	III A	Pusat SWP	Pertanian Tanaman Pangan, Pariwisata, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Perikanan Laut, Kehutanan, Galian Tambang, dan Industri.
6.	Jampang Tengah	III A	Pusat SWP	Pariwisata, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Perikanan Laut, Kehutanan, Galian tambang Peternakan, dan Industri.

Sumber : Data Pokok Kabupaten Sukabumi, 2002

3.2 Aspek Kebijakan Pembangunan SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Menurut struktur ruang Kabupaten Sukabumi, bahwa SWP II Cibadak mempunyai orde III A yang berarti Cibadak sebagai pusat SWP berfungsi sebagai koleksi dan distribusi bagi kegiatan perdagangan dan jasa untuk kebutuhan WP II Sukabumi. Cibadak selain sebagai pusat SWP II dan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, juga mempunyai fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan, jasa, dan industri.

Untuk membantu menunjang fungsi yang diemban SWP II Cibadak, membuat SWP ini membagi kedalam 14 SKP (satuan kawasan permukiman) yang tugasnya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang ada di masing-masing SKP (lihat gambar 3.3 dan tabel III. 2).

Tabel III.2
FUNGSI PUSAT SKP di SWP II CIBADAK

No.	SKP	Orde	Fungsi Pusat
1.	Cibadak	III A	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, jasa transportasi lokal - regional, dan industri rumah tangga
2.	Cicurug	III A	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, jasa transportasi lokal-regional, pendidikan, kesehatan, industri menengah
3.	Cikembar	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, jasa transportasi lokal – sub regional, pertambangan, industri
4.	Parungkuda	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, pendidikan, kesehatan lokal.
5.	Cimanggu	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, pendidikan, kesehatan lokal, industri.
6.	Nagrak	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, transpor lokal, pendidikan, pariwisata, kesehatan lokal.
7.	Kalapanunggal	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal, pariwisata
8.	Parakansalak	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal, pariwisata.
9.	Cidahu	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal, pariwisata.
10.	Kabandungan	III B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal, pariwisata
11.	Cantayan	IV A	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal.
12.	Bojonggenteng	IV A	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal.
13.	Bantargadung	IV B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal.
14.	Caringin	IV B	Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, tranportasi lokal, pendidikan, kesehatan lokal.








Sumber : Review RTRW Kabupaten Sukabumi, 2002

KABUPATEN SUKABUMI

Gambar 3.3

PETA PEMBAGIAN SKP DI SWP II CIBADAK

Keterangan :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Negara
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Pusat SWP
-  Pusat SKP

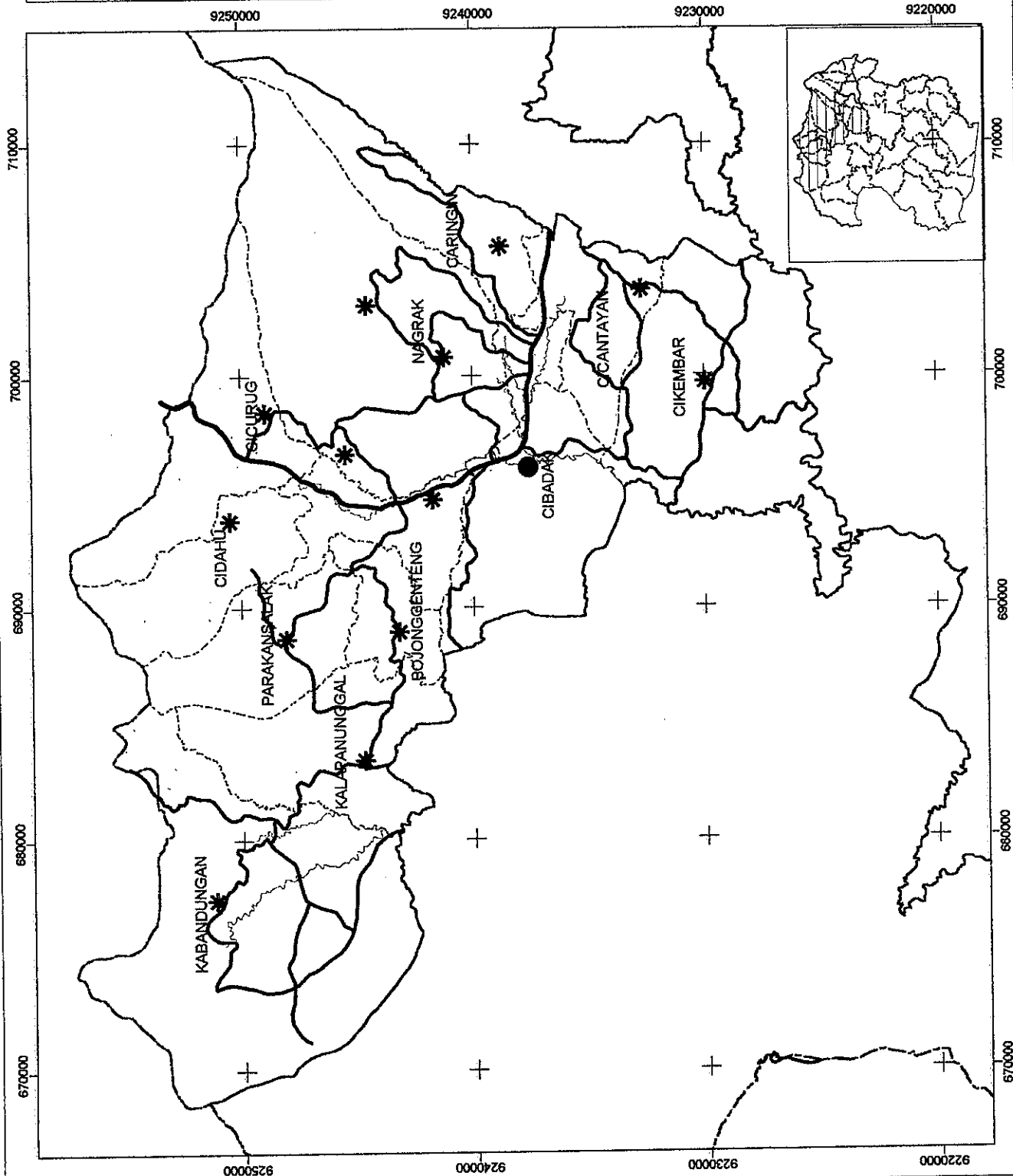
Sumber : Bappeda Sukabumi 2003
Peta Rupa Bumi Indonesia Beksouranal



Skala 1:250.000



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2003



Fungsi ini dibuat dan diarahkan agar dapat selaras untuk menunjang fungsi pusat yaitu sebagai simpul koleksi dan distribusi. SKP ini diarahkan menjadi 4 (empat) tingkatan/struktur ruang dengan fungsi yang berbeda (Juklak Penyusunan RUTR, Bangda, 2001 : 26), yaitu :

- a. Orde III A sebagai simpul koleksi dan distribusi dari orde III B.
- a. Orde III B sebagai koleksi dari orde IV A dan sebagai sentra produksi
- b. Orde IV A sebagai koleksi dari orde IV B dan sebagai sentra produksi, dan
- c. Orde IV B sebagai daerah produksi.

Kondisi seperti tersebut dibuat agar setiap SKP dapat berperan untuk membantu SWP sesuai dengan potensi yang ada. Oleh sebab itu untuk berperan sebagaimana yang telah ditentukan, maka SWP II Cibadak memerlukan infrastruktur yang dapat membantu memperlancar kegiatannya.

Investasi yang ditanamkan dari sektor pemerintah maupun swasta sejak 5 (lima) tahun terakhir bertumpu di wilayah Palabuhanratu dan Cicurug. Hal ini disebabkan bahwa Palabuhanratu disiapkan pembangunan infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan kota kabupaten (asalnya kota kecamatan), sedangkan Cicurug yaitu salah satu SKP yang berada di SWP II Cibadak sebagai *hinterland* Botabek yang mendukung Jakarta. Pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, juga diarahkan untuk mendukung mobilisasi barang dan orang, baik untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pariwisata. Hal ini terlihat dari nilai PDRB di SWP II Cibadak tahun 2002 menunjukkan kemampuan untuk ekspor yang ditunjukkan dengan nilai $LQ > 1$, namun potensi tersebut tidak dapat dipasarkan secara maksimal. Mengingat infrastruktur yang mendukung kegiatan tersebut belum mampu melayani kebutuhan, akibat kondisi infrastruktur yang rusak sebelum habis umur. Salah satu cara agar potensi di wilayah

studi dapat dipasarkan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan infrastruktur yang dapat membantu memperlancar mobilisasi.

Selanjutnya salah satu sasaran yang hendak dicapai dengan dikembangkannya kawasan andalan Sukabumi adalah meningkatkan aksesibilitas sentra produksi ke pusat pemasaran dengan meningkatkan kemampuan jalan vertikal Jawa Barat, diantaranya ruas jalan Bandung – Sukabumi – Bogor.

3.2.1 Skala Prioritas Pembangunan

Rencana pengembangan infrastruktur permukiman yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, bahwa di SWP II Cibadak salah satu prioritas pengembangan infrastruktur adalah mengembangkan jaringan jalan. Sementara itu pengembangannya diarahkan untuk menghubungkan antar pusat SWP maupun antar pusat pertumbuhan. Adapun rencana pengaturan trayek tersebut adalah sebagai berikut.

Kebijakan lain yang menjadi prioritas dalam program pembangunan jaringan jalan negara dan propinsi adalah adanya rencana pengembangan jaringan jalan untuk menunjang pengembangan agribisnis, pariwisata, dan kelautan, yaitu ruas jalan :

- a. Cibadak – Cikidang –Palabuhanratu.
- b. Pelebaran jalan lingkar Cicurug
- c. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Padalarang.
- d. Jalan Tol Jagoratu (Jakarta-Bogor-Palabuhanratu) yang melewati SWP II Cibadak.

Untuk pembangunan jalan Kabupaten, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kondisinya di SWP II Cibadak ada 4 ruas jalan, dengan panjang 6,5 km, dan total biaya Rp. 902.489.000,-, keempat ruas tersebut adalah :

- a. Cibadak – Nagrak : 4,25 km
- b. Nagrak – Pawenang : 1,30 km
- c. Caringin – Cidahu : 0,40 km
- d. Karang tengah – Nagrak : 0,70 km,

sedangkan alokasi dana untuk pemeliharaan rutin yang tersebar di SWP II Cibadak ini adalah Rp. 1.507.366,-

Tabel III.3
RENCANA PENGATURAN RUTE ANGKUTAN UMUM
DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006

No.	Terminal	Pengaturan Trayek
1.	Terminal Cibadak	Cibadak-Parungkuda-Cicurug-Benda Cibadak-Cigombong Cibadak-Nagrak Cibadak-Cikidang Cibadak-Kalapanunggal Cibadak-Parakansalak Cibadak-Cisaat Cibadak-Cimanggu-Cikembar Cibadak-Warungkiara-Palabuhanratu
2.	Terminal Cicurug	Cicurug-Parungkuda-Cibadak Cigurug-Cidahu-Parakansalak Cicurug-Benda

Sumber : Perencanaan Makro Ruang Kabupaten Sukabumi, 2002

3.2.2 Lembaga Pengelola

Sesuai Keputusan Bupati No. 42 tahun 2002, dan Keputusan Bupati No. 33 tahun 2002; bahwa lembaga pengelola perencanaan dan penelitian termasuk didalamnya mengelola infrastruktur permukiman, ada di Bappeda. Bappeda sebagai Badan Perencanaan dan Penelitian daerah berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani antara masyarakat sebagai pengguna ruang dan pelaksana teknis (dinas teknis), dalam program pembangunan yang sudah digariskan. Lembaga ini juga berfungsi sebagai koordinator

pembahasan penelitian usulan program pembangunan yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan. Ini dilakukan agar program tersebut tidak keluar dari rencana yang sudah disepakati sehingga hasilnya akan sesuai dengan tujuan.

Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai dinas teknis atau lembaga pelaksana pembangunan. Dinas PU Bina Marga mempunyai kewenangan menyusun program dan rencana dibidang kebinamargaan, mengkaji dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dibidang kebinamargaan, pembinaan teknis dibidang kebinamargaan, sedangkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai kewenangan antara lain menyusun program dan rencana dibidang pengelolaan SDA, mengkaji dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dibidang pengelolaan SDA.

Dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan kepada masyarakat sebagai pengguna, lembaga ini melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam merumuskan program pembangunan, dengan mengadakan musbangdes hingga rakorbang.

3.3 Karakteristik Umum Masyarakat

Seperti umumnya masyarakat Kabupaten Sukabumi, di SWP II Cibadak 82 % penduduknya bermatapencarian di bidang pertanian, baik berupa petani besar (pengusaha), petani pemilik, sampai petani penggarap. Dengan latar belakang kegiatan sehari-harinya berada di bidang pertanian, maka kondisi sosial ekonomi dan budaya penduduknya berhubungan dengan pertanian, seperti diuraikan berikut.

3.3.1 Kondisi Sosial Budaya

Kebiasaan yang menjadi ciri masyarakat pertanian adalah adanya sifat gotongroyong yang melekat dalam dirinya (Selo Sumarjan, 1986 : 24). Sifat ini mempengaruhi kegiatan sehari-hari, baik dalam bekerja/berusaha maupun dalam bersosialisasi. Seperti sudah menjadi

keharusan jika seseorang atau suatu kelompok mempunyai keinginan sepanjang keinginan itu tidak merugikan orang lain, maka tanpa harus disuruh mereka bergotongroyong membantu.

Kebiasaan yang sangat melekat dan terlihat sehari-hari adalah adanya pola kehidupan yang monoton, mulai pagi hari berangkat bekerja (sebagian besar keladang/kebun/sawah), siang hari pulang, dan sore hari berkumpul di balai untuk bertukar pikiran. Menurut laporan penelitian (antropologi-Unpad, 1995: 10), jika musim tanam dan mengolah kebun/sawah usai, mereka bekerja membatu tetangganya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

3.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk SWP II Cibadak pada tahun 2002 (per oktober) adalah 682.589 jiwa, penambahan penduduk per tahunnya rata-rata adalah 2,82 % relatif sama dengan rata-rata penambahan penduduk kabupaten yaitu 2,80 %. Kepadatan penduduk tertinggi dan terendah berada di Kecamatan Cicurug, kepadatan tertinggi berada di kelurahan Cicurug yaitu 83,81 jiwa/ha dan terendah adalah desa Nanggerang sebesar 4,76 jiwa, keduanya masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Cicurug.

Rata-rata pendapatan kotor perkapita penduduknya adalah Rp 1.993.050,- per tahun, dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah -10,94 % (berdasarkan sensus ekonomi tahun 1998). Dominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, selanjutnya peringkat kedua sektor perdagangan, dilanjutkan dengan sektor industri dan jasa. Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah pertanian tanaman pangan dan peternakan (ayam potong dan petelur), sedangkan untuk sektor industri adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK), industri pakaian jadi, dan industri boneka.

Untuk AMDK pasarnya sudah ke berbagai negara, sedangkan untuk dalam negeri pasar terbesar adalah DKI Jakarta dan kedua adalah Kota Bandung. Dari data Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa 85 % kebutuhan AMDK DKI Jakarta

dipenuhi oleh AMDK yang berada di SWP II Cibadak. Industri Boneka dibuat untuk memenuhi kebutuhan negara-negara Eropa, sedangkan pakaian jadi kebanyakan untuk negara-negara yang berada di Asia dan kebutuhan lokal.

Pergerakan penduduk selama ini dilayani oleh kendaraan angkutan umum (bis, angkutan kota, angkutan pedesaan, kereta api, delman, dan ojeg) baik itu dalam melayani pergerakan lokal maupun antar daerah. Pergerakan lokal sebagian besar disebabkan oleh aktifitas sehari-hari yaitu untuk bekerja, sekolah, dan ke pusat perdagangan dalam hal ini pasar untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pergerakan antar kota yang dibangkitkan oleh simpul-simpul kota besar (Sukabumi, Cicurug, dan Bogor) yang menggunakan jaringan jalan regional adalah disebabkan oleh kegiatan pariwisata, kegiatan industri yang mengangkut bahan baku dan barang hasil jadi ke arah Jakarta dan Bandung, untuk selanjutnya diteruskan menggunakan angkutan lain menuju daerah tujuan. Dari hasil monitoring terlihat bahwa pergerakan paling besar disebabkan oleh adanya kegiatan antar regional yang menggunakan jalur Cianjur-Sukabumi-Bogor.

3.4 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Dalam pembangunan infrastruktur permukiman, keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan, mengingat pembangunan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut pembangunan infrastruktur termasuk aspek kualitasnya, juga harus didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran yang realistis. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi kelangkaan pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkannya. Ini perlu dipahami karena selain melibatkan dana investasi yang relatif besar, pembangunan infrastruktur juga mengandung resiko yang tinggi. Kesalahan dan ketidaktepatan pengalokasian dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi makro

(Rahadi ramelan, 1997:11). Oleh sebab itu dalam perumusan perencanaan pembangunan yang ada sekarang harus mengacu pada UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP 69/1996 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Permendagri 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang di Daerah, dan Kepmendagri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi serta laporan Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, bahwa kebanyakan (75 %) masyarakat menginginkan adanya jaringan jalan beraspal. Mereka bersedia membantu melaksanakan pemeliharaan dengan aturan yang jelas, dan adanya lembaga pengelola, serta diberlakukannya sanksi bagi yang tidak melakukan. Karena selama ini hanya sebagian kecil (10%) dari masyarakat yang melaksanakan pembersihan/pemeliharaan jaringan drainase jalan, yang disebabkan tidak adanya penjelasan/sosialisasi tentang aturan yang mengharuskan pemeliharaan tersebut dilakukan oleh masyarakat. Jika dari awal sudah dijelaskan peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, mereka (85%) bersedia ikut berpartisipasi, karena mereka juga mengerti arti pentingnya keberadaan infrastruktur .

Dari hasil survey terhadap masyarakat dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat lewat anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, ada beberapa bentuk partisipasi yang bersedia dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, seperti terlihat pada tabel III.4 berikut.

3.4.1 Pola Penjaringan Aspirasi

Mulai tahun 2002, dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

1. Model penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan oleh anggota DPRD dalam masa reses. Masing-masing anggota DPRD mensosialisasikan rencana pembangunan Kabupaten Sukabumi dan menangkap keinginan masyarakatnya. Selanjutnya dari hasil tersebut dibuat suatu program pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat namun tidak keluar dari rencana yang telah ada. Hal ini agar apa yang sudah digariskan dalam pola dasar pembangunan dapat ditindaklanjuti oleh program yang datangnya dari masyarakat. Model seperti ini lebih efektif, mengingat orang yang menjelaskannya merupakan orang kepercayaan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih percaya. Namun kelemahannya adalah adanya keterbatasan pengetahuan tentang perencanaan, serta rencana yang ada sifatnya merupakan rencana umum yang susah untuk diterjemahkan kedalam suatu program. Sehingga banyak dari anggota DPRD kesulitan membuat program yang sesuai dengan rencana.
2. Model penjaringan aspirasi masyarakat dengan cara mengadakan Musbangdes dan Musbangkec. Koordinator pelaksanaanya adalah Bappeda dengan tujuan menjaring program dari masyarakat, selanjutnya disebut program wilayah. Program wilayah ini diperoleh dari hasil sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat, agar mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap daerahnya. Keinginan-keinginan masyarakat tersebut diidentifikasi selanjutnya dikemas dalam bentuk program pembangunan dan disusun dalam urutan prioritas. Cara ini lebih banyak direalisasikan, mengingat banyak melibatkan ahli dalam proses identifikasi dan pembuatan program. Kelemahan cara ini adalah banyak alternatif program yang saling terkait sehingga menyulitkan penyeleksian

Tabel III.4
KESEDIAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBANGUNAN
DI SWP II CIBADAK

No	Bentuk Peran Serta	Jumlah (%) dari 300 Responden
1.	Tahap perencanaan	
	a. Perumusan rencana	
	• Merumuskan tujuan	90
	• Merumuskan jumlah personil yang terlibat.	90
	• Merumuskan jumlah dana yang harus disediakan	90
	• Merumuskan konsekuensi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan rencana	90
	b. Pembuatan Rencana	65
	• Pengumpulan data/informasi	5
	• Pengolahan data/analisa	40
	• Perumusan alternatif rencana	90
• Penentuan rencana terpilih	90	
2.	Tahap pelaksanaan	
	• Penyediaan bahan/material	40
	• Penyediaan lahan	95
	• Penyediaan tenaga	40
	• Penyediaan dana/berbentuk uang	10
	• Penyediaan/sumbangan saran	60
3.	Tahap pemeliharaan	
	• Penyediaan bahan/material dan lainnya	21
	• Penyediaan tenaga	68
	• Penyediaan dana/berbentuk uang	11

Sumber : Laporan Hasil Penjarangan Aspirasi Masyarakat, DRPD, 2002.

3.4.2 Tujuan Yang Ingin Dicapai Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman, diantaranya :

1. Kemampuan keuangan pemerintah tidak akan mampu memenuhi semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diharapkan adanya bantuan untuk mewujudkannya.
2. Menjadikan pembangunan infrastruktur berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, karena sesuai dengan keinginannya.

3. Menjadikan masyarakat merasa memiliki, sehingga ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
4. Pembangunan yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, akibat adanya rasa kesadaran dalam diri untuk menjaga atas apa yang telah disepakati.

3.5 Aspek Pendanaan

Ada beberapa sumber anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di SWP II Cibadak, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), APBD I, APBN, dan Bantuan Luar Negeri (BLN). Selama tahun 1998 sampai 2002, alokasi dana untuk perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman terlihat adanya peningkatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.5
JUMLAH DAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN
JARINGAN JALAN DAN JARINGAN DRAINASE
TAHUN 1998-2002

No	Sumber Dana	Jumlah Dana (Dalam jutaan rupiah)					Rata-rata
		1998	1999	2000	2001	2002	
1.	DAU	1.324,50	1.403,12	1.454,25	1.504,41	1.508,27	1.438,91
2.	APBD I	1.992,50	2.005,50	1.992,50	2.192,30	2.365,33	2.109,63
3.	APBN	878,50	965,61	966,64	970,50	972,00	950,65
4.	BLN	2.855,30	2.001,20	2.005,25	2.050,54	2.035,46	2.189,55
	Jumlah	7.050,80	6.375,43	6.418,64	6.716,75	6.871,06	6.688,74

Sumber : Daftar Proyek Tahun 1998 – 2002, PU Bina Marga

Jika dilihat dari jumlahnya, alokasi dana untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak mengalami kenaikan, namun dari tahun 1998 ke tahun 1999 mengalami penurunan yang disebabkan pada tahun 1998 terdapat alokasi dana bantuan luar negeri (BLN) yang cukup besar untuk proyek SPAR, namun tahun berikutnya (1999-2002) dana tersebut tidak ada.

3.6 Karakteristik Umum Lembaga Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Pelaksana teknis yang dimaksud di sini adalah Dinas PU Binamarga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, kedua dinas tersebut sebagai perencana teknis sekaligus pelaksana dalam pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Sukabumi. Sesuai dengan tupoksinya kedua dinas ini diberi wewenang mulai dari merencanakan infrastruktur permukiman, pelaksanaan pembangunan, hingga pemeliharannya. Untuk menunjang tugas yang cukup berat tersebut, dinas ini mempunyai sumber daya personil dan peralatan seperti terlihat pada tabel III.7 berikut.

Tabel III.6
JUMLAH PERSONIL DAN PERLENGKAPAN DINAS TEKNIS

No.	Personil/Peralatan	Dinas PU Bina Marga	Dinas Pengelolaan SDA
A.	Personil	221	229
	• Pasca Sarjana	2	-
	• Sarjana teknik	5	5
	• Sarjana Sosial	10	8
	• Sarjana Muda	6	11
	• SLTA	120	132
	• SLTP	67	70
	• SD	11	3
B.	Peralatan:		
	• Mesin Gilas	5	-
	• Sprayer	5	-
	• Loder	2	1
	• Beku	1	1
	• Stemper	2	1
	• Dam Truk	3	1
	• Truk	14	11

Sumber : Dinas PU Bina Magra dan Dinas Pengelolaan SDA

Dalam tahap penjaringan program pembangunan infrastruktur permukiman oleh dinas teknis, hasilnya cenderung sudah dalam bentuk proyek yang siap dilaksanakan. Bentuk rencana yang dibuat sudah dalam bentuk rencana teknis disertai dengan kebutuhan dana.

3.7 Kelemahan Perencanaan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak

Dari penentuan perencanaan infrastruktur seperti disebutkan di atas, ada beberapa kelemahan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu, biaya, minimnya pengetahuan dari masyarakat maupun aparatur pelaksana, serta adanya ego kelompok, diantaranya terjadi pada tahap :

1. Tahap Musbangdes.

Tujuan dari diadakannya musbangdes adalah sebagai upaya untuk menyaring aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan pada tingkat paling bawah yaitu tingkat desa. Tetapi karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan dari masyarakat, maka yang terjadi malah muncul kepentingan pribadi dan kelompok yang menunggangi acara musyawarah tersebut, sehingga yang terjadi malah muncul pembangunan yang bukan asli kepentingan dan keinginan masyarakat namun tidak dapat dihindari.

2. Tahap Perumusan hasil Musbangkec yang akan dibawa ke Rakorbang Kabupaten.

Pada tahap ini sering terjadi adanya intervensi dari kelompok tertentu yang menamakan diri masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat mempengaruhi penentuan dan perumusan arah pembangunan.

3. Tahap perumusan program hasil Rakorbang Kabupaten

Karena keterbatasan ilmu/pengetahuan mengenai pengembangan wilayah, maka banyak penjabaran program pembangunan kedalam bentuk proyek tanpa mempertimbangkan aspek lain yang mempengaruhi. Sehingga pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tidak tercapai, yang terjadi malah proyek yang dibangun tidak berfungsi secara maksimal.

4. Tahap pembahasan usulan proyek.

Banyak dinas teknis yang mengusulkan proyek tidak disertai dengan urutan prioritas yang akan dibangun, sehingga akan menyulitkan dalam kegiatan penyeleksian/pembahasan usulan proyek.

5. Tahap pelaksanaan proyek

Tidak sedikit pelaksana pembangunan proyek mempunyai kualitas pekerjaan rendah, sehingga hasil yang didapat jauh dari sempurna, sehingga umur proyek tidak sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan perencanaan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja proyek tahun 2002, banyak temuan akibat dari kelemahan sumberdaya aparatur dan masyarakat, diantaranya :

1. Dari hasil Review RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2002, pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak banyak (64,17 %) menyimpang dari rencana tata ruang yang telah disepakati, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan (yang telah ditetapkan dalam rencana) tidak dapat terwujud.
2. Kurang koordinasi antara instansi perencana, pelaksana teknis, dan instansi pengendali, serta aparat kecamatan/desa dan masyarakat sebagai pengguna.
3. Tidak sedikit pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai kualitas rendah, sehingga hasil pekerjaannya yaitu 45 % tidak sesuai dengan rencana (Hasil Monitoring, Bina Marga, 2002:122).
4. Hasil pembangunan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang disebabkan oleh adanya ego sektor dimana pembangunan mementingkan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Masyarakat tidak merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan, hal ini disebabkan apa yang telah disepakati bersama dalam musbangdes dan musbangkec lain dengan yang terjadi diwilayahnya.

Secara umum bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat diwujudkan.

3.8 Kondisi dan Kemampuan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Seperti umumnya suatu wilayah dengan peruntukan ruang yang heterogen, maka sarana dan prasarana yang ada juga bermacam-macam, mulai dari tempat peribadatan yang meliputi mesjid, langgar, gereja, dan vihara; sarana pendidikan mulai SD sampai ST, sarana kesehatan, sampai dengan sarana perdagangan dan hiburan. Untuk sarana sosial dan sarana umum itu jika dilihat dari kuantitasnya cukup, namun jika dilihat dari kualitasnya hanya 40 % dari total jumlah yang layak pakai (Laporan Hasil Monitoring, Bappeda, 2002). Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Prasarana yang akan dibahas disini adalah yang ada kaitannya dengan studi yaitu jaringan jalan, jaringan drainase, dan tempat pembuangan sampah, seperti uraian berikut.

3.8.1 Kemampuan Pemerintah dalam Menyediakan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur permukiman bagi masyarakat terlihat masih kurang. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan dana pembangunan dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sehingga dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir hanya mencukupi 20 – 30 % dari total kebutuhan (Bina Marga, 2002 : 17).

Selain disebabkan oleh keterbatasan dana pembangunan, rendahnya kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur permukiman ini disebabkan pula oleh terbatasnya keahlian/pengetahuan personil. Dari hasil evaluasi didapat bahwa untuk membangun infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi, minimal diperlukan tenaga ahli dibidang perencanaan sebanyak 7 orang, bidang pelaksanaan 10 orang, dan bidang pengawasan 5 orang (Bina Marga, 2002 : 30). Kenyataannya untuk seluruh Kabupaten Sukabumi, tenaga ahli perencanaan yang tersedia sebanyak 9 orang, pelaksana 20 orang, dan pengawas 9 orang.

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemampuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah. Sehingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman tersebut sangat diharapkan.

3.8.2 Kondisi Jaringan Jalan

Menurut statusnya, jaringan jalan yang ada di kawasan studi terdiri dari jaringan jalan negara yaitu yang menghubungkan Bandung-Sukabumi-Bogor, jalan propinsi, yang menghubungkan Bogor-Palabuhanratu, Palabuhanratu-Tegalbuleu-Cianjur, Sukabumi-Palabuhanratu, Palabuhanratu-Bayah, Sukabumi-Gegerbitung-Cianjur, jalan kabupaten, dan jalan desa. Sebagian besar kondisi fisiknya masuk dalam katagori rusak yaitu 50 %, kondisi sedang 30 % dan hanya 15 % mempunyai kondisi baik. Untuk jelasnya lihat tabel IV.7 dan **gambar 3.4.**






Jika dilihat dari kondisi fisiknya, jaringan jalan di SWP II Cibadak belum dapat melayani kegiatan pergerakan orang maupun barang secara baik. Kondisi seperti inilah selain sarananya yang menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas terhadap daerah lainnya.

KABUPATEN SUKABUMI

Gambar 3.4

PETA JARINGAN JALAN

Keterangan :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Negara
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten

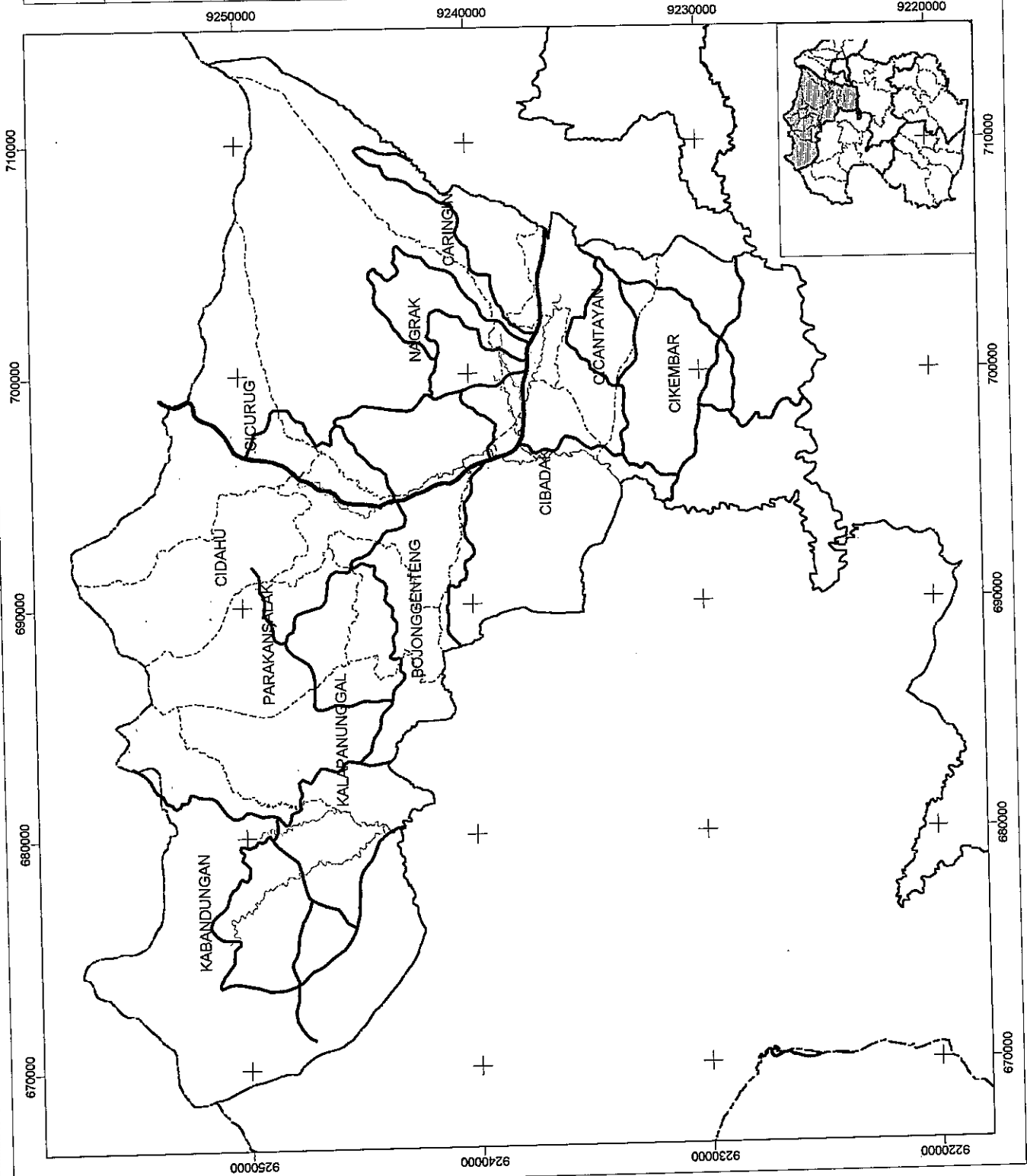
Sumber : Bappeda Sukabumi 2003
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal



Skala 1:250.000



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN
PENGANGKUTAN WILAYAH KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2003



Dengan demikian, walau potensinya mampu ekspor ($LQ > 1$) tetapi daerah diluar SWP II Cibadak tidak dapat menikmati produksinya kecuali yang dekat dan berada disepanjang jalur regional yang mempunyai tingkat aksesibilitas cukup tinggi.

Tabel III.7
KONDISI FISIK JARINGAN JALAN MENURUT STATUS
DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2002

No	Kondisi jalan	Status Jalan (km)				Jumlah (km)
		Negara	Propinsi	Kabupaten	Desa	
1.	Baik	19,00	56,32	88,60	88,94	252,86
2.	Sedang	8,00	123,01	153,40	68,02	532,43
3.	Sedang-rusak	7,00	66,24	149,80	78,48	301,52
4.	Rusak	-	81,15	102,85	130,80	314,80
5.	Rusak berat	-	51,13	20,90	156,96	228,99
J u m l a h		34,00	327,85	515,55	523,20	1631,60

Sumber : Dinas PU Bina Marga

Keterangan :
 Baik : Kondisi rusak < 2%
 Sedang : Kondisi rusak < 15 %
 Sedang-rusak : Kondisi rusak = 50 %
 Rusak : Kondisi rusak > 60 %
 Rusak berat : Kondisi rusak > 90 %

Akibat rendahnya tingkat pelayanan jaringan jalan di wilayah studi, mengakibatkan tingkat aksesibilitas rendah. Dilain pihak bahwa untuk dapat meningkatkan kegiatan ekspor harus ada jaringan jalan yang baik dengan tingkat pelayanannya yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan yang matang agar tercapai apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.8.3 Kondisi Jaringan Drainase

Pada dasarnya fungsi dari jaringan drainase adalah untuk mengeringkan genangan, baik yang diakibatkan oleh genangan air hujan di sepanjang jaringan jalan dan lainnya, maupun air buangan hasil kegiatan manusia (Ven Te Chow, 1989 :17). Drainase yang ada di SWP II terdiri dari jaringan drainase alam dan drainase buatan. Jaringan drainase alam yang ada adalah 3 (tiga) buah sungai besar yang bermuara ke laut selatan (teluk Palabuhanratu)

yaitu Sungai Citarik, Sungai Cibadak, dan Sungai Cimandiri, serta sungai-sungai kecil lainnya; sedangkan jaringan drainase buatan yaitu yang berada di sepanjang jaringan jalan baik yang berada kiri-kanan jalan dan atau hanya sebelah sisi dari jaringan jalan dan rata-rata bermuara ke sungai (lihat gambar 3.5).

Di wilayah studi, jaringan drainase yang didisain semuanya merupakan jaringan terbuka dan hanya beberapa meter saja yang telah ditutup oleh trotoar kota. Drainase yang berada di sepanjang jaringan jalan fungsinya selain untuk mengalirkan air hujan limpasan jalan, juga sebagai jaringan air limbah buangan rumah tangga. Jika dilihat dari kapasitas jaringan drainase yang ada, drainase tersebut didesain hanya untuk menampung limpasan air dari permukaan jalan, dan bukan untuk buangan air limbah. Namun pada kenyataannya bahwa drainase yang ada sekarang selain untuk drainase jaringan jalan juga digunakan untuk pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga bahkan industri dan kegiatan lainnya (lihat tabel III.9). Oleh sebab itu untuk menyediakan jaringan drainase yang multi fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan jaringan drainase termasuk desain yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Tabel III.8
KONDISI EKSISTING JARINGAN DRAINASE DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

No	Macam Drainase	Panjang	Lebar	Kondisi
1.	Sungai Citarik	18 Km	12 meter	baik
2.	Sungai Cibadak	12 Km	13 meter	baik
3.	Sungai Cimandiri	5 Km	15 meter	baik
4.	Sungai-sungai Kecil	23 Km	1-5 meter	sedang
5.	Drainase Jalan Negara	68 Km	0,8-1,2 meter	sedang
6.	Drainade Jalan Propinsi	480 Km	0,6-1,2 meter	sedang
7.	Drainase Jalan Kabupaten	1.009 Km	0,6-1,2 meter	rusak-sedang
8.	Drainase Jalan Desa	1.025 Km	0,4-1meter	rusak-sedang
9.	Saluran/parit kampung	625 Km	0,5-2 meter	rusak

Sumber : - Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air
- Dinas PU Bina Marga







Keterangan : Baik : 90 % berfungsi
Sedang : 70-85 % berfungsi
Rusak-sedang : 40-65 % berfungsi
Rusak : < 30 % berfungsi

KABUPATEN SUKABUMI

Gambar 3.5

PETA JARINGAN DRAINASE

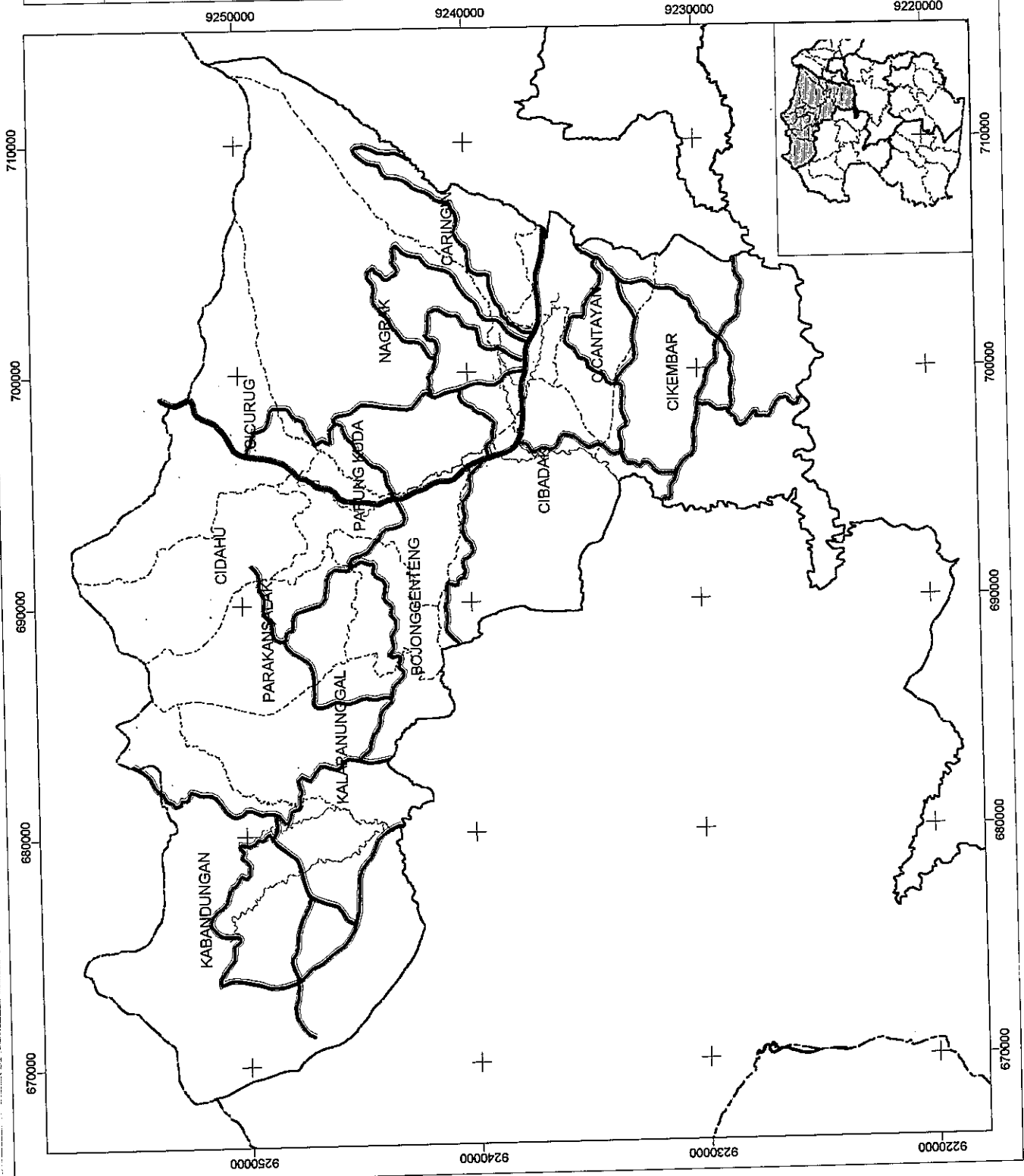
Keterangan :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Negara
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Jaringan Drainase

Sumber : Bappeda Sukabumi 2003
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2003



3.8.4 Kondisi Jaringan Air Limbah dan Tempat Pembuangan Sampah

Pembuangan limbah rumah tangga sebagian besar dibuang ke drainase jalan, sedangkan limbah kamar mandi dibuang ke sungai dan septik tank. Untuk limbah industri dibuang ke sungai yang sebelumnya mengalami proses pengolahan untuk menetralkan adanya limbah yang berbahaya bagi ekosistem yang ada di sungai. Dengan diberlakukannya program pembangunan pariwisata Gurilaps (gunung-rimba-laut-pantai-sungai) dan *prokasih* (program kali bersih) di Kabupaten Sukabumi, dimana salah satu aturannya adalah bahwa masyarakat dilarang membuang apapun yang berupa limbah ke dalam sungai, sehingga berakibat sulitnya masyarakat untuk membuang limbah terutama buangan rumah tangga dan kamar mandi/WC.

Kesulitan ini sangat terlihat terutama pada malam dan pagi hari, dimana masyarakat secara sembunyi-sembunyi membuang sampah dan sejenisnya ke sungai. Mereka belum mengerti akibat yang akan terjadi dengan perbuatannya. Tetapi yang utama adalah ketiadaan jaringan air limbah yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan untuk memusnahkan apa yang menjadi sampah bagi mereka. Rata-rata setiap harinya harus membuang limbah kegiatan rumah tangga yang jumlahnya tidak sedikit yaitu sekitar 368 m³ limbah cair, dan 100 m³ limbah padat atau sampah belum termasuk hasil buangan kegiatan perdagangan dan industri. (Lingkungan Hidup, 2001 : 50), sedangkan infrastruktur yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan belum tersedia.

Dalam masalah persampahan, sebagian besar pengolahan sampah masyarakat masih diolah oleh masing-masing individu dengan cara dibakar, namun bagi masyarakat perkotaan hal ini tidak mungkin karena akan mengganggu kegiatan lain, jadi ada badan yang mengolah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Proses pengangkutan sampah rumah tangga di perkotaan dilakukan dua kali dalam seminggu, sedangkan untuk sampah pasar dilakukan setiap hari.

Untuk masyarakat yang berada di pedesaan sampah bukan merupakan suatu masalah, karena proses pemusnahannya mudah, lain dengan masyarakat perkotaan yang melihat sampah merupakan masalah. Apalagi dengan adanya larangan untuk membuang sampah ke sungai, mereka sangat mengharapkan adanya penanganan yang baik dalam mengelola sampah tersebut.







Tempat pembuangan sampah yang ada di SWP II Cibadak dilayani oleh 2 (dua) tempat pembuangan sampah (TPS) yaitu di Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Parungkuda, keduanya menggunakan sistim *open dumping*. Kebanyakan sampah tersebut berasal dari pusat perkotaan yang mempunyai pasar kelas D (sub regional) yaitu Pasar Cibadak, Parungkuda, Pasar Cicurug, dan pasar desa yang beroperasi mingguan. Dengan terjadinya perluasan wilayah perkotaan, maka kedua lokasi tersebut keberadaannya mulai mengganggu permukiman masyarakat (libat **gambar 3.6**).

KABUPATEN SUKABUMI

Gambar 3.6

PETA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH

Keterangan :

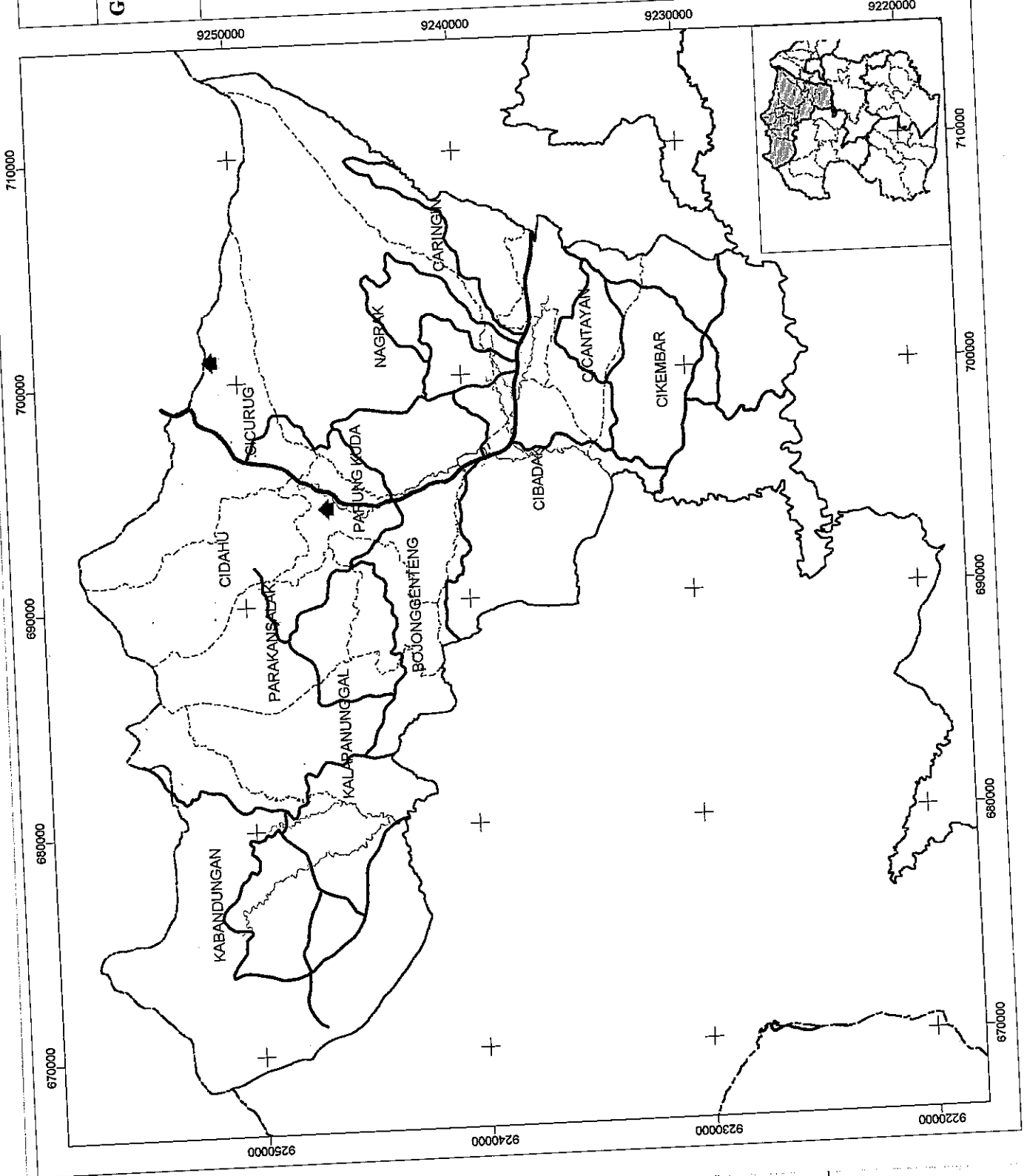
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Negara
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Tempat Pembuangan Sampah

Sumber : Bappeda Sukabumi 2003
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal

Skala 1:250.000



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2003



BAB IV

ANALISA FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting dalam strategi pembangunan. Pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil tanpa ada suatu perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik mengikutsertakan faktor-faktor perencanaan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kemauan/keinginan masyarakat. Oleh sebab itu agar seluruh faktor-faktor perencanaan dapat dipakai dalam merumuskan suatu perencanaan diperlukan cara/strategi untuk pelaksanaannya.

Melihat pentingnya faktor-faktor perencanaan dalam suatu pembangunan, dalam bab ini akan dilakukan penelitian yang sesuai dengan tujuan studi yaitu mencari dan menemukan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Untuk sampai pada apa yang menjadi tujuan studi, maka penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Menganalisa faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang dapat dipakai dalam merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Menganalisa faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang sudah dilakukan dan faktor-faktor yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

3. Menganalisa faktor-faktor yang belum menjadi pertimbangan dalam merumuskan perencanaan, sehingga didapat faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang mampu dilakukan pemerintah daerah dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Faktor-faktor strategis ini yang nantinya dipakai sebagai bahan untuk merumuskan rencana.
4. Menganalisa hubungan timbal balik antara faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Seperti akan diuraikan berikut.

4.1 Analisa Faktor yang harus Ada Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak kabupaten Sukabumi

Seperti yang telah jelaskan pada bab II, bahwa faktor-faktor yang harus ada dan menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, menurut John L. Taylor and Emiel A. Wegelin dalam bukunya *Indonesia's Urban Infrastructure*, adalah :

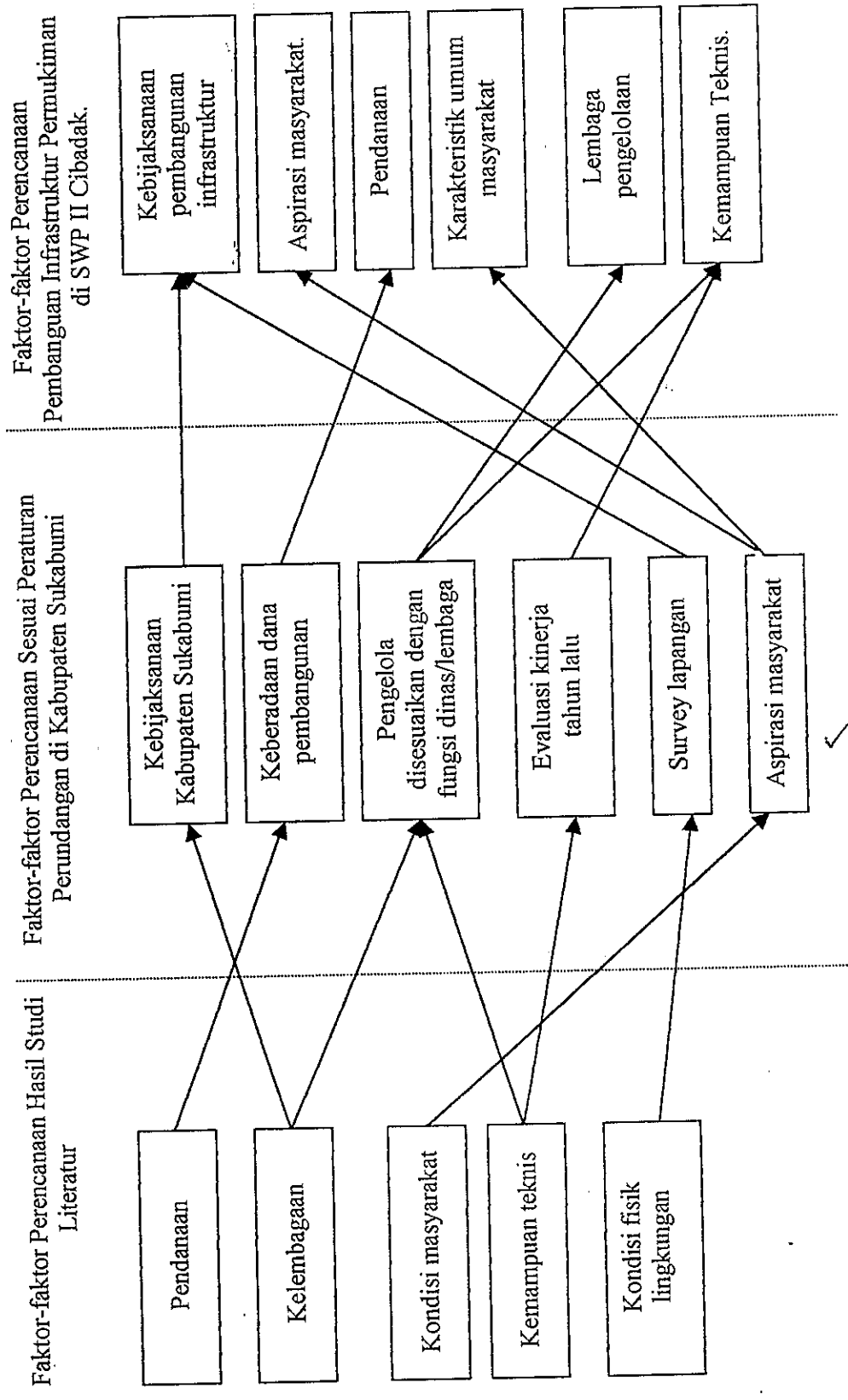
- a. Pendanaan
- b. Kelembagaan
- c. Kondisi Sosial masyarakat
- d. Kemampuan teknis
- e. Kondisi fisik lingkungan

Dengan adanya perubahan paradigma perencanaan, Kabupaten Sukabumi dengan Surat Keputusan Bupati No 29/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, salah satunya menyatakan bahwa mulai tahun 2002 dalam menentukan pembangunan mengacu pada aturan perundangan. Perundangan yang dimaksud seperti tertuang dalam UU No.

Penataan Ruang, Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang di Daerah, Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Bupati Nomor 29 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Sehingga dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- A. Untuk menjaring program pembangunan dari wilayah melalui :
- a. Bappeda melakukan sosialisasi program pembangunan yang tertuang dalam RTRW kepada masyarakat dalam acara Musbangdes.
 - b. Aspirasi masyarakat yang dijaring melalui masa reses DPRD Kabupaten
 - c. Evaluasi kinerja tahun lalu (diperoleh dari laporan hasil monitoring)
 - d. Keberadaan dana pembangunan
- B. Untuk menjaring program pembangunan dari dinas teknis, dilakukan dengan cara :
1. Evaluasi (ditinjau dari umur operasional suatu infrastruktur permukiman).
 2. Survey lapangan yang disesuaikan dengan fungsi wilayah dan guna lahan.
 3. Ketersediaan dana pembangunan

Untuk mendapatkan faktor-faktor perencanaan yang dapat dipakai dalam merumuskan suatu perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi, maka dilakukan penggabungan antara teori dengan kebijakan yang ada. Penggabungan tersebut dapat dilihat pada **gambar 4.1** dan tabel IV.1



Gambar 4.1
 PENJABARAN FAKTOR PERENCANAAN HASIL STUDI DENGAN FAKTOR PERENCANAAN YANG ADA
 DI KABUPATEN SUKABUMI

Tabel IV.1
FAKTOR FAKTOR YANG HARUS ADA DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN
PEMBNGUNAN INFRASTRUKTUR DI SWP II CIBADAK

Faktor-faktor Perencanaan Hasil Studi Literatur	Faktor-faktor Perencanaan Sesuai Peraturan Kabupaten Sukabumi	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan
1. Pendanaan 2. Kelembagaan 3. Kondisi Sosial masyarakat 4. Kemampuan teknis 5. Kondisi fisik lingkungan.	A. Untuk menjaring program pembangunan dari wilayah melalui : a. Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW Kabuapten dan disosialisasikan kepada masyarakat. b. Aspirasi masyarakat yang dijaring melalui DPRD Kabupaten c. Evaluasi kinerja tahun lalu (diperoleh dari laporan hasil monitoring) d. Keberadaan dana pembangunan B. Untuk menjaring program pembangunan dari dinas teknis, dilakukan dengan cara : a. Ditinjau dari umur operasional suatu infrastruktur permukiman. b. Survey lapangan yang disesuaikan dengan fungsi dari suatu wilayah. c. Ketersediaan dana pembangunan	a. Kebijakan pembangunan infrastruktur. b. Aspirasi masyarakat. c. Pendanaan. d. Lembaga pengelolaan. e. Karakteristik umum masyarakat. f. Kemampuan Teknis.

Sumber : Hasil Pengolahan.

Dari hasil penggabungan ke dua pendapat tersebut, diperoleh bahwa faktor-faktor yang harus ada dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi, adalah : Kebijakan pembangunan infrastruktur, Aspirasi masyarakat, Kebijakan pendanaan, Lembaga pengelolaan, Karakteristik umum masyarakat, dan Kemampuan dinas teknis.

4.2 Analisa Faktor Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Dengan adanya paradigma baru perencanaan pembangunan infrastruktur, maka Kabupaten Sukabumi mulai tahun 2003 sepakat memberlakukan Kepmendagri

No.29/2002 (tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) dalam menyusun APBD.

Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur permukiman, ke enam faktor tersebut harus dipenuhi agar terjadi pembangunan infrastruktur permukiman yang efisien dan efektif. Efisien disini berarti terjangkau nya daya beli masyarakat dan wajar terhadap harga komoditi, tabungan masyarakat meningkat, dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Efektif artinya memiliki daya jangkau (aksesibilitas) ke lokasi yang perlu dihubungkan, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta bebas dari bencana. (Muhtarudin Siregar, 1997 : 107).

Agar mempermudah pelaksanaan studi, maka ke 6 (enam) faktor-faktor perencanaan tersebut diuraikan kedalam beberapa faktor perencanaan yang lebih 'jelas' yang sesuai dengan :

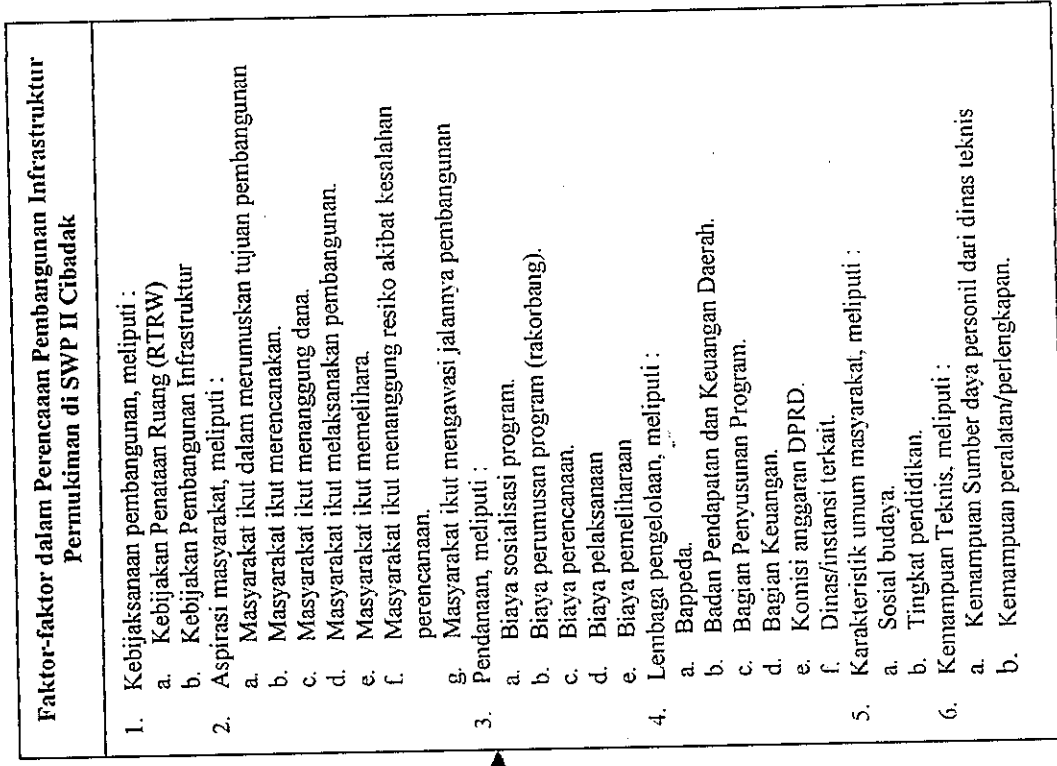
1. UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang,
2. Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang di Daerah,
3. Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
4. Surat Keputusan Bupati Sukabumi No. 20/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.

5. Surat Keputusan Bupati Sukabumi No.36/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknis.

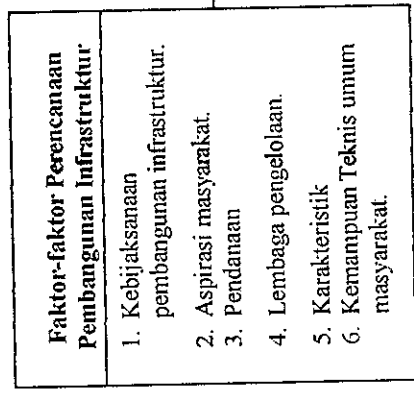
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 4.2**.

Dari hasil penjabaran tersebut, maka diperoleh menjadi 24 faktor dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kebijakan pembangunan, meliputi :
 - a. Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)
 - b. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
2. Aspirasi masyarakat, meliputi :
 - a. Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan
 - b. Masyarakat ikut merencanakan.
 - c. Masyarakat ikut menanggung dana.
 - d. Masyarakat ikut melaksanakan pembangunan.
 - e. Masyarakat ikut memelihara.
 - f. Masyarakat ikut menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.
 - g. Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan
3. Pendanaan, meliputi :
 - a. Biaya sosialisasi program.
 - b. Biaya perumusan program (rakorbang).
 - c. Biaya perencanaan.
 - d. Biaya pelaksanaan
 - e. Biaya pemeliharaan



- UU No. 24/1992
- PP No. 69/1996
- Permendagri No. 9/1998
- Kepmendagri No 29 tahun 2002
- S K Bupati Sukabumi No. 20/2002
- S K Bupati Sukabumi No. 36/1999



Gambar 4.2

PENJABARAN FAKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

4. Lembaga pengelolaan, meliputi :
 - a. Bappeda.
 - b. Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah.
 - c. Bagian Penyusunan Program.
 - d. Bagian Keuangan.
 - e. Komisi anggaran DPRD.
 - f. Dinas/instansi terkait.
5. Karakteristik umum masyarakat, meliputi :
 - a. Sosial budaya.
 - b. Tingkat pendidikan.
6. Kemampuan Teknis, meliputi :
 - a. Kemampuan Sumber daya personil dari dinas teknis
 - b. Kemampuan peralatan/perlengkapan.

Dari hasil survey dengan cara melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) responden dari pihak pemerintah yang dipandang paham mengenai kegiatan penelitian, maka didapat faktor-faktor yang telah dilakukan dan faktor-faktor yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, seperti terlihat pada tabel IV. 2.

Tabel IV.2
FAKTOR FAKTOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN YANG PERLU DILAKUKAN DI SWP II CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI

No	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pernyataan Responden (orang)		Kesimpulan
		Belum Dilakukan	Sudah Dilakukan	
1	Kebijaksanaan pembangunan, meliputi :			
	b. Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	8	2	*
	c. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	3	7	-
2	Aspirasi masyarakat, meliputi :			
	a. Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	10	0	*
	b. Masyarakat ikut merencanakan.	10	0	*
	c. Masyarakat ikut menanggung dana.	10	0	*
	d. Masyarakat ikut melaksanakan pembangunan.	10	0	*
	e. Masyarakat ikut memelihara.	10	0	*
	f. Masyarakat ikut menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.	10	0	*
	g. Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan	10	0	*
3	Pendanaan, meliputi :			
	a. Biaya sosialisasi program.	0	10	-
	b. Biaya perumusan program (rakorbang).	0	10	-
	c. Biaya perencanaan.	0	10	-
	d. Biaya pelaksanaan	0	10	-
	e. Biaya pemeliharaan	0	10	-
4	Lembaga pengelolaan, meliputi :			
	a. Bappeda.	0	10	-
	b. Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah.	0	10	-
	c. Bagian Penyusunan Program.	0	10	-
	d. Bagian Keuangan.	0	10	-
	e. Komisi anggaran DPRD.	0	10	-
	f. Dinas/instansi terkait.	0	10	-
5	Karakteristik umum masyarakat, meliputi :			
	a. Sosial budaya.			*
	b. Tingkat pendidikan.	9	1	*
6	Kemampuan Teknis, meliputi :			
	a. Kemampuan Sumber daya personil dari dinas teknis	10	0	*
	b. Kemampuan peralatan/perlengkapan.	10	0	*

Sumber : Hasil Analisa

Keterangan : * = Perlu dilaksanakan dalam merumuskan perencanaan

Dengan cara wawancara tersebut, didapat bahwa faktor yang belum dipakai dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak adalah faktor-faktor :

1. Perencanaan sesuai dengan kebijakan penataan ruang (RTRW).
2. Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan
3. Masyarakat ikut dalam merencanakan.
4. Masyarakat ikut dalam menanggung dana.
5. Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan.
6. Masyarakat ikut dalam memelihara hasil pembangunan.
7. Masyarakat ikut dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.
8. Masyarakat ikut dalam mengawasi jalannya pembangunan
9. Mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat.
10. Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat.
11. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis
12. Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan.

Sadar akan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan semua faktor-faktor perencanaan, maka pelaksanaannya akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Untuk itulah maka faktor-faktor perencanaan yang akan dipakai sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman tersebut harus sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat; seperti akan dibahas berikut ini.

4.3 Analisa Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Ciadak Kabupaten Sukabumi

Mengingat faktor-faktor perencanaan tersebut merupakan prasyarat mutlak dalam suatu perumusan rencana agar kegagalan dalam pelaksanaan dapat dihindari, maka faktor

yang belum dilakukan oleh pemerintah tersebut diusahakan harus dapat dilakukan dalam merumuskan perencanaan diwaktu mendatang. Selain itu dalam menentukan faktor-faktor perencanaan yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang selanjutnya disebut dengan faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak.

Dengan adanya penyimpangan/deviasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebesar 50 %, atau antara 50 % sampai 80,09 % untuk tiap peruntukan kawasan atau diambil rata rata deviasi pelaksanaan dari rencana sebesar 64,17 % . Jelas sudah bahwa pembangunan yang ada belum sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, salah satunya sebagai akibat belum seluruhnya faktor-faktor strategis sebagai prasyarat mutlak dalam merumuskan rencana dilakukan pemerintah daerah, oleh sebab itu untuk membuat perencanaan yang baik diperlukan suatu kesepakatan bersama.

Dari enam faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, lima faktor belum dilakukan oleh pemerintah daerah karena ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut secara umum adalah adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya personil baik kuantitas maupun ilmu/pengetahuan/keahlian dalam perencanaan infrastruktur, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat, baik dari segi bantuan materi maupun moril. Agar terwujudnya suatu perencanaan yang 'baik', dibutuhkan adanya kesepakatan antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai pengguna. Untuk itulah maka dalam sub bab ini akan dicari faktor strategis berdasarkan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat.

4.3.1 Analisis Tingkat Kemampuan Pemerintah

Penentuan faktor-faktor strategis yang sesuai dengan kemampuan pemerintah akan dicari melalui kemampuan pemberlakuan RTRW sebagai : acuan dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur, tingkat pemahaman terhadap RTRW, Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, tingkat kemampuan dalam bidang pendanaan/pembiayaan pembangunan, kemampuan dalam sumber daya personil, dan kemampuan dalam ketersediaan peralatan penunjang pembangunan.

Untuk mengetahui faktor-faktor perencanaan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah adalah dengan melakukan wawancara terhadap 10 orang responden, dimana responden tersebut berasal dari pihak pemerintah. Wawancara ini dilakukan terhadap Kepala Kantor Tata Ruang, Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang Fisik pada Bappeda, Ketua BLH, Ketua BPKD, beberapa anggota DPRD komisi bidang pembangunan dan anggaran, Kepala Bagian Penyusunan Program, Kepala Bagian Keuangan, dan Dinas Pelaksana Teknis yang berada pada wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dilakukan agar pernyataannya dapat mewakili pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Untuk mengetahui keinginan dan kemampuan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, maka dibuat daftar pertanyaan yang mengarah kepada tingkat kemampuan dan keinginan pemerintah. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat mulai tabel IV.3 sampai dengan tabel IV.14 berikut ini.

Tabel IV.3

KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK PERUMUSAN RENCANA SESUAI
DENGAN RTRW KABUPATEN SUKABUMI

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mampu sekali dilakukan	10	100
2	Cukup mampu	-	0
3	Agak mampu	-	0
4	Tidak mampu	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003.

Tabel IV.4

PEMAHAMAN PEMERINTAH TERHADAP
RTRW KABUPATEN SUKABUMI

No	Pemahaman Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mengerti sekali	3	30
2	Cukup mengerti	3	30
3	Agak mengerti	3	30
4	Tidak mengerti	1	10

Sumber : Hasil Analisa, 2003.

Dari tabel IV.3 dan tabel IV.4 dapat terlihat bahwa seluruh responden berkeinginan dan mampu melaksanakan setiap rencana pembangunan mengacu kepada RTRW sebagai rencana induk pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Mereka mengetahui keberadaan RTRW sampai pada masa berlakunya RTRW, namun hanya 30 % dari responden yang mengerti sekali dalam artian mereka inilah yang mengetahui/memahami keseluruhan isi RTRW. Selebihnya mereka hanya mengetahui adanya RTRW tanpa tahu alasan sampai terjadinya rencana (RTRW) seperti sekarang ini.

Dari tabel IV.5 sampai dengan tabel IV.11 terlihat bahwa keinginan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan rata-rata sangat tinggi. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat agar berperan aktif, kecuali peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pihak pemerintah masih terlihat ragu akan kemampuan atau keterampilan/pengetahuan masyarakat tentang peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan infrastruktur yang baik dan benar.

Tabel IV.5

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN TUJUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	7	70
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	2	20
3	Terlibat sebatas tahu	1	10
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

BPT-PUSTAKA-UNSW

Dalam merumuskan tujuan pembangunan, sebagian besar responden (70%) berkemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tujuan pembangunan yang akan dibuat, dan diharapkan dapat membantu mempermudah proses pembangunan selanjutnya. Harapan lain dari pelibatan masyarakat dalam perumusan tujuan ini adalah agar masyarakat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada serta konsekuensi dari adanya pembangunan tersebut.

Tabel IV.6

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	8	80
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	2	20
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Kemampuan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan sangat tinggi, terlihat dari 80 % responden menyatakan masyarakat terlibat penuh dan 20 % masyarakat terlibat dalam sebagian kegiatan. Harapan dari pemerintah dengan ikutnya masyarakat dalam proses perencanaan adalah selain untuk mempermudah mencari data/informasi juga data/informasi yang diperoleh akan lebih akurat, karena mereka lebih tahu mengenai wilayahnya dan mereka juga nantinya yang akan menggunakan.

Tabel IV.7

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	-	0
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	8	80
3	Terlibat sebatas tahu	2	20
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Dengan adanya kondisi keuangan pemerintah yang terbatas, seperti sudah diuraikan pada bab III sebelumnya bahwa kemampuan pembiayaan pembangunan rata-rata tiap tahunnya sekitar 32 % dari total target pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu maka pemerintah mengharapkan adanya peran masyarakat dalam pembiayaan sangat tinggi, dan pemerintah berkemampuan untuk memfasilitasinya. Pelibatan masyarakat dalam pembiayaan ini tidak sebatas pada sumbangan berupa uang namun lebih luas dari itu, yaitu lahan yang dipakai pembangunan, saran, tenaga, dan lainnya yang dapat membiayai kegiatan pembangunan.

Tabel IV.8

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Terlibat penuh	5	50
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	2	20
3	Terlibat sebatas tahu	2	20
4	Tidak terlibat	1	10

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Dengan melihat kenyataan bahwa tahap pemeliharaan hasil pembangunan memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, maka pemerintah sangat mengharapkan adanya pelibatan masyarakat secara penuh dalam pemeliharaan ini, pemerintah berkemampuan untuk memfasilitasi agar hal tersebut dapat terwujud.

Tabel IV.9

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Terlibat penuh	10	100
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	-	0
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Dari tabel IV.10 terlihat bahwa sebagian besar (70%) responden berkeinginan agar masyarakat dapat menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan, namun ada juga responden yang tidak menginginkan hal tersebut melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pekerjaan ini dengan alasan bahwa karena masyarakat dilibatkan mulai dari perumusan tujuan hingga pelaksanaan, maka sudah sewajarnya masyarakat juga ikut menanggung resiko akibat pembangunan tersebut. Namun ada juga yang menyatakan (30 %) bahwa masyarakat tidak harus menanggung resiko akibat pembangunan tersebut, mengingat pengambilan keputusan ada pada pihak pemerintah, jadi segala resiko harus ditanggung oleh pemerintah sebagai si pengambil kebijakan.

Mengingat banyaknya hasil pembangunan yang menyimpang dari rencana yaitu mencapai 50 % sebagai akibat lemahnya pengawasan (RTRW, 2002 : 52), maka pemerintah berkeinginan agar masyarakat dibekali pengetahuan mengenai juklak-juknis pembangunan infrastruktur permukiman. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat diberdayakan untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan, mengingat pemerintah belum mampu untuk mengawasi secara detail proses pembangunan yang ada di daerah. Oleh sebab itu sebagian besar responden menginginkan agar masyarakat terlibat dalam pengawasan ini.

Tabel IV.10

KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM MENANGGUNG RESIKO ATAS KESALAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	1	10
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	6	60
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	3	30

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.11

**KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	8	80
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	-	0
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	2	20

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Mengingat untuk mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat dalam suatu perencanaan diperlukan suatu penelitian yang dapat menyatakan tingkat kemampuan dan keberadaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial budayanya. Dari tabel IV.12 terlihat bahwa sebagian besar (60%) menyatakan tidak mampu jika suatu perencanaan harus mempertimbangkan keadaan sosial budaya masyarakat, selain akan memakan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun ada juga responden (40%) yang menyatakan mampu sekali, dengan alasan bahwa dalam RTRW kondisi sosial budaya masyarakat sudah menjadi pertimbangan dalam menganalisa suatu rencana tata ruang. Jika suatu rencana sudah mengacu pada RTRW, berarti sudah memasukan kondisi sosial masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman.

Tabel IV.12

**KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KARAKTERISTIK
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMBUAT PERENCANAAN**

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mampu sekali dilakukan	4	40
2	Cukup mampu	-	0
3	Agak mampu	-	0
4	Tidak mampu	6	60

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Jika dilihat dari tabel IV.13, sebagian besar (60%) menyatakan mampu mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat dalam merumuskan rencana, hal ini disebabkan adanya tujuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Seperti sudah diuraikan pada bab III bahwa kemampuan pemerintah dalam bidang penyediaan personil untuk pembangunan infrastruktur masih rendah, terutama dalam hal penyediaan tenaga untuk pemeliharaan dan pengawasan pembangunan, karena menambah personil dilingkungan pelaksana dinas teknis memerlukan pertimbangan yang cukup panjang. Oleh sebab itu maka tingkat pendidikan masyarakat akan menjadi alternatif penyediaan tenaga sesuai keahliannya dan lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel IV.13

**KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERTIMBANGKAN TINGKAT
PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MEMBUAT RENCANA**

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Mampu sekali dilakukan	6	60
2	Cukup mampu	-	0
3	Agak mampu	3	30
4	Tidak mampu	1	10

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Untuk mempertimbangkan kemampuan personil dan kemampuan peralatan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan infrastruktur, dapat terlihat bahwa pemerintah dengan kondisi seperti sekarang ini tidak dapat memenuhi kekurangan tersebut. Oleh sebab itu sebagian besar responden menyatakan bahwa untuk kedua faktor tersebut tidak akan mampu dilakukan, hanya sebagian kecil (40%) yang menyatakan mampu; seperti terlihat pada tabel IV.14 dan tabel IV.15.

Tabel IV.14

KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERTIMBANGKAN PENYEDIAAN
SUMBER DAYA PERSONIL

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mampu sekali dilakukan	4	40
2	Cukup mampu	-	0
3	Agak mampu	-	0
4	Tidak mampu	6	60

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.15

KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN
PENYEDIAAN PERALATAN

No	Kemampuan Pemerintah	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mampu sekali dilakukan	2	20
2	Cukup mampu	-	0
3	Agak mampu	-	0
4	Tidak mampu	8	80

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Dari tabel IV.3 sampai dengan tabel IV.15, terlihat bahwa masih banyak dari pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah tidak memahami isi yang terkandung dalam RTRW. Mereka mengetahui adanya RTRW yaitu suatu buku rencana yang dapat dipakai sebagai acuan untuk mengendalikan pembangunan, namun bagaimana isinya hal tersebut tidak dipahami.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah, maka dilakukan analisa dengan cara pembobotan hasil wawancara. Pembobotan ini dilakukan untuk merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan dalam menyimpulkan/menilai tingkat kemampuan dari pemerintah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Seperti terlihat pada tabel IV.16

Tabel IV.16

**TINGKAT KEMAMPUAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DI SWP II CIBADAK**

No	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan	Tingkat Kemampuan Pemerintah (%)			
		Mampu Sekali	Cukup Mampu	Agak Mampu	Tidak mampu
1	Perumusan rencana sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	100	0	0	0
2	Tingkat Pemahaman Terhadap RTRW	30	30	30	10
3	Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	70	20	10	0
4	Masyarakat ikut dalam perencanaan.	80	20	0	0
5	Masyarakat ikut dalam menanggung dana	0	80	20	0
6	Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan	50	20	20	10
7	Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan	100	0	0	0
8	Masyarakat ikut dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan	10	60	0	30
9	Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan	80	0	0	20
10	Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat	40	0	0	60
11	Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat.	60	0	30	10
12	Memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis	40	0	0	60
13	Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan	20	0	0	80
JUMLAH		680	230	110	280
RATA RATA NILAI		52,3	17,8	8,4	21,5
KESIMPULAN		Tingkat kemampuan sedang			

Sumber : Hasil Analisa

Keterangan : Nilai 0,1 – 33,3 → Kemampuan rendah
 Nilai 33,4 – 66,6 → Kemampuan sedang
 Nilai 66,7 – 100 → Kemampuan tinggi

Dari tabel IV.16 terlihat bahwa pemerintah 52,3 % berkemampuan untuk merumuskan pembangunan sesuai dengan faktor-faktor perencanaan pembangunan, 17,8 % cukup mampu, 8,4 % agak mampu, dan 21,5 % tidak mampu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah untuk merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman adalah sedang. Tingkat kemampuan sedang ini tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kesesuaian dengan tingkat keinginan masyarakat, karena itu tingkat kemampuan pemerintah ini harus disesuaikan dengan tingkat keinginan masyarakat. Untuk melaksanakannya harus diketahui dari sisi keinginan masyarakat, yaitu dengan cara mencari tingkat keinginan masyarakat untuk membantu merencanakan pembangunan di SWP II Cibadak seperti akan diuraikan berikut.

4.3.2 Analisis Tingkat Keinginan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat keinginan dan kemampuan masyarakat, dilakukan wawancara terhadap 12 orang responden dari pihak masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang faham/mengetahui proses perencanaan pembangunan, dan selain itu yang terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan dan keahlian atas isu, yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu. Tingkat keinginan masyarakat akan pembangunan disini dimulai dari merumuskan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Tabel IV.17

KEINGINAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN RENCANA SESUAI DENGAN RTRW KABUPATEN SUKABUMI

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Ingin sekali dilakukan	6	50,0
2	Cukup ingin	5	41,7
3	Agak ingin	1	8,3
4	Tidak ingin	0	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003.

Tabel IV.18

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
RTRW KABUPATEN SUKABUMI

No	Pemahaman Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Mengerti sekali	1	8,3
2	Cukup mengerti	2	16,7
3	Agak mengerti	4	33,3
4	Tidak mengerti	5	41,7

Sumber : Hasil Analisa, 2003.

Sadar terhadap keinginan menjadikan daerahnya mempunyai tata ruang yang baik, maka perencanaan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Sukabumi. Terlihat dari tabel IV.17 bahwa banyaknya responden yang menginginkan bahwa suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman sesuai dengan RTRW. Mereka mengetahui akan keberadaan RTRW Kabupaten Sukabumi sebagai rencana induk tata ruang wilayah kabupaten, namun tidak mengerti apa yang terkandung dalam RTRW tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa RTRW harus dipakai sebagai acuan dalam membuat perencanaan, termasuk perencanaan infrastruktur permukiman. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan bahwa rencana pembangunan infrastruktur permukiman mengacu/mengikuti RTRW, namun tingkat pemahaman masyarakat tentang RTRW rendah.

Keinginan masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan terlihat tinggi, seperti diperlihatkan dalam tabel IV.19 sampai tabel IV.25. Ada yang menginginkan terlibat penuh ada juga yang menginginkan terlibat pada kegiatan tertentu atau terlibat pada sebagian kegiatan.

Walaupun jika dilihat dari kemampuan yang tercantum dalam PDRB bahwa produktifitas SWP II Cibadak mampu ekspor, namun karena rendahnya aksesibilitas maka kemampuan keuangan masyarakat masih terlihat rendah (tabel III.3). Sadar akan

terbatasnya kemampuan tersebut, maka keinginan masyarakat dalam membantu pembiayaan pembangunan juga masih rendah. Karena mereka masih menganggap bahwa yang namanya pembiayaan tersebut bentuknya 'uang', mereka hanya mampu menyumbangkan dananya untuk membantu sebagian dari kegiatan pembangunan.

Sebagian besar penduduk SWP II Cibadak bekerja pada sektor pertanian, dimana terdapat waktu luang dalam tiap tahunnya mencapai 1 sampai 4 bulan. Oleh karena itu maka mereka menginginkan adanya pekerjaan untuk dapat mengisi waktu luang tersebut.

Tabel IV.19

KEINGINAN MASYARAKAT MELIBATKAN DIRI DALAM PERUMUSAN TUJUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	10	83,8
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	1	8,3
3	Terlibat sebatas tahu	1	8,3
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Dengan adanya paradigma baru tersebut mereka menyambut baik akan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Mereka menjamin bahwa pekerjaannya akan lebih baik dari yang ada sekarang, itu diperlihatkan dengan tabel IV.23 bahwa mereka sanggup untuk terlibat penuh dalam pemeliharaan hasil pembangunan.

Tabel IV.20

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	-	0
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	10	83,3
3	Terlibat sebatas tahu	2	16,7
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.21

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	-	0
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	8	66,7
3	Terlibat sebatas tahu	4	33,3
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.22

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	5	41,7
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	4	33,3
3	Terlibat sebatas tahu	2	16,7
4	Tidak terlibat	1	8,3

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.23

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM PEMELIHARAAN
HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Terlibat penuh	12	100
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	-	0
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Mengingat tidak semua tahapan pembangunan mampu dilakukan oleh masyarakat, maka mereka lebih memilih pekerjaan yang mempunyai resiko sekecil mungkin. Oleh karena itulah maka dalam tabel IV.24 terlihat keinginan masyarakat (50%) untuk menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan atau pelaksanaan tidak mau terlibat penuh.

Banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana akibat lemahnya pengawasan, menjadikan masyarakat mempunyai keinginan untuk berperan dalam pekerjaan pengawasan pembangunan di wilayahnya. Hal ini terlihat pada tabel IV.25 bahwa tingkat keinginan untuk terlibat dalam pengawasan mencapai 91,7 %. Mereka selalu merasa bahwa dana/biaya pembangunan terlalu besar jika digunakan untuk pekerjaan dengan kualitas seperti selama ini. Oleh sebab itu masyarakat ingin dilibatkan dalam pengawasan sebagai rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di wilayahnya, dan itu harus melalui kesepakatan.

Tabel IV.24

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM MENANGGUNG
RESIKO ATAS KESALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Terlibat penuh	1	8,3
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	6	50,0
3	Terlibat sebatas tahu	-	0
4	Tidak terlibat	5	41,7

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Tabel IV.25

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Terlibat penuh	6	50,0
2	Terlibat dalam sebagian kegiatan	5	41,7
3	Terlibat sebatas tahu	1	8,3
4	Tidak terlibat	-	0

Sumber : Hasil Analisa, 2003

Keinginan untuk mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat sebagai pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur permukiman rendah, ini terlihat bahwa keinginannya mencapai 33,3 % sedangkan pernyataan tidak dipertimbangkan

mencapai 66,7 %. Mereka menganggap bahwa hal tersebut sudah tercantum dalam RTRW yang harus di pakai sebagai acuan.

Begitu juga dengan pertimbangan yang menyangkut tingkat pendidikan masyarakat, mereka menganggap bahwa itu tidak perlu karena pekerjaan yang ingin mereka lakukan dalam perumusan rencana adalah pekerjaan kasar dan mereka cukup mengetahui secara lisan dari pengambil kebijakan. Ada juga responden (tabel IV.27) yang menganggap itu penting (33,3 %) karena pekerjaan yang akan mereka lakukan memerlukan ilmu/pengetahuan yang dapat membantu tercapainya apa yang menjadi tujuan pembangunan.

Tabel IV.26

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KARAKTERISTIK
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Dipertimbangkan	4	33,3
2	Boleh dipertimbangkan	-	0
3	Tidak berpengaruh	-	0
4	Tidak dipertimbangkan	8	66,7

Sumber : Hasil Olahan, 2003

Tabel IV.27

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN TINGKAT
PENDIDIKAN MASYARAKAT

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Dipertimbangkan	4	33,3
2	Boleh dipertimbangkan	-	0
3	Tidak berpengaruh	-	0
4	Tidak dipertimbangkan	8	66,7

Sumber : Hasil Olahan, 2003

Dengan alasan bahwa suatu pekerjaan akan baik jika dikerjakan oleh ahlinya, maka dari tabel IV.28 terlihat responden sebanyak 66,6 % menginginkan tingkat kemampuan personil diperhitungkan, begitu juga dengan kemampuan peralatan/perlengkapan yang ada.

Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan dari dinas teknis sebagai lembaga pelaksana pembangunan infrastruktur permukiman yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Tabel IV.28

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA PERSONIL

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Harus dipertimbangkan	8	66,7
2	Boleh dipertimbangkan	-	0
3	Tidak berpengaruh	-	0
4	Tidak dipertimbangkan	4	33,3

Sumber : Hasil Olahan, 2003

Tabel IV.29

KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN

No	Keinginan Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Harus dipertimbangkan	6	50
2	Boleh dipertimbangkan	-	0
3	Tidak berpengaruh	-	0
4	Tidak dipertimbangkan	6	50

Sumber : Hasil Olahan, 2003

Dari tabel IV.17 sampai dengan tabel IV.29, terlihat bahwa keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membangun wilayahnya beraneka ragam pendapat. Untuk mengetahui tingkat keinginan dan kemampuan masyarakat ini, maka akan dilakukan pembobotan seperti untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah. Pembobotan ini juga sama menggunakan nilai : 4 untuk nilai tinggi, 3 untuk nilai sedang, 2 untuk nilai rendah, dan 1 untuk nilai rendah sekali. Sehingga diketahui seperti terlihat dalam tabel IV.30 berikut ini

Tabel IV.30

**TINGKAT KEINGINAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM
MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMANDI SWP II CIBADAK**

No	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan	Tingkat Kemampuan Pemerintah (%)			
		Mampu Sekali	Cukup Mampu	Agak Mampu	Tidak Mampu
1	Perumusan rencana sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	50,0	41,7	8,3	0
2	Tingkat Pemahaman Terhadap RTRW	8,3	16,7	33,3	41,7
3	Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	83,3	8,3	8,3	0
4	Masyarakat ikut dalam perencanaan.	0	83,3	16,7	0
5	Masyarakat ikut dalam menanggung dana	0	66,7	33,3	0
6	Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan	41,7	33,3	16,7	8,3
7	Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan	100,0	0	0	0
8	Masyarakat ikut dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan	8,3	50,0	0	41,7
9	Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan	50,0	41,7	8,3	0
10	Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat	33,3	0	0	66,7
11	Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat.	33,3	0	0	66,7
12	Memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis	66,7	0	0	33,3
13	Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan	50,0	0	0	50,0
JUMLAH		524,9	341,7	124,9	308,4
RATA RATA NILAI		40,4	26,3	9,6	23,7
KESIMPULAN		Tingkat kemampuan sedang			

Sumber : Hasil Analisa

Keterangan : Nilai 0 – 33,3 → Kemampuan rendah
 Nilai 33,4 – 66,6 → Kemampuan sedang
 Nilai 66,7 – 100 → Kemampuan tinggi

Dari hasil Analisa terhadap keinginan masyarakat tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa tingkat keinginan masyarakat dalam membangun wilayahnya adalah sedang. Hal ini terlihat bahwa masyarakat mengetahui akan keberadaan RTRW yang harus dipakai sebagai acuan dalam pembangunan, namun mereka tidak mengerti dan mengetahui akan isi yang terkandung dalam RTRW tersebut. Oleh sebab itu sebagian besar dari masyarakat berkeinginan agar RTRW dapat dipakai sebagai pegangan dalam merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman. Untuk mengetahui faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, maka dicari dengan menganalisa antara kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat seperti akan diuraikan berikut.

4.3.3 Analisis Faktor-faktor Strategis Berdasarkan Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Keinginan Masyarakat

Dari hasil analisa terhadap faktor-faktor perencanaan yang sesuai kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat, maka didapat faktor-faktor yang mampu dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, selanjutnya disebut faktor-faktor strategis (lihat lampiran dan tabel IV.31).

Tabel IV.31

NILAI FAKTOR FAKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Faktor-faktor Perencanaan	Kelompok Responden	Tingkat Kemampuan (%)				Total (%)
		Sangat Mampu	Cukup Mampu	Agak Mampu	Tidak Mampu	
Perumusan rencana sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	Pemerintah	45,5	0	0	0	45,5
	Masyarakat	27,3	22,7	4,5	0	55,5
	Total (%)	72,8	22,7	4,5	0	100,0
Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	Pemerintah	31,8	9,1	4,5	0	45,5
	Masyarakat	45,5	4,5	4,5	0	55,5
	Total (%)	77,3	13,6	9,1	0	100,0

Masyarakat ikut dalam merencanakan.	Pemerintah	31,8	9,1	4,5	0	45,5
	Masyarakat	-	45,5	9,1	0	55,5
	Total (%)	31,8	54,6	13,6	0	100,0
Masyarakat ikut dalam menanggung dana.	Pemerintah	0	36,4	9,1	0	45,5
	Masyarakat	0	36,4	18,2	0	55,5
	Total (%)	0	72,7	27,3	0	100,0
Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan.	Pemerintah	22,7	9,1	9,1	4,5	45,5
	Masyarakat	22,7	18,2	9,1	4,5	55,5
	Total (%)	45,5	27,3	18,2	9,1	100,0
Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan	Pemerintah	45,5	0	0	0	45,5
	Masyarakat	55,5	0	0	0	55,5
	Total (%)	100,0	0	0	0	100,0
Masyarakat ikut menanggung resiko hasil pembangunan	Pemerintah	4,5	27,3	0	13,6	45,5
	Masyarakat	4,5	27,3	0	22,7	55,5
	Total	9,1	54,3	0	36,4	100,0
Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan.	Pemerintah	36,4	0	0	9,1	45,5
	Masyarakat	27,3	22,7	4,5	0	55,5
	Total	63,6	22,7	4,5	9,1	100,0
Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat	Pemerintah	18,2	0	0	27,3	45,5
	Masyarakat	18,2	0	0	36,4	55,5
	Total	36,4	0	0	63,6	100,0
Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat	Pemerintah	27,3	0	13,6	4,5	45,5
	Masyarakat	18,2	0	0	36,4	55,5
	Total	45,5	0	13,6	40,9	100,0
Memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis	Pemerintah	18,2	0	0	27,3	45,5
	Masyarakat	36,4	0	0	18,4	55,5
	Total	54,6	0	0	45,4	100,0
Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan	Pemerintah	9,1	0	0	36,4	45,5
	Masyarakat	27,3	0	0	27,3	55,5
	Total	36,4	0	0	63,6	100,0

Sumber : Hasil Analisis

Untuk mendapatkan nilai akhir dari keseluruhan total nilai, maka nilai pada tiap kolom sangat mampu, cukup mampu, agak mampu, dan tidak mampu; dibuat nilai

penyetaraan dengan mengalikan nilai total tiap pernyataan dengan 'standar penyetaraan',
yaitu :

- a. Nilai sangat mampu adalah 100 %
- b. Nilai cukup mampu adalah 66,6 %
- c. Nilai agak mampu adalah 33,3 %
- d. Nilai tidak mampu adalah 0 %

Sehingga didapat seperti terlihat pada tabel IV.32

Tabel IV.32

**NILAI FAKTOR FAKTOR STRATEGIS YANG MAMPU DILAKUKAN
PEMERINTAH DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK**

No	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kemampuan Pemerintah (%)	Standar Penyetaraan	Nilai Penyetaraan (%)	Nilai Akhir (%)
1	Perumusan rencana sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	72,7	1,00	72,70	89,17
		22,7	0,66	14,98	
		4,5	0,33	1,49	
2	Kemampuan untuk memahami RTRW	18,2	1,00	18,20	43,67
		22,7	0,66	14,98	
		31,8	0,33	10,49	
		27,3	0,00	0	
3	Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	81,8	1,00	81,80	92,27
		13,6	0,66	8,98	
		4,5	0,33	1,49	
4	Masyarakat ikut dalam merencanakan.	36,4	1,00	36,40	75,30
		54,4	0,66	35,90	
		9,1	0,33	3,00	
5	Masyarakat ikut dalam menanggung dana.	72,7	0,66	47,98	56,99
		27,3	0,33	9,01	

6	Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan	45,5	1,00	45,50	69,53
		27,3	0,66	18,02	
		18,2	0,33	6,01	
		9,1	0,00	0	
7	Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan.	100	1,00	100,00	100,00
8	Masyarakat ikut dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.	9,1	1,00	9,10	52,56
		54,5	0,66	35,97	
		22,7	0,33	7,49	
		13,6	0,00	0	
9	Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan	63,6	1,00	63,60	53,07
		22,7	0,66	14,98	
		4,5	0,33	1,49	
		9,1	0,00	0	
10	Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat	36,4	1,00	36,40	69,43
		36,4	0,66	24,02	
		27,3	0,33	9,01	
11	Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat	45,5	1,00	45,50	79,99
		50,0	0,66	33,00	
		4,50	0,33	1,49	
12	Memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis	54,5	1,00	54,50	60,57
		18,2	0,33	6,07	
		27,3	0,00	0	
13	Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan	36,4	1,00	36,40	45,41
		27,3	0,33	9,01	
		36,4	0,00	0	

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Keterangan : Nilai dibawah 0,5 belum mampu dilakukan

Untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, maka dari tabel IV.32 di atas dilakukan inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah melakukan 'cek' ulang sesuai dengan nilai yang telah diperoleh. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa kemampuan pemerintah terbatas (tidak seluruh pekerjaan mampu 100 % dilakukan).

Dengan kemampuan pemerintah yang terbatas tersebut, maka faktor-faktor strategis yang mampu dilakukan oleh pemerintah tidak semuanya mempunyai tingkat kemampuan tinggi. Sebagian besar faktor-aktor strategis tersebut mampu dilakukan namun tingkat kemampuannya sedang, kecuali satu faktor strategis yang melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan, kemampuan pemerintah adalah tinggi (nilainya 100 %). Oleh sebab itu bentuk pekerjaan yang mampu dilakukan oleh pemerintah disesuaikan dengan perolehan nilai kemampuan.

Dengan diperolehnya nilai kemampuan pemerintah untuk memasukan faktor-faktor strategis perencanaan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Maka selanjutnya akan dicari bentuk 'kemampuan' yang sesuai dengan *Juklak dan Juknis* yang berlaku di Kabupaten Sukabumi. Sehingga diperoleh bentuk pekerjaan seperti terlihat pada tabel IV.33.

Pemerintah berkemampuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan, walaupun tidak sepenuhnya dalam artian 100 %. Dari tabel III.33, faktor-faktor strategis yang mampu dipakai sebagai pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur permukiman adalah :

1. Dalam merumusan rencana pembangunan infrastruktur, pemerintah mempunyai kemampuan sebanyak 89,17 % untuk melaksanakan perencanaan tersebut sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang (RTRW), walaupun tingkat pemahaman pemerintah dan masyarakat akan RTRW yang ada hanya 18,2 % yang menyatakan paham sekali dan 22,7 % cukup paham. Dengan nilai yang diperoleh, pemerintah berkemampuan untuk melaksanakan perumusan rencana pembangunan infrastruktur permukiman sesuai dengan indikasi program yang ada dalam RTRW, tetapi belum mampu melakukan sesuai prioritas pengembangan.

Tabel IV.33

**FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMANDI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI**

No	Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kemampuan Pemerintah (%)	Uraian Pekerjaan Yang Mungkin Dilakukan Dalam Merumuskan Perencanaan
1	Perumusan rencana sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang (RTRW)	89,17	• Pelaksanaan sesuai dengan indikasi program yang ada dlm RTRW, namun belum mampu sesuai prioritas
2	Pemahaman terhadap isi RTRW	43,67	• (Belum mampu dilakukan)
3	Masyarakat ikut dalam merumuskan tujuan pembangunan	92,27	• Pelibatan masyarakat baru sebatas diwakili oleh tokoh, pengusaha dan 'kelompok'
4	Masyarakat ikut dalam merencanakan.	75,30	• Melibatkan pd tahap pengumpulan data/informasi dan kajian/analisa
5	Masyarakat ikut dalam menanggung dana.	56,99	• Dana yang mampu disediakan adalah berupa tanah yang kena proyek
6	Masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan.	69,53	• Bentuk pelibatan berupa tenaga untuk melaksanakan proyek
7	Masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan.	100,00	• Pekerjaan diserahkan kepada masyarakat sesuai kemampuan.
8	Masyarakat ikut dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan.	52,56	• Bersama-sama mencari solusi tanpa menyalahkan pihak lain
9	Masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan	53,07	• Pekerjaan pengawasan hanya pengawasan pekerjaan teknis.
10	Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat.	69,43	• Sebagai upaya u/ mengetahui kebiasaan dlm pembangunan
11	Mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat.	79,99	• Sebagai bahan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
12	Memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya personil dari dinas teknis	60,57	• Pemerintah mampu merencanakan pekerjaan yang sifatnya untuk intern Kabupaten Sukabumi
13	Mempertimbangkan kemampuan peralatan/perlengkapan	45,41	• (Belum mampu dilakukan)

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Keterangan : Tingkat kemampuan dibawah 0,5 dianggap belum mampu dilakukan oleh pemerintah.

2. Untuk merumuskan tujuan perencanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah berkemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan tujuan pembangunan. Dengan nilai kemampuan 92,27 %, maka masyarakat yang terlibat dalam perumusan tujuan adalah tokoh masyarakat, pengusaha yang usahanya ada hubungannya dengan infrastruktur permukiman, dan perwakilan dari kelompok.
3. Dalam tahap perencanaan, pemerintah baru mampu untuk melibatkan masyarakat sebesar 75,30 %. Hal ini berdasarkan atas kesadaran masyarakat yang menganggap dirinya tidak mempunyai pengetahuan tentang perencanaan infrastruktur permukiman. Sehingga pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan baru mampu pada saat/tahap pengumpulan data/informasi dan kajian/analisa.
4. Untuk menanggung dana dalam pembangunan infrastruktur, kemampuan pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk ikut menanggung sebagian biaya pembangunan sebanyak 56,99 % atau dalam artian mampu melibatkan masyarakat. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum dapat mendatangkan kesejahteraan, (walaupun potensinya tinggi), maka bantuan yang dimaksud baru sebatas membantu sumbangan berupa tanah yang terkena proyek, yaitu untuk pelebaran jalan dan pembuatan jaringan drainase.
5. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah berkemampuan untuk melibatkan masyarakat sebesar 69,53 %, Bentuk pelibatan masyarakat yang mampu dilakukan pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, berupa sumbangan lahan yang terkena pelebaran jaringan jalan dan atau pembuatan jaringan drainase.
6. Mengingat seluruh proses pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat, maka masyarakat berkeinginan untuk dilibatkan dalam pemeliharaan. Oleh sebab itu

pemerintah sebagai pengambil kebijakan berkemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan sebesar 100 %. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa pekerjaan pemeliharaan yang diserahkan pada pihak ke tiga hasilnya tidak memuaskan, mereka hanya akan melaksanakan pemeliharaan jika akan ada pemeriksaan yang waktunya sudah ditentukan.

7. Walaupun masyarakat ikut dilibatkan mulai dari perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan melibatkan masyarakat, namun pemerintahlah yang berwenang untuk menentukan kebijakan. Oleh sebab itu dengan kemampuan sebesar 52,56 % untuk melibatkan masyarakat dalam menanggung resiko, maka pemerintah baru mampu melibatkan masyarakat untuk mencari solusi penyelesaiannya dari permasalahan yang timbul karena kesalahan perencanaan.
8. Untuk menghindari kesalahan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang sudah disepakati, pemerintah berkemampuan sebesar 53,07 % untuk melibatkan masyarakat dalam pekerjaan pengawasan jalannya pembangunan, yaitu masyarakat sebagai pengendali jika ada pelaksanaan menyimpang secara kuantitas. Mengingat nilai dari kemampuan hanya 53,07 %, maka pelibatan masyarakat untuk ikut pada pekerjaan pengawasan dibatasi pada pekerjaan yang sifatnya teknis, sedangkan pekerjaan administrasi masih wewenang pemerintah.
9. Dalam mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat untuk merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman, pemerintah sudah mampu melaksanakan. Ini terlihat dari nilai kemampuan pemerintah sebesar 69,43 %, dengan kata lain bahwa faktor ini harus ditinjau untuk mengetahui sosial budaya masyarakat sebagai masukan dalam menentukan sistim pembangunan yang akan dilaksanakan.

10. Untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat dalam merumuskan perencanaan infrastruktur permukiman, pemerintah mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan. Ini terlihat dari nilai yang dihasilkan adalah 79,99 %, pemerintah menganggap bahwa tingkat pendidikan masyarakat dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat pelibatan masyarakat.
11. Untuk faktor kemampuan sumber daya personil yang dimiliki oleh dinas teknis, pemerintah mampu mempertimbangkan faktor ini sebesar 60,57 %, karena tanpa faktor ini juga suatu perencanaan infrastruktur dapat berjalan, mengingat ketidakmampuan dinas teknis dapat diantisipasi oleh pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Pemerintah baru sanggup/mampu menyediakan sumber daya personil dengan kemampuan merencanakan pekerjaan yang sifatnya untuk intern Kabupaten Sukabumi. Sedangkan yang sifatnya regional Jawa Barat harus ada kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai tenaga ahli lebih mampu.
12. Untuk faktor kemampuan penyediaan peralatan dinas teknis, pemerintah belum mampu mempertimbangkan faktor ini sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, mengingat nilai kemampuan pemerintah hanya 45,41 %. Jika faktor ini dipertimbangkan dalam perencanaan, dinas teknis tidak akan layak sebagai pelaksana untuk melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman tersebut.

Walaupun faktor-faktor strategis tersebut mampu dilakukan oleh pemerintah dan sesuai dengan keinginan masyarakat, Namun untuk melaksanakannya masih harus dicari cara-cara pelaksanaan yang tepat. Dalam menentukan strategi ini, diperlukan suatu intervensi yang dapat merubah paradigma lama tanpa ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Dari uraian di atas (tabel IV.33), dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, harus memperhatikan 11 (sebelas) faktor-faktor strategis. Namun mengingat tingkat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan faktor-faktor strategis perencanaan tidak seluruhnya (100%) mampu, maka faktor-faktor strategis perencanaan yang akan dilakukan pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak disesuaikan dengan nilai kemampuan yang diperoleh.

4.3.4 Analisis Hubungan Antar Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak

Ada yang perlu diketahui, bahwa untuk melaksanakan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman harus diketahui hubungan timbal balik antara faktor-faktor strategis tersebut. Hal ini diperlukan mengingat bahwa antar faktor-faktor tersebut alangkah baiknya jika terjadi hubungan yang kuat.

Dengan melakukan uji keeratan hubungan antara dua variable (pemerintah dan masyarakat) dengan menggunakan analisa korelasi *product moment* (pearson correlation), maka didapat nilai hubungan. Dari faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang mampu dilakukan pemerintah, diperoleh dua hubungan. Hubungan positif atau hubungan sejajar dan searah serta hubungan negatif atau sejajar berlawanan arah searah. Dalam prosesnya, akan menggunakan Analisa Korelasi Produk Moment (Correlation Pearson). Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat hubungan (kuat – lemahnya) antara faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hubungan ini dapat berupa hubungan secara positif (+) dalam arti berhubungan sejajar searah, maupun secara negatif (-) dalam arti berhubungan sejajar berlawanan arah. Untuk mempermudah dan

mempercepat proses analisa, maka di sini menggunakan komputer dengan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) sehingga dihasilkan tabel IV.34. dan lampiran.

Dari hasil perhitungan didapat bahwa yang mempunyai hubungan kuat sejarah searah adalah faktor-faktor strategis :

1. Terdapatnya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman terhadap RTRW dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Ini berarti bahwa faktor strategis tingkat pemahaman terhadap perencanaan tata ruang (RTRW) berpengaruh kuat terhadap pelibatan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur permukiman.
2. Terdapatnya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman akan RTRW dengan pelibatan masyarakat dalam pembiayaan. Ini berarti bahwa faktor strategis tingkat pemahaman terhadap perencanaan tata ruang (RTRW) berpengaruh kuat terhadap pelibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman.
3. Terdapatnya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman akan RTRW dengan tingkat pendidikan masyarakat. Ini berarti bahwa faktor strategis tingkat pemahaman terhadap perencanaan tata ruang (RTRW) berpengaruh kuat terhadap tingkat pendidikan masyarakat.
4. Terdapatnya hubungan yang kuat antara pelibatan masyarakat dalam perumusan tujuan dengan pelibatan masyarakat dalam menanggung resiko., Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan berpengaruh kuat dengan pelibatan masyarakat dalam menanggung resiko hasil pembangunan.

Tabel IV. 34
**HUBUNGAN FAKTOR FAKTOR STRATEGIS
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
 DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI**

Faktor-faktor Strategis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak	Rencana sesuai dengan RTRW	Masyarakat ikut Dlm Perumusan tujuan	Masyarakat ikut Dalam Perencanaan	Masyarakat ikut Dalam Pembiayaan	Masyarakat ikut Dlm menanggung resiko	Masyarakat ikut Dalam pengawasan	Masyarakat ikut Dalam pemeliharaan	Pertimbangan Sosial budaya masyarakat	PertimbTingkat pendidikan asyarakat	Penyediaan sumber daya personil	Kemampuan penyediaan peralatan
Rencana sesuai dengan RTRW	1.00	-0.03	0.632	0.57	0.40	0.28		0.48	0.606	-0.15	-0.02
		0.88	0.002	0.01	0.06	0.21		0.02	0.003	0.50	0.94
Masyarakat ikut Dlm Perumusan tujuan	-0.03	1.00	-0.23	-0.07	0.52	0.10		0.23	0.03	0.20	0.06
	0.88		0.30	0.75	0.01	0.66		0.30	0.91	0.36	0.81
Masyarakat ikut Dalam Perencanaan	0.632	-0.23	1.00	0.44	0.04	0.12		-0.04	0.20	-0.49	-0.41
	0.002	0.30		0.04	0.86	0.59		0.85	0.38	0.02	0.06
Masyarakat ikut Dalam Pembiayaan	0.57	-0.07	0.44	1.00	0.31	0.16		0.39	0.40	-0.39	-0.22
	0.01	0.75	0.04		0.16	0.48		0.07	0.06	0.07	0.32
Masyarakat ikut Dlm Menanggung Resiko	0.40	0.52	0.04	0.31	1.00	0.621		0.53	0.30	0.22	0.01
	0.06	0.01	0.86	0.16		0.002		0.01	0.18	0.33	0.96
Masyarakat ikut Dalam pengawasan	0.28	0.10	0.12	0.16	0.621	1.00		0.39	0.15	-0.01	-0.01
	0.21	0.66	0.59	0.48	0.002			0.07	0.51	0.95	0.96
Mastarakat ikut dalam pemeliharaan	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pertimbangan Sosial budaya masyarakat	0.48	0.23	-0.04	0.39	0.53	0.39		1.00	0.710	0.22	0.15
	0.02	0.30	0.85	0.07	0.01	0.07			0.0004	0.34	0.50
PertimbTingkat pendidikan asyarakat	0.606	0.03	0.20	0.40	0.30	0.15		0.710	1.00	0.01	0.07
	0.003	0.91	0.38	0.06	0.18	0.51		0.0004		0.95	0.76
Penyediaan sumber daya personil	-0.15	0.20	-0.49	-0.39	0.22	-0.01		0.22	0.01	1.00	0.615
	0.50	0.36	0.02	0.07	0.33	0.95		0.34	0.95		0.002
Kemampuan penyediaan peralatan	-0.02	0.06	-0.41	-0.22	0.01	-0.01		0.15	0.07	0.615	1.00
	0.94	0.81	0.06	0.32	0.96	0.96		0.50	0.76	0.002	

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

C	←	Pearson Correlation
S	←	Significant

Jika angka signifikan di bawah 0,05 berarti ada hubungan
 Jika angka signifikan di atas 0,05 berarti tidak ada hubungan
 Jika angka Pearson Correlation di atas 0,5 terjadi hubungan, dan hubungan yang terjadi adalah kuat
 Jika angka Pearson Correlation di bawah 0,5 terjadi hubungan, tetapi hubungan yang terjadi adalah lemah
 Jika nilainya positif (+) korelasi sejajar searah, jika negatif (-) korelasi sejajar berlawanan arah

5. Terdapatnya hubungan yang kuat antara pelibatan masyarakat dalam pengawasan dengan pelibatan masyarakat dalam menanggung resiko., Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan berpengaruh kuat dengan pelibatan masyarakat dalam menanggung resiko hasil pembangunan.
6. Terdapatnya hubungan yang kuat antara penyediaan peralatan dengan penyediaan SD personil. Dengan demikian ketersediaan peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman berpengaruh kuat terhadap penyediaan sumber daya personil di lingkungan dinas teknis.
7. Terdapatnya hubungan yang kuat antara kemampuan penyediaan peralatan dengan penyediaan sumber daya personil.
8. Terdapatnya hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Sedangkan yang ada hubungan sejajar berlawanan arah, dengan nilainya mendekati 0,5 adalah :

1. Antara penyediaan sumber daya personil dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan.
2. Antara kemampuan penyediaan peralatan dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan.

4.3.5 Faktor-faktor Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi

Dari hasil analisa terhadap faktor yang harus ada dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, dilanjutkan dengan analisa faktor dalam

perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi, maka diketahui faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan/kemampuan masyarakat, selanjutna disebut faktor-faktor strategis.

Faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak kabupaten Sukabumi adalah ada 11 (sebelas) faktor strategis, yaitu :

1. Pemerintah berkemampuan untuk melaksanakan perumusan rencana pembangunan infrastruktur permukiman sesuai dengan indikasi program yang ada dalam RTRW, tanpa mengikuti prioritas yang sudah ditentukan.
2. Pemerintah berkemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan tujuan pembangunan infrastruktur permukiman, dari pihak masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat, pengusaha yang usahanya ada hubungannya dengan infrastruktur permukiman, dan beberapa orang yang mewakili kelompok.
3. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pada saat/tahap pengumpulan data/informasi dan kajian/analisa.
4. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan menyumbangkan sebagian lahannya untuk pelebaran jalan dan pembuatan jaringan drainase.
5. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat dalam penyediaan dana, dana yang dimaksud di sini adalah sumbangan tenaga dalam pelaksanaan.
6. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat pemeliharaan, sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri.

7. Pemerintah berkemampuan melibatkan masyarakat mencari solusi untuk memutuskan apa yang harus diperbuat.
8. Masyarakat ikut dilibatkan pada pekerjaan pengawasan yang sifatnya teknis, sedangkan pekerjaan administrasi masih wewenang pemerintah.
9. Faktor ini mampu dilakukan sebagai pertimbangan untuk merumuskan perencanaan, dengan alasan bahwa faktor ini harus ditinjau untuk mengetahui budaya masyarakat yang akan dipakai untuk menyesuaikan dengan sistim pembangunan.
10. Pemerintah berkemampuan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat, hal ini sebagai bahan untuk melihat tingkat kemampuan masyarakat dalam pembangunan dilihat dari tingkat pendidikan.
11. Pemerintah baru sanggup/mampu menyediakan sumber daya personil dengan kemampuan merencanakan pekerjaan yang sifatnya untuk intern Kabupaten Sukabumi. Sedangkan yang sifatnya regional harus ada kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai tenaga ahli lebih mampu.

Hubungan sejajar dan searah yang paling kuat adakah antara faktor tingkat pendidikan masyarakat dengan kondisi sosial budaya. Hal ini terlibat dari keberadaan masyarakat bahwa jika budaya telah 'maju', maka tingkat pendidikan masyarakat juga akan lebih maju.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan secara seksama, maka pada bagian akhir dari studi mencari faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, maka didapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Untuk merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak harus memasukan faktor-faktor perencanaan yaitu : Kebijaksanaan pembangunan infrastruktur, Aspirasi masyarakat, Kebijakan pendanaan, Lembaga pengelolaan, Karakteristik umum masyarakat, dan Kemampuan dinas teknis.
- Sesuai dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Sukabumi, maka faktor-faktor perencanaan tersebut diuraikan sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku, sehingga menjadi 24 faktor. Dari 24 faktor tersebut bahwa yang belum dilakukan sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman adalah 12 (dua belas) faktor.
- Dari hasil analisa terhadap 12 (dua belas) faktor-faktor perencanaan tersebut didapat bahwa tingkat kemampuan pemerintah dan tingkat keinginan/kemampuan masyarakat adalah sama-sama mempunyai 'nilai' sedang untuk melaksanakan perencanaan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam faktor-faktor perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.
- Faktor-faktor strategis yang mampu dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman adalah :

- a. Pemerintah berkemampuan untuk melaksanakan perumusan rencana sesuai dengan RTRW,
 - b. Masyarakat dapat dilibatkan dalam merumuskan tujuan, perencanaan, penyediaan pendanaan, pemeliharaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pemeliharaan hasil rencana, dan masyarakat ikut menanggung resiko yang disebabkan kesalahan perencanaan,
 - c. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman harus mempertimbangkan sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan sumber daya personil.
- Sedangkan agar mempermudah pelaksanaan faktor-faktor strategis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, maka pemerintah harus mengetahui juga hubungan antara faktor-faktor strategis yang ada dalam perencanaan tersebut terutama faktor strategis sosial budaya masyarakat dengan tingkat pendidikan. Mengingat faktor ini merupakan faktor yang paling kuat diantara faktor-faktor strategis lainnya.

5.2 Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan hasil studi seperti tersebut di atas, maka rekomendasi adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi perencanaan tata ruang (RTRW), agar seluruh stakeholder mampu memahami isi yang terkandung dalam RTRW, dan rencana lainnya.
2. Perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pekerjaan pemeliharaan hasil pembangunan.

3. Perlu adanya perhatian yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, agar mempermudah proses melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
4. Perlu adanya usaha untuk merubah budaya masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah.

5.3 Usulan Studi Lanjutan

Menyadari bahwa seiring dengan berkembangnya pembangunan fisik, khususnya pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, maka konsekuensi yang harus diterima adalah munculnya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana, baik rencana tata ruang maupun rencana teknis konstruksi. Oleh sebab itu diperlukan adanya studi yang dapat mendukung hasil penelitian ini, yaitu :

1. Merevisi rencana tata ruang (RTRW), sehingga didapat rencana yang 'partisipatif'.
2. Membentuk forum komunikasi (forkom) didaerahnya yang dapat dipakai sebagai rekan kerja pemerintah yang selalu siap kapan saja, dengan maksud untuk :
 - a. Agar semua stakeholder mengerti dan memahami isi yang terkandung dalam rencana tata ruang (RTRW) yang akan dipakai sebagai acuan dalam pembuatan rencana pembangunan infrastruktur pemukiman. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap rencana tata ruang (RTRW) sangat erat kaitannya dengan kualitas hasil rencana, dan keinginan untuk melibatkan diri dari segi pembiayaan.
 - b. Masyarakat harus diberi kewenangan dalam melakukan pengawasan dan melaporkannya pada pengelola, hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dalam menanggung resiko akibat kesalahan perencanaan dan dalam pekerjaan pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alkadri, Muchdie, dan Suhandoyo (ed.), *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi*, BPPT, Jakarta, 1999.
- Arstein, *Ladder of Partisipations*, JAPA (Journal American Planning Association), 1970.
-, *Participatry Urban Decision Making*, UNHCS Habitat, Kenya, 2001
- Arikunto, Suharsimi, Prof., Dr., *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arsyad, Lincoln, Drs., M.Sc., *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1993.
- Azis, Iwan Jaya, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1994.
- Catanese, Anthony J., *Urban Planning*, University of Wisconsin, Milwaukee, 1979
- Chow, Ven Te., *Hidrolika Saluran terbuka*, Erlangga, Jakarta, 1989
- Dillon, William and Goldstein., 1984. *Multivariant Analisis : Methods and Application*. New York : John Willy and Son.
- Djojodipuro, Marsudi, *Teori Lokasi*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1992
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Firman, Tommy, *Studi Penataan Ruang Kawasan-kawasan Strategis*, Jurnal PWK, No. 3, Bandung, 1992
- Firman, Tommy, *Studi Penataan Ruang Kawasan-kawasan Strategis*, Jurnal PWK, No. 3, Bandung, 1992.
- Friedman, John., *Planning In The Publick Domain : From Knowledge to Action*, Princenton : Princeton University Press, 1987
- Glasson, John, *Pengantar Perencanaan Regional (terjemahan)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1990.
- Ibrahim, Syahrul, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu, Konsisten, dan Berkualitas*, Jurnal PWK, Vol. 9, No.2, 1998.
- Kawilarang, A. Edwin, *Peran Serta Swasta dan Prinsip Kewiraswastaan dalam Pembangunan Kota dan Wilayah*, Jurnal PWK, No. 14, Bandung, 1994.
- Kuntoro, *Metodologi Penelitian Survey*, Bina Grafika, Jakarta, 1989.
- Lewis, Oscar, *Faktor-faktor Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan*, Jakarta, 1986
- Marzuki, *Tata Cara Pengambilan Data dan Cara Penyajiannya*, Bina Grafika, Jakarta, 1987.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metoda-metoda Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 1992
- Moleong, Lexy J, Dr., Ma., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Nazir, Moh., Ph.D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Sosial*, Bina Grafika, Jakarta, 1995
- Oetomo, Andi, *Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang*, PWK-ITB, Bandung, 1994.
- , *Pembangunan Wilayah*, PWK-ITB, Bandung, 2000.
- PS, Hendro, *Perencanaan Infrastruktur Perukiman*, PWK-ITB, 1992
- Ramelan, Rahardi, Prof., Dr., Ir., MSc., *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Koperasi Jasa Profesi LPPN, Jakarta, 1997.
- Rukmana, Nana, Ir., *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan*, Departemen PU Cipta Karya, Jakarta, 1999.
- Shubert, Clarence, *Participatory Planning*, APDC, 1989.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian survey*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Studio Perencanaan 1999, *Pengoptimalan Sektor Potensial yang Dapat Memacu Pertumbuhan Wilayah Sukabumi dengan Didukung Keterkaitan antar Kota*, Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB, Bandung, 1999.
- Sudjito, Bambang Bintoro, *Strategi Pengembangan Kawasan Timur Indonesia: Isyu Pokok, Kebijakan, dan Program Pembangunan*, Jurnal PWK, No. 17, Bandung, 1995.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfabet, Bandung, 1994
- Sujarto, Djoko, Ir., *Pengantar Pengembangan Wilayah*, Diklat Kuliah, ITB, Bandung, 1985.
- , Djoko, Ir., *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*, Bhatara, Jakarta, 1986
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, FE UI dan Bina Grafika, Jakarta, 1985.
- Taylor, John L. and Emiel A. Wegelin, *Indonesia's Urban Infrastructure*, Pergamon Press, 1995.
- Institute, Urban Land, *Project Infrastructure Development Handbook*, Washington, ULI, 1989.
- Wibisana, *Partisipasi Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan*, Jakarta, 1989 : 120)
- Widiarto, *Materi Kuliah Pengembangan Ekonomi Lokal pada Magister Perencanaan Wilayah dan Kota*, Program Paka Sarjana, Jurusan PWK-ITB, Bandung, 2000.

Wirth, Louis, *Pembangunan Wilayah Berbasis Sosial Ekonomi Masyarakat*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.

PRODUK LAPORAN/DOKUMEN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

- Badan Lingkungan Hidup, *Sanitasi Lingkungan*, Laporan Hasil Survey Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Sukabumi, 2002
- Badan Lingkungan Hidup, *Program Penyehatan Lingkungan*, Laporan Kemajuan Hasil Kerja BLH Kabupaten Sukabumi, 2002
- Badan Lingkungan Hidup, *Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Penyehatan Lingkungan*, Bapedalda Propinsi Jawa Barat, 1998.
- Badan Lingkungan Hidup, *Identifikasi Pengelolaan Limbah Cair dan Padat Kabupaten Sukabumi*, BLH – PT. Semen Cibinong, 2001.
- Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah. *RTRW Kabupaten Sukabumi. 1996-2011*, PT. IDECO Utama, Jakarta, 1996.
- Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah. *Review RTRW Kabupaten Sukabumi dan Perencanaan Makro Wilayah Selatan Sukabumi. 2002*, PT. Bhumi Prasaja, Bandung, 2002.
- Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah. *RUTR Kecamatan Cicurug. 1999-2009*, PT. Grayasa, Bandung, 1999.
- Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah. *RTRW Kecamatan Cibadak 1998-2008*, PT. Ardikon, Bandung, 1998.
- Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Tahun Anggaran 2002*, 2002.
- Badan Pusat Statistik, *Sukabumi Dalam Angka 2001*, BPS, 2001
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *Daftar Induk Jaringan Jalan Desa*, Proyek Pengendalian dan Perencanaan Program Kebinamargaan, Bandung, 2001
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *Daftar Induk Jaringan Kabupaten*, Proyek Inventarisasi Jalan Kabupaten, Bandung, 2002
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *Daftar Jaringan Jalan Yang Tidak Dikelola Kabupaten Sukabumi*, Laporan Hasil Monitoring, Sukabumi, 2001
- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air, *Daftar Usulan program Pembangunan Bidang PSDA Tahun 2000-2004*, Laporan, Sukabumi, 2002
- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber daya Air, *Daftar Jaringan Irigasi Teknis, Semi Teknis, dan Irigasi Pedesaan*, Laporan Tahunan, Sukabumi, 2002

Laporan Pelaksanaan Proyek Triwulan I, II, dan III, Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi, Tahun 2002

Laporan Monitoring dan Evaluasi, Bappeda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2002

Laporan Karakteristik Sosial Budaya Petani di kaki Gunung Salak dan Gede-Pangrango, Antropologi-Unpad, Tahun 2002

Laporan Hasil Reses DPRD, DPRD Kabupaten Sukabumi, Tahun 2002

Laporan Monitoring dan Evaluasi, Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi, Tahun 2002

Laporan Penelitian Sanitasi Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Tahun 2002

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2001

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2002

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kabupaten Sukabumi Tahun 2002

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Permendagri Nomor 9.1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah nomor 24 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 2001 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Kabupaten Sukabumi.